

YUDHAGAMA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI TNI AD



ISSN 2086-9320



9772086932001

EDISI MARET 2026





Brigjen TNI Donny Pramono, S.E., M.Han.
KADISPENAD

YUDHAGAMA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI TNI AD

Alamat Redaksi

Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat
Jl. Veteran No. 5, Jakarta Pusat
Telp. (021) 3456838, 3811260, Fax. (021)
3848300

Alamat Email

palaganyudhagama@gmail.com,
dispenad@mabesad.mil.id

Penanggung Jawab

Brigjen TNI Donny Pramono, S.E., M.Han.

Pemimpin Redaksi

Kolonel Inf Hendrix Fahlevi Rangkuti

Sekretaris Redaksi

Letkol Caj (K) Yeni Triyeni, S.Pd.

Redaktur Pelaksana

Kolonel Caj (Har) Triyono, S.I.P.

Redaktur Bahasa

Mayor Caj (K) Besarah Septiana M., S.S.

Koordinator Liputan

Kapten Kav Heru Khoirul Anam, S.T.Han

Redaktur Percetakan

PNS Listin

Fotografer

CPNS Fitri Hastiani

Desain Grafis

Sertu (K) Intan Indah Permatasari

SAPA REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menerbitkan Jurnal Yudhagama Volume 46 Nomor I Edisi Maret 2026. Dalam edisi ini, kami menyajikan beberapa tulisan dari kalangan militer yang berhasil dihimpun oleh Tim Redaksi, yang terdiri dari para personel TNI AD yang bertugas di satuan jajaran TNI AD.

Tulisan-tulisan dalam jurnal ini disusun dengan tema dan isi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab serta fungsi yang diemban para penulis, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca. Jurnal Yudhagama hadir sebagai wadah untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan inspirasi bagi prajurit dan PNS TNI AD serta keluarga.

Kami berharap, jurnal ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca, terutama prajurit dan PNS TNI AD serta keluarga.

Kami juga menyadari bahwa dalam jurnal ini masih terdapat kekurangan, sehingga kami mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca sekalian untuk kesempurnaan Jurnal Yudhagama edisi berikutnya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Kami berharap Jurnal Yudhagama dapat menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya pertahanan dan keamanan negara.

Website

<http://www.tniad.mil.id>

Youtube

TNI Angkatan Darat

Facebook

<https://www.facebook.com/AngkatanDaratTNI>

Twitter (X)

https://twitter.com/tni_ad/

Instagram

https://www.instagram.com/tni_angkatan_darat

Tiktok

<https://www.tiktok.com/@tni.angkatan.darat>

Majalah Digital

<https://militer-angkatandarat.com/>

DAFTAR ISI



JEJAK JENDERAL SANTRI, KINI DI TANAH SILIWANGI

Oleh: Dr. Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn.

6

OPTIMALISASI PERAN SATKOWIL KODAM IV/DIPONEGORO DALAM Mendukung PROGRAM KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Oleh: Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han.

20



TRANSFORMASI EKONOMI TERITORIAL: STRATEGI AKSELERASI KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DI WILAYAH KODAM XIV/HASANUDDIN

Oleh: Mayjen TNI Bangun Nawoko

30

IMPLIKASI PERANG RUSIA-UKRAINA TERHADAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI RANPUR KAVALERI DALAM RANGKA Mendukung TUGAS POKOK TNI AD

Oleh: Kolonel Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.I.P., M.I.K

40



KOLABORASI PENTAHELIX DAN PERAN ZENI TNI AD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Oleh: Kolonel Czi Dian Hendriana Surachman

46

PERAN BEKANG TNI AD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI SUMATERA

Oleh: Kolonel Cba. Roni Kurniawan, S.H., M.I.Pol.

68



DAFTAR ISI



TRANSFORMASI TNI DALAM OPERASI MILITER SELAIN PERANG (OMSP) DAN PERAN TNI DALAM MISI PERDAMAIAN DUNIA

Oleh: Kolonel Arm Ezra Nathanael, S.Kom, M.M.

74

PENGUNGKAPAN DIRI DI ERA DIGITAL: MEMANFAATKAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI STRATEGI PREVENTIF UNTUK PENGAMANAN TUBUH

Oleh: Kolonel Inf Budiarto H. Damanik

90



DESA CANGGU, POTRET KAMPUNG PANCASILA ERA KEKINIAN

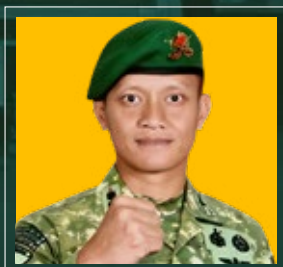
Oleh: Kapten Arm Bangun Budi Adi

98

MEREBUT HATI DAN KEPERCAYAAN WARGA DI TANAH PAPUA, KIPRAH SATGAS YONIF 142/KSATRIA JAYA DALAM MEMBANGUN KEDAMAIAN DI TANAH PAPUA

Oleh: Letkol Inf Dicky Sakti Maulana

104



KONTRIBUSI YONIF TP 840 / GOLOK SAKTI DALAM MEWUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN DI LEBAK, BANTEN

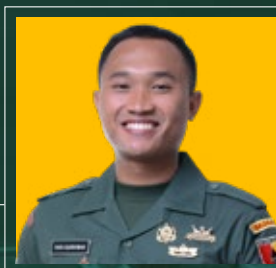
Oleh: Letkol Inf Brama Fathayasa

110

ARTICLES INTERNATIONAL OF INNOVATION PERJUANGAN DAN DEDIKASI PRAJURIT TNI DALAM MERAIH PRESTASI INTERNASIONAL MELALUI INOVASI DIGITAL PENDIDIKAN

Oleh: Sertu Hari Kurniawan, S.Hub.Int

116







JEJAK JENDERAL SANTRI, KINI DI TANAH SILIWANGI

Oleh: Dr. Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn.

Jejak Lahir

Pada tanggal 2 April 1971, telah lahir seorang bayi laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama Ust. H. Jufran Efendi (almarhum) dan Hj. Siti Khadijah (almarhumah). Doa dan harapan dari orang tua bayi kelak akan berbakti kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Bayi tersebut diberi nama Kosasih, nama yang sangat identik dengan orang-orang Sunda. Nama tersebut terinspirasi oleh seseorang dimasa itu sebagai seorang tentara yang berwibawa, friendly, lincah, bersahaja, menjadi panutan untuk banyak orang, merakyat dan mudah bergaul tanpa ada sekat, dan beliau adalah R.A. Kosasih yang tak lain adalah Panglima Kodam Siliwangi pada masanya (Pangdam VII periode 1958-1960).

Kosasih kecil tumbuh berkembang seperti layaknya anak-anak lainnya di desa dengan kegiatan dan permainan ala desa.



petak umpet, mandi dan berenang di sungai, memanjat pohon dan mengumpulkan pasir untuk dijual. Kosasih merupakan anak ke-4 (empat) dari 6 (enam) bersaudara dan besar harapan orang tuanya supaya Kosasih dapat menjadi guru (ustadz) serta masuk sekolah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta.

Masa sekolah SD dihabiskan sampai kelas V (lima) di kampung halamannya dan selebihnya diselesaikan di Jakarta sampai SMA karena mengikuti kedua orang tuanya. Sejak SMP hari-hari dihabiskan di salah satu masjid sebagai marbot dan selain itu sebelum berangkat ke sekolah, Ia sebagai kuli Toko Bangunan PD Dua Saudara sambil jualan Es Mambo dan jual TTS sampai tingkat SMA di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk membantu perekonomian keluarga karena Bapak beliau pekerjaannya sebagai guru mengaji dan ibunya sebagai ibu rumah tangga.

Begitulah keseharian Kosasih sampai menjelang tamat SMA dan suatu ketika setelah Shalat Isya dilanjutkan merapikan alat-alat shalat di masjid dan menutup pintunya, lalu Ia pergi makan mie ayam "Pak Yanto" terletak di belakang Masjid Al-Falaq, satu hal yang tidak pernah diduga ada seorang anggota TNI datang makan mie ayam dan selesai makan mie ayam, tentara tersebut langsung keluar dan tidak membayar, pada saat ditagih oleh Pak Yanto untuk membayarnya namun tentara tersebut menghampiri Pak Yanto dan mencabut sangkur lalu menancapkannya di atas gerobak mie ayam tersebut dan tidak membayarnya.

Kosasih kaget pada waktu itu dan dalam hatinya disertai dengan doa dan mengucapkan istighfar, mudah-mudahan saya dapat menjadi tentara dan dapat



memperbaiki akhlak tentara. Sejatinnya tentara harus mengayomi, melindungi dan bahkan membantu masyarakat yang membutuhkannya, itulah niat dan doa dipanjatkannya. Atas kejadian tersebut membekas sampai hari ini bahwa tentara tidak boleh melukai dan menyakiti hati masyarakat serta harus manunggal bersama rakyat.

Pada akhirnya, Kosasih mendaftar sebagai calon tentara secara diam-diam dan saat mendaftar Ia tidak tahu jenis pendidikan tentara apa yang Ia daftar, saat pengisian format pendaftaran maka seluruh format ditandatangani sendiri yang seharusnya ditandatangani oleh bapaknya. Hal ini dilakukan karena khawatir tidak

diizinkan untuk mendaftar tentara, dan setelah dinyatakan lulus untuk melanjutkan ujian seleksi di Magelang maka barulah menyampaikan semuanya kepada kedua orang tuanya bahwa ia akan ke Magelang untuk seleksi AKABRI Tingkat Pusat dan akhirnya dinyatakan lulus AKMIL di Magelang.

Pendidikan Umum dan Militer

Kosasih memulai pendidikan formalnya di Sekolah Dasar (SD) Tamat Tahun 1984, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Tamat Tahun 1987, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Tahun 1990, Sarjana (S1) Tamat Tahun 1999, dan Magister (S2) Tahun 2025.

Kosasih, tidak hanya melekat sebagai identitas personal, tetapi juga merepresentasikan perjalanan panjang seorang prajurit yang tumbuh, ditempa, dan mengabdikan sepenuhnya untuk bangsa dan negara. Dalam struktur kepangkatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, pangkat Mayor Jenderal (Mayjen) merupakan salah satu jenjang perwira tinggi yang menuntut pengalaman luas, integritas tinggi, serta kepercayaan penuh dari pimpinan TNI dan negara.

Penyematan pangkat Mayor Jenderal TNI mencerminkan keberhasilan melalui proses seleksi ketat dan penilaian berlapis atas rekam jejak pengabdian, loyalitas, serta kapasitas kepemimpinan. Pada pangkat ini, seorang perwira tidak hanya dituntut cakap secara taktis dan strategis, tetapi juga mampu menjadi teladan moral bagi prajurit di bawah kepemimpinannya.

Gelar akademik Sarjana Ekonomi (S.E.) dan Magister Manajemen (M.M.) yang disandang menegaskan bahwa tidak hanya

mengandalkan pendidikan dan pengalaman militer, tetapi juga memiliki fondasi keilmuan umum yang kuat. Pendidikan di bidang ekonomi dan manajemen sumber daya manusia memberikan bekal penting dalam memahami manajemen organisasi, pengelolaan sumber daya, perencanaan anggaran, serta pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis analisis.

Perpaduan antara pangkat militer tinggi dan gelar akademik tersebut menjadikan Kosasih, sebagai figur perwira tinggi (Prajurit TNI AD) yang memiliki keseimbangan antara ketegasan komando, kecerdasan intelektual, dan kematangan berpikir. Identitas lengkap yang melekat pada namanya mencerminkan sosok pemimpin yang tidak hanya memimpin dengan kewenangan struktural, tetapi juga



dengan kapasitas personal dan moral yang kuat.

Dalam setiap penyebutan nama dan gelarnya, tersirat tanggung jawab besar sebagai perwira tinggi TNI yang mengemban amanah negara, menjaga kehormatan institusi, serta menjadi panutan bagi prajurit dan masyarakat. Oleh karena itu, penyebutan lengkap Mayor Jenderal TNI Kosasih, S.E., M.M., bukan sekadar formalitas, melainkan penegasan atas perjalanan panjang pengabdian, kompetensi, dan integritas seorang Jenderal di Tanah Siliwangi.

Selain pendidikan umum yang telah ditempuh, Kosasih juga telah melewati Pendidikan militer yakni AKMIL dan

tamat Tahun 1993, kemudian SESSARCAB INFANTERI Tahun 1994, SUSLAPA INFANTERI Tahun 2000, SESKOAD Tahun 2007, SESKO TNI Tahun 2018, dan LEMHANNAS RI Tahun 2021.

Tidak hanya berhenti pada Pendidikan Pengembangan Umum saja tetapi juga melewati kursus spesialis kemiliteran yakni DIK KOMANDO Tahun 1995, SUSSPES BAK DUK (Sniper) Tahun 1995, Counter Terrorisem Intel Course Tahun 1996, Kursus Bahasa Perancis Tahun 1999, SUSPA MINPERS PRA Tahun 2000, SUS Bahasa Inggris Crash Program Tahun 2005, dan SUS DANYON Tahun 2009, serta SUS Auditor Pertama Tahun 2013.





Riwayat Jabatan

Dalam mengemban tugas dan jabatannya, Kosasih selalu didampingi sosok perempuan yang selalu setia mendampinginya yakni seorang istri bernama Asri Wiraningsih dan dua anak yakni Alfia Tasya Karisa dan Adelia Naila Karisa. Keberhasilan dalam mengemban amanah ini tentu telah diberi dukungan penuh dari istri, anak-anak dan keluarga besarnya.

Perjalanan karier Kosasih di lingkungan TNI Angkatan Darat mencerminkan proses panjang pembentukan seorang pemimpin militer yang ditempa melalui pengalaman lapangan, jabatan staf, hingga posisi strategis ditingkat komando.

Setiap jabatan yang diembannya menjadi tahapan penting dalam membangun kapasitas kepemimpinan, ketajaman analisis, serta kedewasaan dalam mengambil keputusan. Sejak awal penugasan sebagai perwira, Kosasih dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan memiliki kepedulian

tinggi terhadap prajurit. Pengalaman di satuan operasional memberinya pemahaman mendalam mengenai dinamika lapangan, karakter prajurit, serta pentingnya kepemimpinan yang tidak hanya berbasis perintah, tetapi juga keteladanan.

Memasuki jenjang perwira menengah hingga perwira tinggi, dipercaya mengemban berbagai jabatan strategis, baik di satuan kewilayahan maupun staf komando. Jabatan-jabatan tersebut menuntut kemampuan manajerial, perencanaan operasi, penguasaan teritorial, serta koordinasi lintas institusi atau instansi, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan lainnya, hingga tokoh masyarakat.

Dalam kapasitasnya sebagai pejabat TNI AD, Kosasih, terlibat aktif dalam; Pembinaan satuan dan personel, memastikan kesiapsiagaan prajurit baik secara fisik, mental, maupun ideologis, Penguatan tugas kewilayahan, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan, ketahanan nasional, dan kemanunggalan TNI dengan rakyat

dan Pengelolaan organisasi dan sumber daya, termasuk perencanaan program kerja, pengawasan, serta evaluasi kinerja satuan.

Puncak kepercayaan institusional terhadap dirinya terlihat saat ia ditunjuk untuk menduduki jabatan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/



Siliwangi ke-47, berdasarkan Surat Keputusan PANGLIMA TNI Nomor Keputusan/ 1001/ VII/ 2025, tanggal 31 Juli 2025.

Jabatan ini menempatkan Kosasih, sebagai pemegang kendali tertinggi di Kodam III/Siliwangi mengikuti jejak pendahulunya Raden Ahmad Kosasih (Pangdam Siliwangi ke VII). Sebagai Pangdam III/Siliwangi, beliau bertanggung jawab atas; pembinaan dan kesiapan seluruh satuan jajaran Kodam III/Siliwangi; pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP), pengamanan wilayah Jawa Barat dan Banten yang memiliki kompleksitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat.



Pengangkatan Kosasih, menggantikan Pangdam sebelumnya menandai kesinambungan kepemimpinan Kodam Siliwangi, dengan pendekatan yang menekankan ketegasan, profesionalisme, pendekatan religius dan humanis. Di bawah kepemimpinannya, Kodam Siliwangi diarahkan untuk tetap adaptif terhadap tantangan zaman tanpa meninggalkan jati diri sebagai tentara rakyat.

Riwayat jabatan yang dilalui Kosasih, menunjukkan bahwa kepemimpinannya bukan hasil proses instan, melainkan buah dari pengabdian panjang, loyalitas tinggi, serta rekam jejak yang konsisten. Pengalaman lintas jabatan tersebut menjadi pondasi kuat dalam menjalankan peran



strategisnya sebagai Pangdam III/Siliwangi, sekaligus mempertegas posisinya sebagai figur pemimpin militer yang matang, berintegritas, dan berakar pada nilai-nilai keislaman serta kebangsaan.

Beberapa jabatan penting yang telah dilaluinya antara lain Danrem 062/Tarumanegara Kodam III/Siliwangi, Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan, Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan, Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Selain itu Kosasih juga pernah berdinasi di lingkungan Istana Kepresidenan sejak tahun 2001 sampai tahun 2007 untuk mengawal Presiden dan Wakil Presiden RI.

Tanda Kehormatan Negara

Sepanjang perjalanan pengabdianya di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Kosasih, telah menerima berbagai tanda kehormatan negara sebagai bentuk pengakuan negara atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian tanpa pamrih kepada bangsa dan negara. Tanda jasa tersebut tidak diberikan secara otomatis, melainkan melalui penilaian ketat terhadap rekam jejak, integritas, kinerja, dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas.

Sebagai perwira yang meniti karier dari bawah hingga mencapai pangkat perwira tinggi, ia berhak atas berbagai tanda



jasa/tanda kehormatan yang diberikan kepada prajurit dengan masa dinas panjang dan tanpa cacat. Penghargaan ini mencerminkan kesetiaan dan loyalitasnya terhadap institusi TNI serta kesungguhan dalam menjalankan amanah di setiap penugasan. Selain itu, dalam kapasitasnya sebagai pejabat komando dan staf strategis, Kosasih juga menerima penghargaan atas prestasi dan kinerja, baik dalam pembinaan satuan, peningkatan profesionalisme prajurit, maupun keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas kewilayahan.

Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusinya dalam menjaga stabilitas keamanan, memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta membangun sinergi yang harmonis dengan pemerintah daerah dan unsur masyarakat. Sebagai Pangdam III/Siliwangi, berbagai capaian satuan di bawah kepemimpinannya turut menjadi refleksi dari

kualitas kepemimpinannya. Dalam konteks ini, tanda jasa dan penghargaan yang disematkan tidak hanya bersifat personal, tetapi juga merupakan pengakuan atas keberhasilannya sebagai pemimpin kolektif yang mampu menggerakkan organisasi secara efektif dan berintegritas.

Lebih jauh, penghargaan yang diterima Kosasih juga merepresentasikan kepercayaan pimpinan TNI dan negara terhadap kemampuannya dalam mengemban tugas strategis. Kepercayaan tersebut tercermin dari kesinambungan penugasan penting yang diberikan kepadanya, hingga akhirnya dipercaya memimpin salah satu kodam paling bersejarah di Indonesia. Dalam perspektif moral dan religius yang ia pegang teguh, tanda jasa dan penghargaan bukanlah tujuan akhir pengabdian, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.



Tanda kehormatan negara yang telah diterimayakni sebagai berikut; Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Bhayangkara Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Satyalancana Kesetiaan 32 Tahun, Satyalancana Dharma Bantala, Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun, Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun, Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun, Satyalancana Dwidya Sista, Satyalancana Dharma Nusa, Satyalancana Wira Nusa, Satyalancana Wira Dharma, Satyalancana Wira Siaga, Satyalancana Ksatria Yudha, Satyalancana Bhakti Pendidikan, Satyalancana Wira Karya, Satyalancana Kebaktian Sosial.

Ia memandang setiap penghargaan sebagai pengingat untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjadi teladan bagi prajurit di bawah komandonya. Demikian, rangkaian tanda jasa dan penghargaan yang melekat pada diri Kosasih, sebagai refleksi dari perjalanan panjang seorang

prajurit yang mengabdikan dengan kesetiaan, profesionalisme, dan nilai-nilai keislaman. Penghargaan tersebut mempertegas posisinya sebagai perwira tinggi yang tidak hanya berhasil secara struktural, tetapi juga dihormati secara moral sebuah kualitas yang sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan TNI di tengah tantangan zaman.

Penugasan Dalam Negeri dan Luar Negeri

Dalam perjalanan karier militernya, Kosasih telah menerima penugasan dalam negeri yaitu Operasi TIMTIM, Operasi Irian, Ekspedisi NKRI Sulawesi, dan Ekspedisi NKRI Maluku dan Maluku Utara.

Selain itu Kosasih tidak hanya ditempa melalui penugasan di dalam negeri, tetapi juga melalui berbagai penugasan dan keterlibatan berskala internasional. Penugasan luar negeri merupakan bagian penting dari pembentukan perwira TNI modern, karena membuka cakrawala berpikir global, memperkuat diplomasi militer, serta meningkatkan profesionalisme prajurit

dalam menghadapi tantangan keamanan regional dan internasional.

Beberapa penugasan luar negeri yang telah dijalankannya antara lain; OJT Korea Selatan, Pengamanan VVIP di Polandia, Uni Emirat Arab, Sudan, Yaman, Saudi Arabia, Qatar, Kansas, Australia, Myanmar, Kuba, China, Brunei Darussalam, Turki, Ceko, Austria, Rusia, Perancis, Inggris, Belgia, dan Mesir.

Penugasan luar negeri juga memperkenalkannya pada lingkungan operasi multinasional, dimana kerja sama, koordinasi, dan komunikasi lintas negara menjadi kunci keberhasilan. Dalam situasi tersebut, ia dituntut untuk mampu merepresentasikan TNI dan Indonesia secara profesional, menjaga kehormatan bangsa, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdamaian dan stabilitas internasional.

Sebagai perwira yang berlatar belakang religius dan dikenal menjunjung nilai etika dan moral, Kosasih membawa pendekatan humanis dan etis dalam setiap keterlibatan internasional. Ia memandang penugasan luar negeri bukan semata sebagai ajang unjuk kekuatan militer, melainkan sebagai ruang dialog, kerja sama, dan kontribusi nyata Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Pengalaman internasional tersebut memperkaya perspektif kepemimpinannya, terutama dalam memahami bahwa tantangan keamanan modern bersifat lintas batas dan multidimensional, mencakup aspek militer, sosial, ideologis, hingga kemanusiaan.

Wawasan ini menjadi bekal penting saat ia mengemban jabatan strategis di dalam negeri, termasuk sebagai Pangdam III/ Siliwangi. Penugasan luar negeri yang pernah dijalani juga menegaskan bahwa sosok Jenderal Santri tidaklah terbatas pada ruang

lokal atau nasional semata. Dengan bekal keimanan yang kuat dan wawasan global yang luas, Kosasih menunjukkan bahwa nilai-nilai religius dapat berjalan seiring dengan profesionalisme militer modern dan diplomasi internasional. Dengan demikian, rekam jejak penugasan luar negeri Kosasih, menjadi bagian penting dari jejak kepemimpinannya membentuk perwira tinggi yang tidak hanya kokoh menjaga kedaulatan negara, tetapi juga mampu membawa nama baik Indonesia di kancah internasional, dengan sikap santun, berwibawa, dan berintegritas.



Figur Jenderal yang Biasa Dipanggil Jenderal Santri di Tanah Siliwangi

Kehadiran Kosasih, sebagai Pangdam III/Siliwangi tidak hanya dimaknai sebagai pergantian kepemimpinan struktural semata, melainkan sebagai hadirnya figur pemimpin militer yang membawa nilai spiritual dan kearifan lokal dan moral di tengah dinamika sosial masyarakat di Tanah Siliwangi. Sosoknya merepresentasikan apa yang kerap disebut sebagai “Jenderal Santri” seorang perwira tinggi yang memadukan ketegasan militer dengan kedalaman nilai keislaman dan kesantunan budaya.

Latar belakang religius yang melekat pada diri Kosasih tidak terlepas dari lingkungan asalnya di Pandeglang, Banten, wilayah yang dikenal kuat dengan tradisi pesantren, ulama, dan kehidupan keagamaan yang kental. Nilai-nilai santri seperti kesederhanaan, keikhlasan, kedisiplinan, dan penghormatan kepada guru serta orang tua menjadi fondasi karakter yang terbawa hingga kejenjang tertinggi karier militernya. Di Tanah Siliwangi wilayah yang sarat dengan nilai budaya Sunda dengan falsafah *Silih Asih, Silih Asuh, dan Silih Wawangi*.

Sejarah panjang perjuangan figur Jenderal Santri menemukan relevansi yang kuat dalam kepemimpinannya, Kosasih hadir sebagai jembatan antara nilai-nilai

militer, religiusitas, dan kearifan lokal yang menciptakan harmoni antara kekuatan negara dan denyut kehidupan masyarakat. Sebagai Pangdam III/Siliwangi, Ia dikenal menekankan pentingnya keteladanan moral dalam kepemimpinan.

Baginya, prajurit yang kuat bukan hanya yang unggul secara fisik dan taktis, tetapi juga yang memiliki akhlak, integritas, dan kesadaran spiritual. Pendekatan ini menjadikan nilai keimanan bukan sebagai simbol seremonial, melainkan sebagai landasan etika dalam menjalankan tugas.



Kedekatannya dengan ulama, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, budayawan dan pimpinan pesantren menjadi salah satu ciri khas kepemimpinannya. Dalam berbagai kesempatan, Ia mendorong sinergi antara TNI dan elemen keagamaan sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan nasional dan ketahanan sosial. Baginya, pesantren dan komunitas keagamaan bukan sekadar mitra, tetapi pilar penting dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan moral bangsa.

Figur sebagai Jenderal Santri juga tercermin dari gaya komunikasi dan sikap personal Kosasih. Ia dikenal berbicara lugas namun santun, tegas tanpa arogansi, serta dekat dengan prajurit dari berbagai lapisan. Kepemimpinannya tidak berjarak, melainkan membumi menghidupkan kembali semangat pamong, pengayom, dan pelindung rakyat sebagaimana jati diri TNI.

Dalam konteks sejarah, Kodam Siliwangi yang memiliki akar kuat dalam perjuangan kemerdekaan, Kosasih membawa kesinambungan nilai juang yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual. Ia memaknai perjuangan modern sebagai upaya menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman baik yang bersifat nyata maupun laten dengan pendekatan yang mengedepankan kebijaksanaan, dialog, dan ketegasan yang berkeadilan.

Lebih luas lagi, figur Jenderal Santri di Tanah Siliwangi menjadi simbol bahwa militerisme tidak bertentangan

dengan religiusitas. Justru sebaliknya, nilai-nilai keimanan dapat menjadi penguat profesionalisme, pengendali kekuasaan, dan penuntun arah kebijakan. Dalam diri Kosasih, dua dunia tersebut berpadu secara harmonis menghasilkan kepemimpinan yang kuat secara struktural dan meneduhkan secara moral.

Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menanamkan disiplin dan nilai keagamaan sejak usia dini. Dari ruang keluarga itulah Ia belajar bahwa ketegasan tidak harus keras, dan kepemimpinan tidak selalu bersuara lantang. Kultur Sunda yang menjunjung kesantunan berpadu dengan ajaran Islam yang membumi membentuk karakter kepemimpinannya tenang, bersahaja, namun tegas saat





prinsip harus ditegakkan. Dalam keseharian, sosok ini dikenal tidak gemar menonjolkan diri. Ia lebih memilih mendengar, berdialog, dan memahami sebelum mengambil keputusan. Dari sikap inilah kemudian tumbuh sebutan **“Jenderal santri”**, sebuah julukan yang melekat bukan karena simbol, melainkan karena laku hidup.

Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks mulai dari dinamika sosial, perubahan budaya, hingga ancaman non militer figur Jenderal Santri memberikan harapan akan hadirnya kepemimpinan yang tidak hanya responsif dan adaptif, tetapi juga berakar pada nilai luhur bangsa. Kepemimpinan semacam inilah yang relevan di Tanah Siliwangi dan Indonesia secara

keseluruhan. Dengan demikian, Mayor Jenderal TNI Kosasih, S.E., M.M., tidak sekadar menjalankan peran sebagai Pangdam III/Siliwangi, tetapi juga menghadirkan makna kepemimpinan yang lebih dalam yaitu kepemimpinan yang tegas namun berakhlak, kuat namun menyejukkan, serta modern tanpa kehilangan jati diri, inilah esensi dari Jejak Jenderal Santri, Kini di Tanah Siliwangi dan semua hal ini dilakukan sebagai implementasi dari motto beliau **“Jabatanku adalah Ibadahku”**, dan didasari pada hadis nabi yang berbunyi **“sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia lainnya”**.

OPTIMALISASI PERAN SATKOWIL KODAM IV/ DIPONEGORO DALAM MENDUKUNG PROGRAM KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Oleh: Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han.
(PANGDAM IV/Diponegoro)

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar fundamental bagi keberlangsungan suatu bangsa. Perkembangan akan lonjakan populasi dalam sebuah negara, menuntut ketersediaan pangan yang memadai dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Data World Atlas 2025, menunjukkan populasi global mencapai 8,1 miliar jiwa dengan Asia sebagai benua terpadat. Indonesia sebagai salah satu negara yang menempati peringkat ke-4 dalam daftar 10 negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia yang diperkirakan mencapai 277 juta jiwa pada akhir tahun 2025 dan akan terus meningkat



jumlahnya pada tahun-tahun mendatang menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan pangan dengan jumlah penduduk.

Kedaulatan pangandapat diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa untuk mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan diawali dengan pencapaian swasembada pangan, selanjutnya secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah dan daya saing di bidang pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ketahanan pangan sangat penting dalam strategi pertahanan nasional karena menyediakan stabilitas yang mendukung keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika suatu negara memiliki ketahanan pangan yang

baik, risiko ketergantungan pada impor menurun, sehingga negara lebih terlindungi dari ancaman eksternal seperti embargo pangan atau fluktuasi harga global yang dapat memengaruhi akses pangan. Negara dengan ketahanan pangan yang kuat juga lebih mampu menghadapi ancaman terhadap ketersediaan pangan yang diakibatkan oleh bencana alam, perubahan iklim, atau gangguan lainnya pada rantai pasokan internasional. Ketahanan pangan berkontribusi langsung pada keamanan karena adanya ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau akan mampu menurunkan risiko konflik sosial akibat kelangkaan atau kenaikan harga pangan. Ketika masyarakat memiliki akses stabil terhadap makanan, risiko ketidakstabilan sosial yang dapat diperburuk oleh kerusuhan



atau protes dapat diminimalisasi. Pada sisi lain, ketahanan pangan juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat: nutrisi yang baik memungkinkan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan, yang pada akhirnya mendukung daya tahan ekonomi dan stabilitas sosial. Di banyak negara, termasuk Indonesia, ketahanan pangan telah menjadi prioritas dalam agenda keamanan nasional. Pemerintah mengembangkan program untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri, seperti diversifikasi tanaman dan penggunaan teknologi pertanian, guna memperkuat kemampuan pangan yang mandiri. Dalam konteks pertahanan, Tentara Nasional Indonesia menerima tugas pelibatan dalam mendukung dan menyukseskan program ketahanan pangan nasional.

Dalam konteks inilah, Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan penegasan atas pengerahan TNI melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Program ketahanan pangan dipandang sebagai isu strategis yang membutuhkan keterlibatan seluruh komponen bangsa, termasuk TNI dan dianggap sebagai bagian dari pertahanan negara di masa damai. Peran ini menjadikan Kodam IV/Diponegoro sebagai salah satu Komando Utama Operasi (Kotama Ops) TNI dituntut untuk terus aktif dalam mendukung dan mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan melalui pencapaian target kawasan lumbung pangan nasional yang meliputi wilayah provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga, Kodam IV/Diponegoro juga dituntut untuk menyiapkan dan memberdayakan potensi wilayah pertahanan aspek darat menuju tercapainya ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh.

Kodam IV/Diponegoro sebagai penjaga stabilitas dan kondusifitas di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki posisi yang sangat strategis. Secara historis dan berkelanjutan, provinsi-provinsi di Pulau Jawa, tetap menjadi kontributor utama dan lumbung padi nasional dengan target produksi yang signifikan untuk tahun 2025. Dua provinsi ini merupakan pusat produksi pangan nasional sekaligus menghadapi tantangan seperti alih fungsi lahan, keterbatasan irigasi, kerawanan bencana, hingga stagnasi regenerasi petani. Kondisi tersebut menuntut optimalisasi peran Kodam IV/Diponegoro dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pengerahan satuan Kodim, Koramil, hingga Babinsa sebagai ujung tombak pendampingan dan akselerator pertanian.

Artikel ini menganalisis peran satuan komando kewilayahan Kodam IV/Diponegoro dalam mendukung ketahanan pangan, mengidentifikasi tantangan lapangan dan merumuskan solusi inovatif untuk menjamin dukungan maksimal terhadap ketahanan pangan di wilayah Kodam IV/Diponegoro.

PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Ketahanan Pangan dan Mandat Satkowl.

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Dalam perspektif pertahanan, ketahanan pangan adalah bagian integral dari ketahanan nasional. Pangan yang kurang stabil dapat memicu kerawanan sosial, ketergantungan impor, serta menurunkan ketahanan wilayah. Hal ini menjadikan TNI AD memiliki peran signifikan, terlembaga melalui jaringan Satkowil sebagai pemelihara stabilitas dan pembina masyarakat.

- a. **Mandat OMSP.** TNI AD memiliki legitimasi untuk membantu pemerintah dalam krisis pangan, bencana, ataupun persoalan sosial lainnya. Mandat ini memberi ruang bagi Kodam IV/Diponegoro untuk bertindak responsif dan terukur dalam setiap program pangan.
- b. **Jaringan Babinsa.** Babinsa merupakan elemen strategis yang melekat pada masyarakat desa. Mereka memahami tentang geografi, demografi dan kondisi sosial lokal. Mereka bertindak sebagai enabler dan communicator kebijakan dari pusat dan daerah ke petani.
- c. **Kemampuan Komando dan Disiplin Organisasi.** Struktur Satkowil mampu menggerakkan sumber daya secara cepat dan efektif. Disiplin, kemampuan mobilisasi dan kultur kerja yang adaptif

adalah modal besar dalam mengatasi hambatan produksi, bencana atau ancaman ketahanan pangan lokal.

2. Analisis Kondisi Wilayah dalam Ketahanan Pangan.

Sebagai salah satu lumbung pangan strategis di Pulau Jawa, Jawa Tengah dan DIY memiliki kontribusi besar terhadap produksi nasional. Namun demikian, wilayah ini menghadapi tantangan signifikan yang berpotensi mengganggu stabilitas pangan, antara lain:

- a. **Alih Fungsi Lahan Pertanian.** Pengurangan drastis area sawah produktif akibat urbanisasi dan industrialisasi.



- b. Keterbatasan Infrastruktur Irigasi dan Kekeringan. Banyak daerah di Pantura dan Selatan Jawa Tengah rawan kekeringan saat musim kemarau, mengancam produksi padi dan palawija.
- c. Disparitas Akses Pupuk dan Benih. Kesenjangan penyaluran pupuk bersubsidi dan benih unggul, seringkali terhambat di tingkat pengecer
- d. Regenerasi Petani. Minimnya minat generasi muda untuk bertani, mengakibatkan usia rata-rata petani yang semakin tua dan adopsi teknologi lambat.

Situasi ini menuntut peran Satkowil sebagai *force multiplier* bagi Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

dalam membina kelembagaan petani, pendampingan produksi dan penyelesaian kendala lapangan.

3. Strategi Optimalisasi Peran Satkowil Kodam IV/Diponegoro.

Optimalisasi peran Satkowil di Kodam IV/ Diponegoro dapat difokuskan pada tiga pilar utama: Pendampingan Produksi, Sinergi Kelembagaan dan Pengendalian Stabilitas.

- a. Pilar I: Pendampingan Teknis dan Peningkatan Produksi, Peran Babinsa sebagai Pendamping Petani harus ditingkatkan dari sekadar pengawasan menjadi pendamping teknis yang kredibel.
 - 1) Supervisi dan Pengawasan Program. Satkowil (terutama Koramil dan Babinsa) harus menjadi instansi yang mengawal ketat program pemerintah sebagai



berikut:

a) Pengawasan Pupuk dan Benih: Melakukan *monitoring* real-time terhadap stok dan distribusi pupuk bersubsidi dari gudang distributor hingga ke tangan petani yang berhak, bekerja sama dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Ini bertujuan untuk meminimalkan praktik penimbunan (pengepul) atau penyimpanan.

b) Rehabilitasi Irigasi: Satkowil berpartisipasi aktif dalam kegiatan karya bakti pembangunan dan perbaikan saluran irigasi tersier. Saluran irigasi yang lancar adalah kunci keberhasilan panen di wilayah rawan kekeringan.

2) Pemanfaatan Lahan Tidur dan Pertanian Terpadu. Mendorong Satuan untuk memanfaatkan lahan kosong milik TNI (asrama, Makodim dan Makoramil) atau lahan marjinal lainnya untuk demonstrasi plot (Demplot) pertanian terpadu melalui metode:

a) Pola Tanam Inovatif: Bersama PPL, Babinsa mendorong adopsi pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim (misalnya, padi varietas unggul tahan kekeringan) dan praktik *smart farming* sederhana.

b) Diversifikasi Pangan Lokal: Selain komoditas padi, Babinsa harus mempromosikan penanaman komoditas lokal non-beras (ubi, jagung, sorgum) sebagai bagian dari upaya diversifikasi pangan di tingkat keluarga dan desa.

c) Membuat kebun percontohan yang terintegrasi antara perkebunan tanaman sayur yang dibutuhkan oleh masyarakat, budidaya ikan dan peternakan sapi, kambing dan peternakan unggas sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.



Diharapkan bisa dengan sistem organik sehingga terjadi kemandirian baik pakan kimia, pupuk organik dan pestisida organik sehingga tidak tergantung oleh produk pabrikan yang semakin hari semakin mahal. Dengan demikian bisa memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja bagi Babinsa dan petani di wilayah binaannya. Disamping itu agar produk organik menjadikan bahan makanan lebih sehat karena terbebas dari produk yang mengandung zat kimia yang berbahaya.

b. Pilar II: Sinergi Kelembagaan dan Penguatan SDM Satkowil. Dukungan Satkowil akan efektif jika terintegrasi dalam kerangka kerja multi-pihak.

1) Kolaborasi. Optimalisasi peran Satkowil

menuntut sinergi yang kuat dengan empat elemen utama:

a) Pemerintah Daerah (Pemda): Memastikan anggaran ketahanan pangan daerah selaras dengan program nasional dan mendukung pelatihan Babinsa.

b) Akademisi/Universitas: Bekerja sama dengan perguruan tinggi (misalnya Undip dan UGM) untuk transfer teknologi pertanian (contoh: teknologi pengolahan pascapanen, teknik vertikal farming untuk kawasan urban).

c) Pelaku Usaha (Swasta): Mendorong kemitraan dengan BUMN atau perusahaan swasta untuk akses permodalan, pemasaran hasil panen dan penyediaan alat mesin pertanian (Alsintan) serta bimbingan teknis dari pelaku usaha terhadap yang telah dilaksanakan.

d) Masyarakat (Gapoktan): Satkowil harus memperkuat Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai subjek pembangunan, bukan objek.

2) Program Pelatihan Kapasitas.

Anggota Satkowil harus memiliki pemahaman teknis dasar yang memadai.

a) Pendidikan dan Latihan (Diklat) Khusus: Mengadakan Diklat Ketahanan Pangan berkala untuk Babinsa, meliputi identifikasi

penyakit tanaman, teknik irigasi efisien, dan mekanisme penyaluran bantuan sosial/pertanian. Kodam IV/Diponegoro berkolaborasi dengan Balai Pelatihan Pertanian (BPP) setempat.

b) Pelatihan terintegrasi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan dengan system organik dan mandiri bekerjasama dengan Diklat PTS (Petani Teman Sejati) di Telomoyo, Magelang.

c. Pilar III: Pengendalian Stabilitas Pangan dan Mitigasi Risiko. Dalam situasi krisis atau ketidakstabilan, peran Satkowil berubah menjadi penjaga stabilitas dan keamanan pasokan.

1) Pendataan, Pemetaan potensi dan risiko.

a) Pendataan. Memanfaatkan jaringan teritorial untuk menyediakan data berbasis lokasi yang akurat.

b) Pemetaan Potensi dan Risiko: Babinsa wajib memiliki data akurat tentang luas tanam, perkiraan panen, dan area rawan bencana (banjir, kekeringan, hama) di wilayahnya. Data ini harus terintegrasi dengan data dinas pertanian untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat misalnya, penentuan lokasi bantuan benih darurat, pengendalian





hama secara terintegrasi.

2) Operasi Pasar dan Penanganan Bencana. Mengaktifkan fungsi Teritorial untuk mendukung operasi stabilitas harga.

a) Pengamanan Distribusi: Mengawal distribusi pangan strategis (beras, gula dan minyak) terutama menjelang hari besar atau saat terjadi kenaikan harga anomali.

b) Mitigasi Darurat: Dalam kasus bencana alam (banjir di Pantura atau erupsi Gunung Merapi), tanah longsor di bagian selatan, Banjarnegara dan banyumas. Satkowil harus menjadi lini pertama dalam pengamanan stok pangan, evakuasi dan pembukaan akses distribusi logistik pangan.

Sebagai indikator kontribusi konkret Satkowil dalam stabilitas pangan, jajaran Kodam IV/Diponegoro telah melaksanakan percepatan penyerapan gabah/beras di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Realisasi

penyerapan gabah kering panen (GKP setara beras) dan beras di wilayah Kodam IV/Diponegoro mencapai 264.736,52 ton atau 85,47%. Sementara itu, jajaran Kanwil DIY mencatat realisasi 155.231,10 ton atau 97,71%. Data ini mencerminkan efektivitas pengawalan distribusi, pendampingan panen, serta stabilisasi pasokan pangan yang dilakukan Satkowil.

Pada aspek produksi, capaian Luas Tambah Tanam (LTT) juga menunjukkan peran penting Satkowil dalam peningkatan kapasitas pertanian. Dari target Januari–Desember sebesar 52.510.357, realisasi LTT hingga 17 November 2025 mencapai 10.592,4, dengan total akumulasi 1.601.490,8 atau 63,80%. Angka ini menegaskan keberhasilan pendampingan Satkowil terhadap program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian di wilayah Jawa Tengah dan DIY.

3) Tantangan dan Rekomendasi Solusi. Meskipun peran Satkowil sangat strategis, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai optimalisasi penuh.

a) Tantangan.

(1) Konflik Tugas Pokok: Babinsa memiliki tugas pokok kemiliteran lain (pembinaan territorial dan cegah dini). Keterlibatan berlebihan dalam pertanian dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok.

(2) Keterbatasan Sumber Daya: Anggaran operasional yang terbatas untuk kegiatan pertanian di tingkat Koramil/Babinsa, serta ketersediaan Alsintan yang tersedia.

(3) Keahlian Teknis: Tidak semua anggota Satkowil memiliki latar belakang atau pelatihan yang memadai di bidang pertanian modern, sehingga efektivitas pendampingan menjadi bervariasi.

b) Rekomendasi Solusi.

(1) Sistem Prioritas Dinamis: Menetapkan ketahanan pangan sebagai prioritas saat musim tanam-panen melalui perintah operasi yang jelas.

(2) Mekanisme Anggaran Bersama: Mendorong perjanjian kerja sama (MoU) yang lebih kuat dengan Pemda dan Kementerian Pertanian untuk alokasi dana pendampingan yang spesifik bagi Babinsa/Koramil. Misalnya, alokasi dana untuk transportasi Babinsa ke lokasi sawah terpencil.

(3) Sertifikasi Babinsa Petani:

Mewajibkan semua Babinsa yang ditugaskan di desa agraris untuk mengikuti program sertifikasi kompetensi dasar pertanian (misalnya, pemahaman irigasi, hama, dan teknologi pascapanen) bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian.

(4) Mendorong setiap Kodim dan Koramil memiliki kebun percontohan dan budidaya ternak sehingga bisa di duplikasi oleh setiap Babinsa dan di masyarakat binaan dengan system organik dan mandiri pakan serta obat-obatan.

(5) Regenerasi Petani.

Mendorong Satkowil jajaran Kodam IV/Diponegoro melibatkan program "Petani Milenial", menawarkan pelatihan kewirausahaan pertanian bagi generasi muda di desa.

PENUTUP

Optimalisasi peran Satuan Komando Kewilayahan di lingkungan Kodam IV/ Diponegoro adalah elemen krusial dalam pertahanan nirmiliter untuk menjamin ketahanan pangan nasional. Struktur komando yang hierarkis, disiplin, dan Teritorial TNI AD merupakan keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh lembaga sipil lain dalam menggerakkan program dari pusat hingga ke desa.

Strategi optimalisasi yang berfokus pada pendampingan produksi, sinergi kelembagaan dan pengendalian stabilitas, didukung oleh solusi atas tantangan logistik dan teknis, akan menjadikan Satkowil jajaran Kodam IV/Diponegoro sebagai katalisator utama keberhasilan swasembada pangan di Jawa Tengah dan DIY. Dengan sinergi yang



NEGARA HADIR UNTUK RAKYAT



kuat antara TNI, pemerintah daerah, petani, akademisi dan swasta, cita-cita kedaulatan pangan dapat diwujudkan, sekaligus memperkokoh kemandirian TNI dengan rakyat, sesuai dengan filosofi pertahanan semesta. Satkowil adalah garda terdepan dalam pertahanan keamanan.



REFERENSI:

1. Fajar Nugraha, Data World Atlas 2025 menunjukkan populasi global mencapai 8,1 miliar jiwa dengan Asia sebagai benua terpadat, 25 November 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NxGCPZoE-10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbesar-pada-2025-tiongkok-di-puncak>, (diakses pada tanggal 10 Desember 2025)
2. BP3 Pertanian, Konsep Kedaulatan Pangan, 2024
3. Kementan RI, Indonesia menuju lumbung pangan dunia 2045, Juli 2025, <https://www.youtube.com/shorts/bwRJv4f3NjY>, (diakses pada 11 Desember 2025)



TRANSFORMASI EKONOMI TERITORIAL: STRATEGI AKSELERASI KOPERASI DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH DI WILAYAH KODAM XIV/HASANUDDIN

Oleh: Mayjen TNI Bangun Nawoko
(PANGDAM XIV/Hasanuddin)

Pendahuluan: Visi Nasional dan Paradigma Baru Pertahanan Ekonomi

Kehadiran kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menggariskan visi besar melalui “Asta Cita” yang menempatkan kemandirian bangsa sebagai prioritas utama, terutama dalam sektor ketahanan pangan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam konteks ini, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan sekadar program ekonomi sektoral, melainkan sebuah instrumen strategis untuk memperkuat struktur pertahanan non-militer dari tingkat paling dasar, yaitu desa dan kelurahan. Kodam XIV/Hasanuddin, sebagai bagian integral dari TNI Angkatan Darat, memandang program ini sebagai manifestasi dari Doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang modern. TNI tidak lagi hanya bertindak sebagai penjaga kedaulatan fisik, tetapi telah bertransformasi menjadi

katalisator kesejahteraan yang mampu menggerakkan potensi ekonomi rakyat secara sistematis. Percepatan pembangunan KDKMP di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di pelosok, sekaligus memperkokoh sinergi antara TNI dan rakyat dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.



Landasan Yuridis sebagai Fondasi Konstitusional

Keberlanjutan dan akuntabilitas pembangunan KDKMP di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin dipayungi oleh kerangka regulasi yang sangat kuat dan berlapis. Landasan utama berpijak pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Koperasi sebagai instrumen modernisasi badan usaha kerakyatan. Momentum operasionalisasi program ini dipicu oleh terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang secara spesifik menginstruksikan percepatan pembentukan KDKMP di seluruh Indonesia. Arahan ini kemudian diterjemahkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Koperasi

dan UKM Nomor 1 Tahun 2025 mengenai prosedur pembentukan, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendesa PDT) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur peran fungsional koperasi dalam struktur pemerintahan desa. Dari sisi akses finansial, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 menjadi kunci pembuka pintu permodalan melalui tata cara pinjaman yang akomodatif bagi koperasi desa. Seluruh rangkaian regulasi ini dikunci oleh visi strategis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025, yang memberikan kepastian hukum bahwa pemberdayaan ekonomi melalui koperasi adalah bagian tidak terpisahkan dari rencana pembangunan nasional jangka panjang yang harus dikawal secara terintegrasi oleh seluruh elemen kekuatan bangsa.

Latar Belakang dan Filosofi Penguatan Potensi Lokal

KDKMP didesain dengan filosofi dasar sebagai motor penggerak ekonomi yang berakar pada karakteristik unik setiap wilayah kelurahan dan desa. Dalam pandangan strategis Kodam XIV/Hasanuddin, ketahanan pangan nasional hanya dapat dicapai apabila unit-unit produksi di tingkat desa memiliki kemandirian dalam pengelolaan dan distribusi. KDKMP hadir untuk memutus rantai ketergantungan masyarakat terhadap praktik ekonomi yang tidak adil, sekaligus berfungsi sebagai pusat pengumpulan hasil bumi yang efisien.

Kehadiran TNI dalam mengawal program ini didasari oleh latar belakang untuk memastikan bahwa setiap intervensi negara berjalan cepat, tepat sasaran, dan bebas dari distorsi birokrasi. Melalui KDKMP, potensi lokal pada pertanian di Sulawesi Selatan hingga di Sulawesi Tenggara dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sinergi ini menciptakan pola “ekonomi gotong royong” yang modern, di mana kekuatan komando teritorial digunakan untuk mengorganisir massa dalam aktivitas produktif yang mendukung swasembada pangan sebagai pilar utama kedaulatan negara.

Standarisasi Teknis dan Persyaratan Lahan yang Strategis

Keberhasilan fisik pembangunan KDKMP sangat bergantung pada kepatuhan terhadap standar teknis yang telah ditetapkan untuk menjamin efektivitas operasional jangka panjang. Setiap unit KDKMP diwajibkan berdiri di atas lahan berukuran standar dua puluh meter kali tiga puluh meter, dengan luas maksimal seribu meter persegi, guna memastikan ruang yang cukup untuk fungsi pergudangan, kantor, dan area transaksi. Lokasi harus dipilih secara strategis di pusat aktivitas warga dengan jangkauan penduduk minimal kurang lebih lima ratus jiwa untuk menjamin keberlanjutan pasar internal koperasi.

Sesuai dengan arahan kebijakan anggaran, penggunaan lahan diprioritaskan pada tanah milik negara, mulai dari tanah kas desa, aset pemerintah kabupaten/kota, provinsi, kementerian/lembaga, hingga aset BUMN/D yang dikelola melalui mekanisme koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kebijakan ini menekankan bahwa lahan harus dalam kondisi siap atau rata, mengingat fokus anggaran sepenuhnya dialokasikan untuk konstruksi bangunan, sehingga pemanfaatan tanah negara menjadi solusi cerdas dalam menekan biaya operasional awal dan mempercepat proses legalitas pemanfaatan lahan untuk kepentingan umum.

Analisis Dinamika Kendala dalam Implementasi Lapangan

Dalam pelaksanaannya, percepatan pembangunan KDKMP di wilayah Kodam XIV/ Hasanuddin menghadapi berbagai dinamika tantangan yang menguji fleksibilitas dan ketangguhan aparat teritorial. Masalah lahan menjadi hambatan yang paling dominan, di mana proses mencari lokasi yang ideal seringkali terbentur pada kerumitan administratif pengurusan legalitas aset negara yang belum terdigitalisasi sepenuhnya. Di beberapa titik, ditemukan lahan potensial namun ukurannya kurang dari standar minimal dua puluh meter kali tiga puluh meter, atau lahan yang secara hukum milik negara namun masih terdapat klaim sepihak dari anggota masyarakat setempat.

Selain itu, faktor geografis wilayah Sulawesi yang luas dengan aksesibilitas yang bervariasi menimbulkan kendala berupa kelangkaan bahan material bangunan di daerah-daerah terpencil. Kondisi ini seringkali diperparah oleh ketiadaan anggaran untuk pekerjaan persiapan lahan seperti *“cut and fill”*, sehingga menuntut kreativitas satuan di lapangan untuk mencari lokasi yang benar-benar siap bangun tanpa memerlukan rekayasa tanah yang mahal dan memakan waktu.



PELETAKAN BATU PERTAMA PANGDAM XIV/HASANUDDIN DI PALOPO

Langkah Strategis: Manajemen Operasional dan Kepemimpinan Teritorial

Menghadapi kompleksitas kendala di atas, Kodam XIV/Hasanuddin menerapkan manajemen langkah strategis yang sangat komprehensif untuk memastikan target pembangunan tidak bergeser dari garis waktu yang telah ditentukan. Langkah pertama yang diambil adalah penyusunan Buku Petunjuk Teknis (Bujuknis) secara internal namun tetap selaras dengan regulasi nasional. Bujuknis ini berfungsi sebagai kompas operasional bagi para Komandan Satuan Wilayah (Dansatwil) dan para Babinsa di lapangan, sehingga terdapat standar prosedur yang seragam dalam menghadapi masalah teknis maupun sosial. Koordinasi lintas sektoral menjadi jantung dari gerakan ini, di mana Kodam XIV/Hasanuddin memposisikan diri sebagai jembatan diplomasi antara Kepala Desa, Lurah,

Camat, hingga Bupati dan Walikota. Rapat koordinasi tingkat daerah dilakukan secara intensif bukan hanya untuk formalitas, melainkan untuk melakukan sinkronisasi data aset lahan milik Pemerintah Daerah (Pemda/Kota/Kab) yang dapat digunakan untuk KDKMP, sehingga hambatan legalitas dapat diselesaikan di meja pimpinan melalui kesepakatan pemanfaatan aset bersama demi kesejahteraan rakyat.

Dalam mengatasi kendala logistik dan kelangkaan material, Kodam XIV/Hasanuddin menerapkan strategi *“Logistic Warfare”* dalam konteks pembangunan sipil. Menyadari bahwa ketersediaan semen, besi, dan material fabrikasi lainnya seringkali terlambat mencapai wilayah kepulauan atau pegunungan di Sulawesi, komando melakukan pemesanan alat angkut dan kapal laut secara kolektif. Bahan material didatangkan secara masif dari

pusat-pusat industri di luar wilayah untuk kemudian didistribusikan menggunakan armada kapal angkut menuju pelabuhan-pelabuhan kecil di pelosok. Langkah ini merupakan bentuk nyata dari kemampuan organisasi militer dalam memobilisasi sumber daya secara cepat dan efisien. Di lapangan, para Babinsa berperan sebagai agen intelijen ekonomi yang melakukan pemetaan terhadap ketersediaan tukang lokal dan material pendukung di sekitar

langsung ke lapangan dilakukan secara berkala oleh Pangdam, Danrem, hingga Dandim untuk memberikan motivasi sekaligus melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap progres harian. Setiap hambatan yang ditemukan di satu titik dijadikan pelajaran untuk titik lainnya, sehingga terjadi proses pembelajaran organisasi yang cepat. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dan setiap jam kerja yang dihabiskan benar-



PANGDAM AWASI LANGSUNG PROGRES PEMBANGUNAN KDKMP DI KABUPATEN MAROS

lokasi, sehingga terjadi perputaran uang di tingkat lokal yang juga membantu ekonomi warga selama masa konstruksi.

Upaya ini diperkuat dengan penerapan metode kolaborasi lintas sektor yang mengedepankan prinsip **“Fokus pada Solusi”**. Ketika ditemukan lahan yang diklaim masyarakat, pendekatan komunikasi sosial (Komsos) dikedepankan untuk memberikan pemahaman bahwa kehadiran KDKMP adalah untuk kepentingan bersama penduduk desa tersebut, bukan untuk kepentingan instansi tertentu. Peninjauan

benar berkontribusi pada percepatan fisik bangunan tanpa mengabaikan kualitas estetika dan fungsionalitas koperasi sebagai pusat ekonomi masa depan.

Hasil dan Implikasi Strategis: Kondisi 100% dan Transformasi Ekonomi

Sebagai hasil dari kerja keras yang terorganisir dan penuh dedikasi tersebut, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah tanggung

jawab Kodam XIV/Hasanuddin saat ini telah berhasil mencapai kondisi 100%. Keberhasilan pembangunan lima puluh lima unit koperasi ini merupakan sebuah tonggak sejarah baru dalam pembinaan teritorial di Sulawesi. Angka 55 bukan sekadar statistik konstruksi, melainkan representasi dari 55 simpul ekonomi baru yang kini telah siap beroperasi melayani ribuan warga desa. Pencapaian

target seratus persen ini membuktikan bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dapat dieksekusi dengan sempurna apabila dilakukan dengan manajemen yang disiplin, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen daerah.

DATA PER 18 FEBRUARI 2026

NO	SATKOWIL	WILAYAH ADMINISTRASI (PROVINSI)	JUMLAH KDKMP	STATUS CAPAIAN
1	Korem 141/Toddopuli	Sulawesi Selatan	41 Unit	100%
2	Korem 143/Halu Oleo	Sulawesi Tenggara	14 Unit	100%
	TOTAL		55 Unit	100%

Analisis Sebaran Pembangunan KDKMP Kodam XIV/Hasanuddin



MAYJEN TNI BANGUN NAWOKO SIDAK PEMBANGUNAN KDKMP DI KABUPATEN GOWA



Implikasi dari keberhasilan ini sangat luas dan multidimensional. Secara ekonomi, 55 koperasi ini kini bertindak sebagai “Aggregator” atau pengumpul hasil produksi masyarakat desa yang selama ini sering dipermainkan oleh spekulasi. Dengan dukungan PMK Nomor 49 Tahun 2025, koperasi-koperasi ini memiliki kekuatan finansial untuk memberikan talangan modal bagi petani dan nelayan, sehingga mereka dapat memproduksi dengan tenang. Secara sosial, keberadaan KDKMP di lokasi strategis dengan jangkauan minimal 500 jiwa menciptakan titik pertemuan sosial yang baru, memperkuat kohesi masyarakat, dan meningkatkan literasi keuangan warga pedesaan. Di sisi lain, keberhasilan ini secara otomatis memperkuat ketahanan pangan wilayah karena KDKMP kini berfungsi sebagai lumbung pangan modern yang terintegrasi dengan jaringan logistik nasional.

Lebih jauh lagi, keberhasilan Kodam XIV/Hasanuddin mencapai target seratus persen ini memberikan pesan kuat mengenai efektivitas “Kemanunggalan TNI-Rakyat”. Masyarakat melihat secara langsung bahwa TNI hadir sebagai solusi nyata dalam mengatasi kemiskinan dan ketertinggalan ekonomi. 55 koperasi ini menjadi bukti fisik dari pengabdian TNI AD dalam mendukung kedaulatan ekonomi nasional. Hasil ini juga menjadi model atau percontohan (*role model*) bagi wilayah lain di Indonesia, menunjukkan bahwa sinergi antara regulasi pemerintah pusat, kebijakan kementerian, dukungan pemerintah daerah, dan eksekusi lapangan oleh TNI adalah kombinasi yang tak terkalahkan dalam mengakselerasi pembangunan nasional. Dengan beroperasinya 55 unit KDKMP ini, kemandirian desa di Sulawesi tidak lagi sekadar cita-cita, melainkan realitas



akan terus bertumbuh dan memberikan dampak kesejahteraan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Penutup dan Apresiasi: Menatap Masa Depan Kemandirian Bangsa

Sebagai penutup dari uraian pencapaian strategis ini, saya, Mayjen TNI Bangun Nawoko, selaku Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah buah dari gotong royong nasional

yang luar biasa. Tercapainya kondisi 100% pada pembangunan 55 koperasi Merah Putih merupakan kado terbaik bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dalam upaya bersama menuju Indonesia Emas. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada seluruh Gubernur, Bupati, Walikota, serta jajaran Pemerintah Daerah yang telah memberikan dukungan lahan dan kemudahan administrasi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para tokoh masyarakat, rekan-rekan kementerian terkait, dan tentunya kepada seluruh prajurit Kodam



**KOPERASI
MERAH PUTIH
KELURAHAN MANGASA MAKASSAR**

XIV/Hasanuddin, terutama para Babinsa, yang telah bekerja tanpa lelah siang dan malam di lapangan.

Keberhasilan saat ini hanyalah langkah awal dari perjalanan panjang untuk memakmurkan rakyat. Tugas kita selanjutnya adalah mengawal operasionalisasi 55 koperasi ini agar tetap sehat secara manajerial, transparan secara keuangan, dan benar-benar menjadi milik rakyat sepenuhnya. Dengan semangat “Ayam Jantan dari Timur”, kita akan terus bergerak maju, memastikan bahwa setiap kebijakan Presiden untuk

kesejahteraan rakyat dapat kita kawal hingga tuntas di garis depan. Semoga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini menjadi pilar yang kokoh bagi tegaknya kedaulatan ekonomi bangsa, selaras dengan semangat perjuangan TNI yang selalu hadir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

IMPLIKASI PERANG RUSIA-UKRAINA TERHADAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI RANPUR KAVALERI DALAM RANGKA MENDUKUNG TUGAS POKOK TNI AD



Oleh: Kolonel Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.I.P., M.I.K
(Dirbinlitbang Pussenkav)





Perang Rusia–Ukraina sejak Februari 2022 menunjukkan transformasi nyata karakter peperangan modern. Meskipun Rusia memiliki keunggulan jumlah personel dan Alutsista, realitas di medan tempur membuktikan bahwa superioritas kuantitatif tidak menjamin kemenangan strategis. Ukraina mampu memanfaatkan taktik asimetris, rudal anti-tank presisi seperti Javelin dan NLAW serta integrasi drone dan artileri presisi untuk menghancurkan ribuan kendaraan lapis baja Rusia. Hal ini menegaskan bahwa perang modern lebih ditentukan oleh teknologi, kecepatan adaptasi dan efektivitas sistem jaringan tempur dibanding kekuatan platform konvensional semata.

Kerugian besar Rusia menunjukkan kelemahan pada perlindungan aktif, integrasi sistem tempur dan penerapan *combined*

arms warfare. Banyak tank tidak dilengkapi *Active Protection System (APS)* modern sehingga rentan terhadap serangan *top-attack* dan *loitering munition*. Konflik ini juga mencerminkan karakter *hybrid warfare* yang menggabungkan operasi konvensional, asimetris, siber dan informasi.

Bagi TNI AD, khususnya Satuan Kavaleri, pelajaran utama adalah bahwa modernisasi Ranpur harus melampaui peningkatan daya tembak dan *armour*. Pengembangan harus diarahkan pada integrasi sistem perlindungan aktif, sensor canggih, komunikasi digital serta interoperabilitas lintas kecabangan dalam kerangka *system of systems*. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan industri pertahanan nasional menjadi prasyarat agar Ranpur Kavaleri adaptif terhadap perang berbasis teknologi tinggi dan mampu mendukung tugas pokok secara efektif serta berdaya tangkal tinggi.

Kondisi Teknologi dan Dinamika Pertempuran pada Perang Rusia – Ukraina

Perang Rusia–Ukraina menjadi tonggak transformasi peperangan modern yang memvalidasi dua kerangka utama: *Revolution in Military Affairs* (RMA) dan *Network-Centric Warfare* (NCW). Konflik ini menunjukkan bahwa perubahan tidak lagi sekadar pada penggantian platform senjata tetapi pada rekonfigurasi ekosistem tempur yang mengintegrasikan teknologi, konsep operasi dan adaptasi organisasi. Drone/UAV tampil sebagai pengubah permainan, konektivitas sebagai pengganda efek dan transparansi medan sebagai kondisi dasar yang memaksa semua aktor beradaptasi.

Dari perspektif RMA, UAV baik yang komersial maupun militer tidak lagi berfungsi sebagai alat bantu taktis, melainkan sebagai subsistem inti dalam siklus *sensor-to-shooter*. Integrasi intelijen, pengindraan, penargetan dan serangan berlangsung dalam jaringan digital *real-time* yang mempercepat transformasi informasi menjadi efek tempur. Keunggulan tidak lagi ditentukan oleh supremasi platform tetapi oleh kecepatan pengolahan dan distribusi informasi. Akibatnya, Ranpur tanpa proteksi aktif dan tanpa keterhubungan jaringan menjadi sangat rentan terhadap serangan *top-attack* ATGM dan drone FPV.

Melalui lensa NCW, perang ini menegaskan pentingnya desentralisasi keputusan, pembagian informasi cepat, kesadaran situasi bersama dan sinkronisasi

mandiri. Integrasi UAV, satelit komersial, OSINT serta sistem manajemen tembakan menurunkan drastis waktu penargetan dan memindahkan inisiatif ke unit terdepan. Sebaliknya, struktur komando yang kaku menciptakan friksi operasional dan menurunkan efektivitas tempur, meskipun kualitas Alutsista memadai.

Transparansi medan akibat superposisi sensor, citra satelit dan jejak digital publik mengubah logika pertahanan. Penyembunyian statis semakin tidak efektif. Mobilitas tinggi, dispersi formasi, deception dan tempo manuver menjadi faktor utama survivabilitas. Prinsip “*move-decide-strike faster than seen*” menggantikan paradigma



Gambar 1 Ranpur Rusia yang Hancur. Sumber: Wikimedia Commons

perlindungan berbasis ketebalan armor semata.

Dimensi *electronic warfare* (EW) juga menjadi penentu. Gangguan GPS, jamming komunikasi dan penindasan spektrum menunjukkan bahwa konektivitas tanpa ketahanan elektromagnetik menciptakan

kerentanan sistemik. Oleh karena itu, arsitektur komunikasi harus tahan gangguan, sementara Ranpur memerlukan *Active Protection System* (APS) soft-kill dan *hard-kill*, sistem *contra-drone* serta SHORAD mobile sebagai proteksi berlapis.

Pada aspek taktik, terjadi kebangkitan manuver tempo tinggi berbasis formasi tersebar dan *combined arms* yang terintegrasi. Kegagalan mengintegrasikan infanteri, artileri, udara dan unsur elektronik terbukti menurunkan efektivitas platform, sebagaimana terlihat pada konvoi lapis baja Rusia yang minim perlindungan terpadu.

Bagi TNI AD, khususnya Kavaleri, pembelajaran utama adalah bahwa modernisasi tidak boleh berhenti pada penggantian platform. Prioritas harus diarahkan pada pembangunan jaringan C4ISR dan BMS yang resilien terhadap EW, standardisasi APS dan *contra-drone*, interoperabilitas nyata lintas kecabangan serta doktrin adaptif sesuai karakter kepulauan tropis Indonesia. Transformasi menuju *network-centric cavalry* merupakan

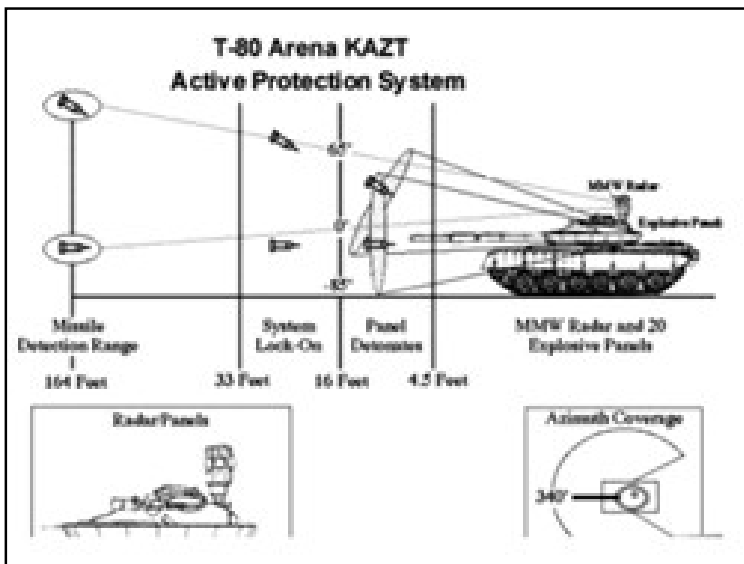
keharusan strategis untuk menjaga daya gentar dan efektivitas tempur dalam perang multi-domain.

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Operasi yang Terjadi pada Perang Rusia – Ukraina

Kegagalan operasi Rusia dalam Perang Rusia-Ukraina merupakan hasil kombinasi faktor strategis, operasional, logistik, teknologi dan organisasi. Analisis melalui perspektif Liddell Hart, Supriyatno, Ogorkiewicz, serta



Gambar 2 Active Protection System (APS). Sumber: Wikimedia Commons



Argyris & Schön menunjukkan bahwa kegagalan tersebut bersifat sistemik dan saling berkaitan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan operasi diantaranya yaitu:

1. Strategi Frontal dan Mengabaikan Pendekatan Tidak Langsung.

Rusia melakukan serangan langsung ke Kyiv pada fase awal invasi tanpa melemahkan pusat gravitasi psikologis dan politik Ukraina. Pendekatan frontal ini justru memperkuat resistensi lawan dan menimbulkan kerugian besar tanpa hasil strategis signifikan.



Banyak tank tidak dilengkapi *Active Protection System (APS)*, sehingga rentan terhadap Javelin, NLAW dan drone FPV. Keseimbangan antara daya tembak, mobilitas, dan perlindungan tidak terpenuhi.

6. Kegagalan Pembelajaran Organisasi

Rusia cenderung melakukan penyesuaian taktis (*single-loop learning*) tanpa mengubah asumsi strategis dasar. Sebaliknya, Ukraina mampu melakukan adaptasi struktural dan inovasi taktik secara cepat (*double-loop learning*).

2. Lemahnya Integrasi Combined Arms

Operasi lapis baja sering dilakukan tanpa dukungan infanteri, artileri dan pertahanan udara yang memadai. Kurangnya sinkronisasi antar kecabangan menyebabkan kolom tank menjadi sasaran empuk rudal anti-tank dan drone.

3. Kelemahan Sistem Komando dan Kepemimpinan

Struktur komando yang hierarkis dan kaku menghambat fleksibilitas di lapangan. Keterlambatan pengambilan keputusan menurunkan tempo operasi dan efektivitas manuver.

4. Kegagalan Logistik dan Perencanaan Waktu

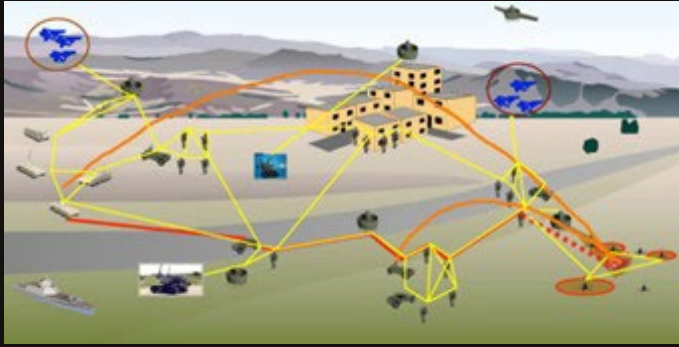
Invasi dirancang dengan asumsi perang singkat tanpa rencana kontinjensi jangka panjang. Ketika operasi berlarut, rantai pasokan terganggu, menyebabkan kekurangan bahan bakar dan amunisi.

5. Minimnya Perlindungan Aktif dan Adaptasi Teknologi



Gambar 3 Penggunaan Drone dalam Perang Ukraina
Sumber: Wikimedia Commons

Rantai kegagalan tersebut menunjukkan bahwa keunggulan kuantitatif dan teknologi tidak otomatis menghasilkan keunggulan manuver. Kelemahan strategi, integrasi organisasi, logistik serta budaya pembelajaran saling memperkuat dan menurunkan efektivitas tempur secara keseluruhan. Pelajaran bagi TNI AD, khususnya Kavaleri adalah bahwa modernisasi Ranpur harus diikuti dengan modernisasi doktrin, kepemimpinan, interoperabilitas lintas



Gambar 4 Network-Centric Warfare & Battle Management System (BMS)

kecabangan serta budaya organisasi yang adaptif. Keunggulan masa depan ditentukan oleh integrasi sistem, kecepatan informasi dan kemampuan belajar dalam menghadapi dinamika medan tempur yang kompleks.

Implikasi Pengembangan Teknologi Ranpur Kavaleri TNI AD Dihadapkan pada Perang Rusia – Ukraina

Perang Rusia–Ukraina menegaskan pergeseran dari kekuatan berbasis platform menuju kekuatan berbasis jaringan. Ranpur tidak lagi berdiri sebagai sistem tunggal, melainkan sebagai *node* dalam ekosistem C4ISR dan *Battle Management System (BMS)*. Konsep klasik keseimbangan mobilitas, daya tembak dan perlindungan perlu diperluas dengan dimensi keempat: integrasi sistem digital real-time. Keunggulan tempur kini ditentukan oleh kecepatan informasi dan kualitas jaringan, bukan sekedar spesifikasi teknis platform.

Dominasi drone murah dan *loitering munitions* menjadikan Ranpur sasaran utama. Karena itu, arsitektur perlindungan harus berlapis: *Active Protection System (APS)* hard-kill dan soft-kill, sistem kontra-UAV serta SHORAD mobile yang terintegrasi dengan *electronic warfare*. Modernisasi harus bersifat modular agar platform dapat di-upgrade

tanpa desain ulang menyeluruh, melalui skema bertahap: akuisisi awal, *transfer of technology*, *co-development* hingga kemandirian produksi nasional.

Pada level doktrin, Kavaleri harus diredefinisi sebagai kekuatan manuver berdaya hancur tinggi berbasis *mission command*. Integrasi armor, infanteri, artileri, udara dan unsur elektronik menjadi prasyarat mutlak. Taktik harus menekankan dispersi, mobilitas tinggi, *shoot-and-scoot* dan integrasi drone sebagai *teammate* tempur. Latihan wajib realistis terhadap ancaman drone, EW dan perang asimetris.

Modernisasi juga menuntut reformasi SDM. Tanpa prajurit yang menguasai perang informasi, EW dan pengambilan keputusan desentralistik, teknologi akan menjadi *high-tech underperformer*. Kurikulum, pelatihan dan manajemen pemeliharaan harus terdigitalisasi untuk menjaga kesiapan operasional.

Seluruh desain harus disesuaikan dengan geografi Indonesia sebagai negara kepulauan tropis: mobilitas pesisir, kemampuan amfibi/riverine, ketahanan iklim serta interoperabilitas darat-laut-udara.

Dengan demikian, modernisasi Ranpur Kavaleri TNI AD bukan sekedar pembaruan alutsista, melainkan transformasi doktrin, organisasi, teknologi dan industri menuju *network-centric cavalry* yang adaptif, tangguh dan berdaya tangkal tinggi dalam perang multi-domain.

(BNPBB/BPBD, Pemenda, TNI/Polri, Dinas teknis)

- Komando & koordinasi
- Kebijakan, prioritas, perizinan
- Dukungan operasi

- Peringatan dini & edukasi
- Komunikasi risiko
- Pelaporan progres

(Logistik, konstruksi, telekom, energi, CSR)

- Rantai pasok material & logistik
- Alat, energi, telekom
- Dana CSR & kemitraan

Akademisi

(PT, peneliti, pakar teknis)

- Risk assessment
- Peta bahaya, standar teknis
- Evaluasi kerentanan

Komunitas

(Masyarakat, relawan, tokoh lokal)

- Akses & kebutuhan lokal
- Partisipasi & ketahanan sosial, pemeliharaan



Output/Hasil

- Respons lebih cepat & tepat
- Pemeliharaan lebih optimal (BSP)
- Keperencanaan lebih meningkat

Kolaborasi Pentahelix dan Peran **Zeni TNI AD** dalam Penanggulangan Bencana

Oleh: Kolonel Czi Dian Hendriana Surachman
(Dirlitbang Pusziad)





ABSTRAK

Peran Zeni TNI Angkatan Darat dalam penanggulangan bencana sebagai penyedia kapabilitas rekayasa lapangan yang menjembatani fase tanggap darurat dan pemulihan awal. Analisa ditempatkan dalam kerangka *Build Back Better* (BBB) sebagaimana ditekankan dalam *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*, serta diperkaya melalui konsep kolaborasi pentahelix untuk membaca

dinamika koordinasi lintas aktor. *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* (UNDRR) menempatkan BBB sebagai bagian dari peningkatan kesiapsiagaan untuk respons efektif, pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. *The Global Facility for Disaster Reduction and Recovery* (GFDRR) menegaskan BBB sebagai pendekatan pemulihan yang mengurangi kerentanan dan membangun ketangguhan komunitas.

Metode yang digunakan adalah studi kasus komparatif 2025–2026 dengan tiga kasus. **Kasus pertama**, klaster hidrometeorologi Sumatera yang menggabungkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai satu klaster, tetapi dianalisis secara tajam per wilayah. **Kasus kedua**, respons erupsi Semeru di Lumajang. **Kasus ketiga** respons longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Temuan menunjukkan variasi kecepatan pemulihan

lebih dipengaruhi oleh sebaran titik gangguan, urutan kerja rekayasa yang tidak dapat ditukar, kesiapan rantai pasok material, dan kualitas orkestrasi pentahelix di level daerah, dibandingkan dengan semata-mata besaran kerusakan. Artikel ditutup dengan rekomendasi solutif untuk memperkuat *readiness* BBB: pra-penempatan material, standar interoperabilitas, serta desain koordinasi dan komunikasi risiko yang menurunkan friksi pada waktu-waktu awal bencana.

Provinsi	Bailey (titik)	Armco (titik)	Perintis (titik)	Sumur bor (titik)	MCK (unit)	Sekolah sudah aktivitas (unit)	Sekolah sudah pembersihan (unit)
Aceh	37	42	15	345	72	2.863	1.251
Sumut	21	19	13	74	139	27	27
Sumbar	11	30	9	70	46	100	12
Total (3 provinsi)	69	91	37	489	257	2.990	1.290

Tabel 1. Output Pemulihan Infrastruktur dan Layanan Dasar Aceh, Sumut, dan Sumbar (Update 16 Feb 2026)

Jenis jembatan	Total (titik)	Terpasang (titik)	Dalam perjalanan (titik)	Belum terpasang (titik)	IOP terpasang (%)
Bailey	69	42	27	0	60,9
Armco	91	52	16	23	57,1
Perintis	37	25	0	12	67,6

Tabel 2 Status Pipeline Pemulihan Jembatan Daerah Bencana (Update 16 Feb 2026)

Provinsi	Sekolah terdampak (titik)	Sudah aktivitas (unit)	Sudah pembersihan (unit)
Total (3 provinsi)	4.280	2.990	1.290
Aceh		2.863	1.251
Sumut		27	27
Sumbar		100	12

Tabel 3. Status Pemulihan Sekolah Terdampak Bencana (Update 16 Feb 2026)

PENDAHULUAN

Bencana hidrometeorologi dan gerakan tanah terus memengaruhi konektivitas wilayah, akses layanan dasar, serta pemulihan ekonomi rumah tangga. Pada kondisi akses terputus, kebutuhan paling mendesak biasanya bukan hanya bantuan logistik, melainkan pemulihan fungsi infrastruktur dasar agar bantuan dapat masuk dan aktivitas sosial-ekonomi dapat kembali berjalan. Dalam konteks ini, peran TNI AD menonjol sebagai penyedia kapabilitas rekayasa lapangan: pembukaan akses, dukungan jembatan darurat, dukungan alat berat, dan pemulihan layanan dasar tertentu.

Secara kebijakan nasional, penanggulangan bencana mencakup rangkaian upaya dari pencegahan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Pada level global, *Sendai Framework* menempatkan kesiapsiagaan respons efektif dan BBB dalam pemulihan sebagai prioritas tindakan

Pertanyaan utama artikel ini adalah: mengapa wilayah yang terdampak bencana dalam rentang waktu berdekatan dapat menunjukkan kecepatan pemulihan yang berbeda, bahkan ketika sama-sama menerima dukungan rekayasa? Pertanyaan ini penting karena perbedaan laju pemulihan sering kali dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola, rantai pasok, dan koordinasi lintas aktor, bukan semata kapasitas teknis.



Gambar 1. Peta Lokasi Terdampak Bencana.

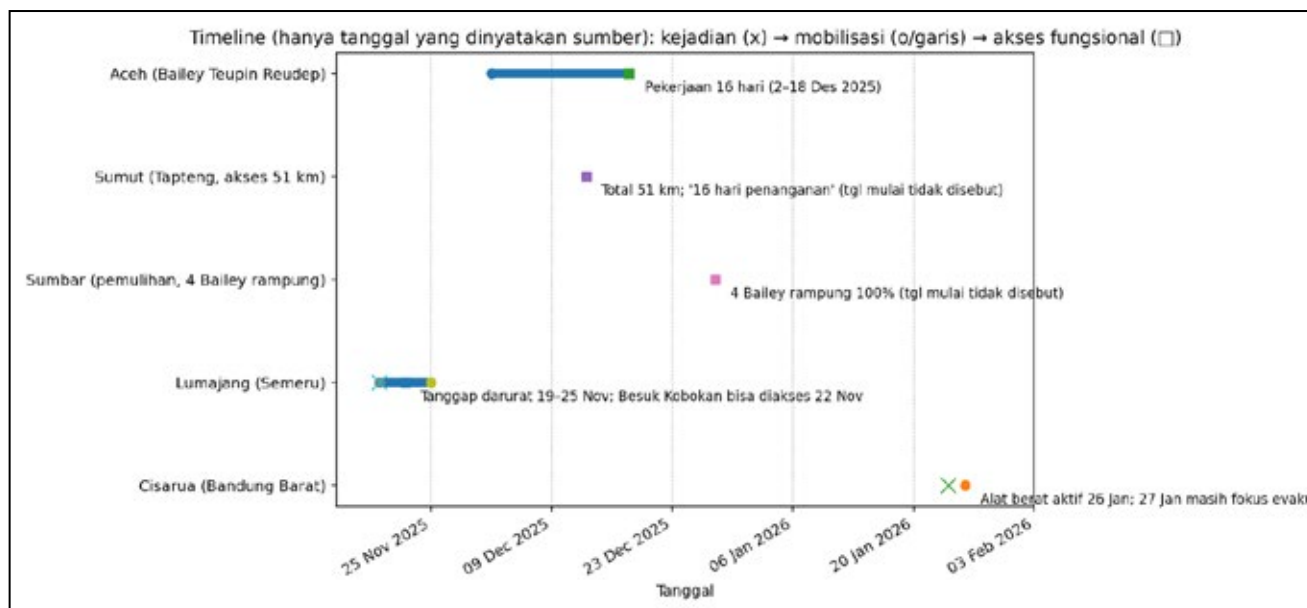


Diagram 1. Timeline kejadian

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Build Back Better (BBB) dalam Sendai Framework. UNDRR *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030)* adalah kerangka kerja global yang disepakati negara-negara anggota PBB untuk mengurangi risiko bencana, bukan hanya “menangani bencana saat terjadi”, tetapi juga mencegah dan menekan dampaknya melalui pengelolaan risiko yang lebih baik. *Sendai Framework* menegaskan empat prioritas aksi dan menempatkan BBB sebagai bagian dari peningkatan kesiapsiagaan, meliputi *respons efektif, pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi*. GFDRR mendefinisikan *Build Back Better (BBB)* sebagai pendekatan pemulihan pascabencana yang mengurangi kerentanan terhadap bencana di masa depan dan membangun ketangguhan komunitas pada aspek fisik, sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Dalam artikel ini, BBB dipakai sebagai lensa untuk menilai apakah intervensi rekayasa lapangan hanya memulihkan fungsi sementara, atau sekaligus membuka ruang pengurangan risiko berulang melalui keputusan desain, prioritasasi titik kritis, dan penguatan tata kelola pemulihan.

Pentahelix sebagai kerangka koordinasi lintas sektor. Pentahelix menekankan kolaborasi lima unsur, *pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media* untuk memperkuat kualitas koordinasi dan implementasi penanganan pascabencana. Dalam artikel ini, pentahelix digunakan untuk membaca perbedaan tempo pemulihan sebagai konsekuensi dari kualitas orkestrasi kebijakan, dukungan rantai pasok, ketersediaan informasi lokal, penguatan analisis teknis, dan transparansi komunikasi risiko.

Agar mudah dipahami, pentahelix dioperasionalkan sebagai berikut: pemerintah menetapkan keputusan dan orkestrasi, akademisi memperkuat analisis risiko dan desain solusi, dunia usaha menjamin rantai pasok dan logistik, komunitas memberi informasi lokal dan menjaga keberlanjutan, dan media menyalurkan informasi dan komunikasi risiko.



Diagram 2. Visualisasi konsep pentahelix penanggulangan bencana

Rantai nilai kontribusi Zeni dalam penanggulangan bencana. Artikel ini memetakan kontribusi Zeni ke tiga fungsi utama. *Pertama*, Pemulihan konektivitas melalui pembukaan akses dan pembangunan jembatan darurat. *Kedua*, Dukungan layanan dasar melalui dukungan rekayasa dan sarana tertentu sesuai kebutuhan operasi. *Ketiga*, Sebagai unsur utama transisi dari darurat ke pemulihan awal, terutama saat urutan kerja rekayasa menentukan kecepatan pemulihan.

METODE PENELITIAN.

Desain dan pendekatan. Penelitian menggunakan desain studi kasus komparatif dengan pendekatan kualitatif berbasis dokumen. Fokus analisis adalah menemukan mekanisme yang menjelaskan perbedaan kecepatan pemulihan.

Pemilihan kasus. Tiga kasus dipilih karena merepresentasikan variasi tipe bahaya dan kebutuhan rekayasa. *Kasus pertama*, Klaster Sumatera 2025–2026, meliputi Aceh, Sumut, Sumbar, di mana bencana berdekatan waktu dan pemulihan bervariasi. *Kasus kedua*, erupsi Semeru 2025 di Lumajang, memberikan gambaran tentang kebutuhan

akses dan layanan darurat di bawah ancaman dinamis. *Kasus ketiga*, Longsor Cisarua 2026, tentang operasi SAR intensif dengan dukungan unsur Zeni.

Sumber data. Sumber data primer adalah laporan operasi dari satuan di lapangan yang memuat detail operasi, serta data sekunder dari rilis resmi institusional dan media kredibel.

Teknik analisis. Analisis dilakukan dengan *pattern matching* terhadap kerangka BBB dan pentahelix, lalu membandingkan mekanisme lintas wilayah: sebaran titik gangguan, urutan kerja rekayasa, rantai pasok, serta orkestrasi lintas aktor.

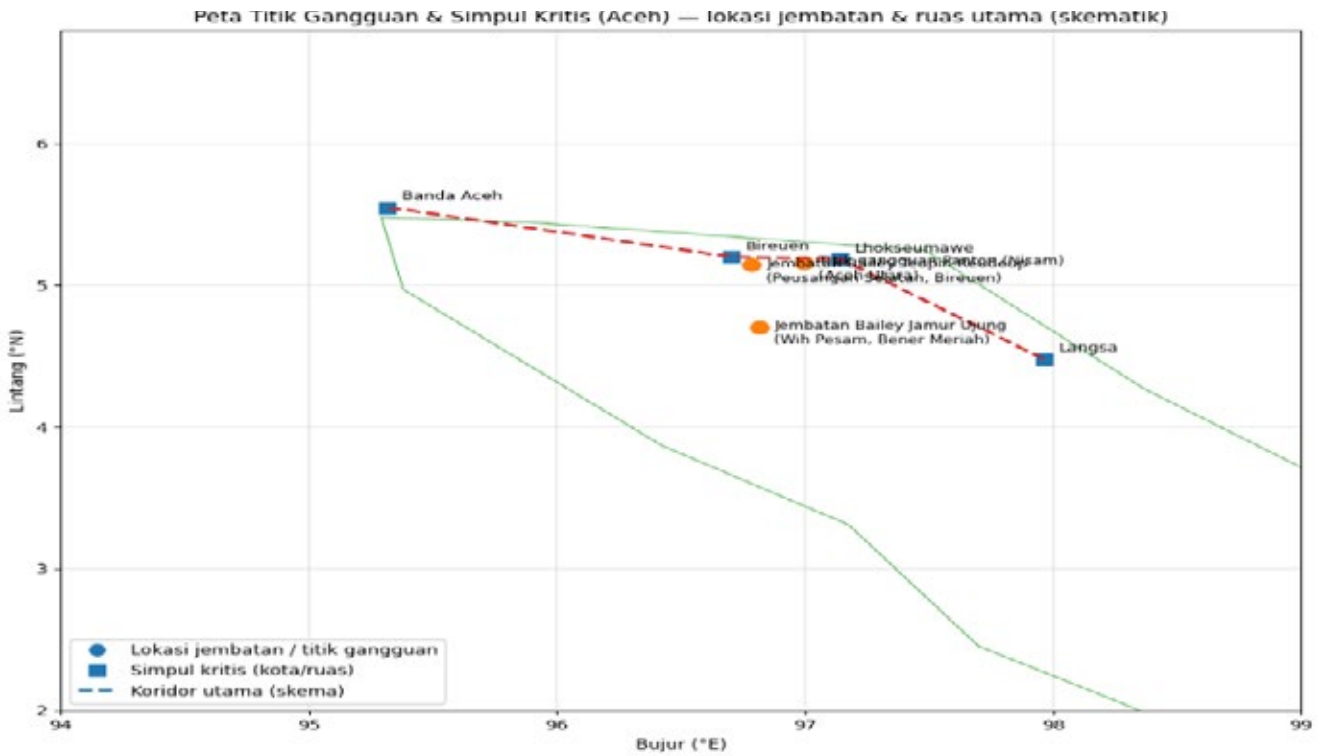
HASIL PENELITIAN: NARASI KASUS DAN OUTPUT OPERASIONAL

Kasus 1, Klaster Sumatera (Aceh, Sumut, Sumbar)

Aceh: sebaran kebutuhan dan ketergantungan rantai pasok. Pada penanganan banjir di Aceh, TNI AD mengerahkan personel dan peralatan untuk mempercepat pemulihan, termasuk dukungan sarana yang relevan dengan layanan dasar dan pemulihan akses. Pada aspek pemulihan konektivitas, sebagai sampel Jembatan Bailey Teupin Reudep dibangun melalui sinergi Kodam Iskandar Muda dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan dikerjakan oleh prajurit Yonzipur 16/Dhika Anoraga. Persepsi yang sama juga terjadi pada proses pekerjaan Jembatan Jamur Ujung. Dari sudut pandang mekanisme pemulihan,

kasus ini menunjukkan tiga poin. Pertama, persoalan yang dihadapi bersifat titik kunci, karena satu gangguan di koridor utama dapat mengunci aliran logistik dan aktivitas ekonomi, sehingga pemulihan jembatan menjadi pemicu percepatan pemulihan wilayah.

Kedua, pekerjaan ini menonjolkan interoperabilitas dan rantai pasok, karena rilis menyebut dukungan material dari Kementerian Pertahanan dan keterlibatan satuan konstruksi Zeni. Ketiga, adanya dua konfigurasi yang berbeda memberi indikasi bahwa tim menyesuaikan solusi terhadap kondisi medan dan kebutuhan bentang, sehingga pemulihan tidak sekadar memasang struktur, tetapi juga memastikan jembatan dapat segera berfungsi untuk memulihkan mobilitas.



Gambar 2. Peta Titik Kerja dan Simpul Kritis Aceh.

Secara mekanisme, pemulihan di Aceh cenderung dipengaruhi oleh sebaran titik gangguan dan kebutuhan yang berjalan paralel. Kondisi seperti ini menuntut pembagian sumber daya dan prioritas berlapis, sehingga persepsi publik dapat membaca prosesnya “lebih lambat”, meskipun pekerjaan berlangsung simultan pada beberapa lini.



Foto 1.1,dan 1.2. Kondisi awal Jembatan Jamur Ujung, Aceh, setelah bencana.



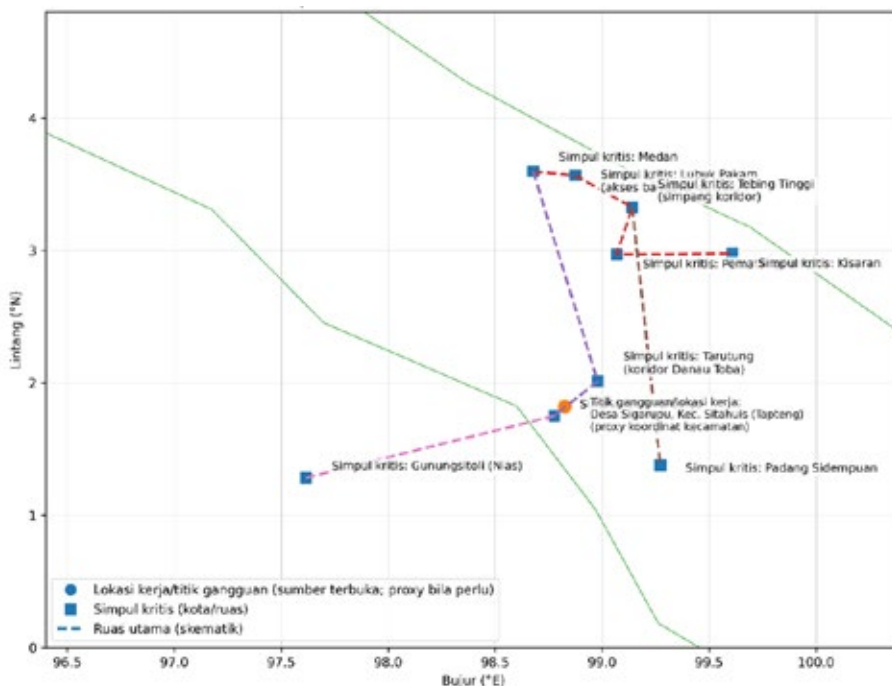
Foto 1.3,dan 1.4. Jembatan Jamur Ujung, Aceh, setelah pemasangan jembatan darurat Bailey.

Sumatera Utara: variasi kecepatan akibat aksesibilitas dan urutan kerja.

Di Tapanuli Tengah, Satgas Yonzipur I/DD melakukan operasi pembukaan akses sepanjang 51 km selama 16 hari menggunakan ekskavator dan pengerahan personel secara masif. Capaian ini menunjukkan karakter pekerjaan rekayasa yang sangat dipengaruhi oleh urutan kerja: pembersihan material dan perapihan badan jalan menjadi prasyarat

sebelum distribusi logistik dan mobilitas warga pulih.

Temuan penting pada Sumut adalah variasi pemulihan antarwilayah: wilayah dengan banyak titik longsor dan akses terbatas cenderung membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan dengan lokasi dengan kerusakan yang lebih terfokus.



Gambar 3. Peta Titik Kerja dan Simpul Kritis Sumatera Utara.



Foto 2.1, Jembatan Timang Gajah, Sumatera Utara, sebelum pemasangan jembatan Bailey.



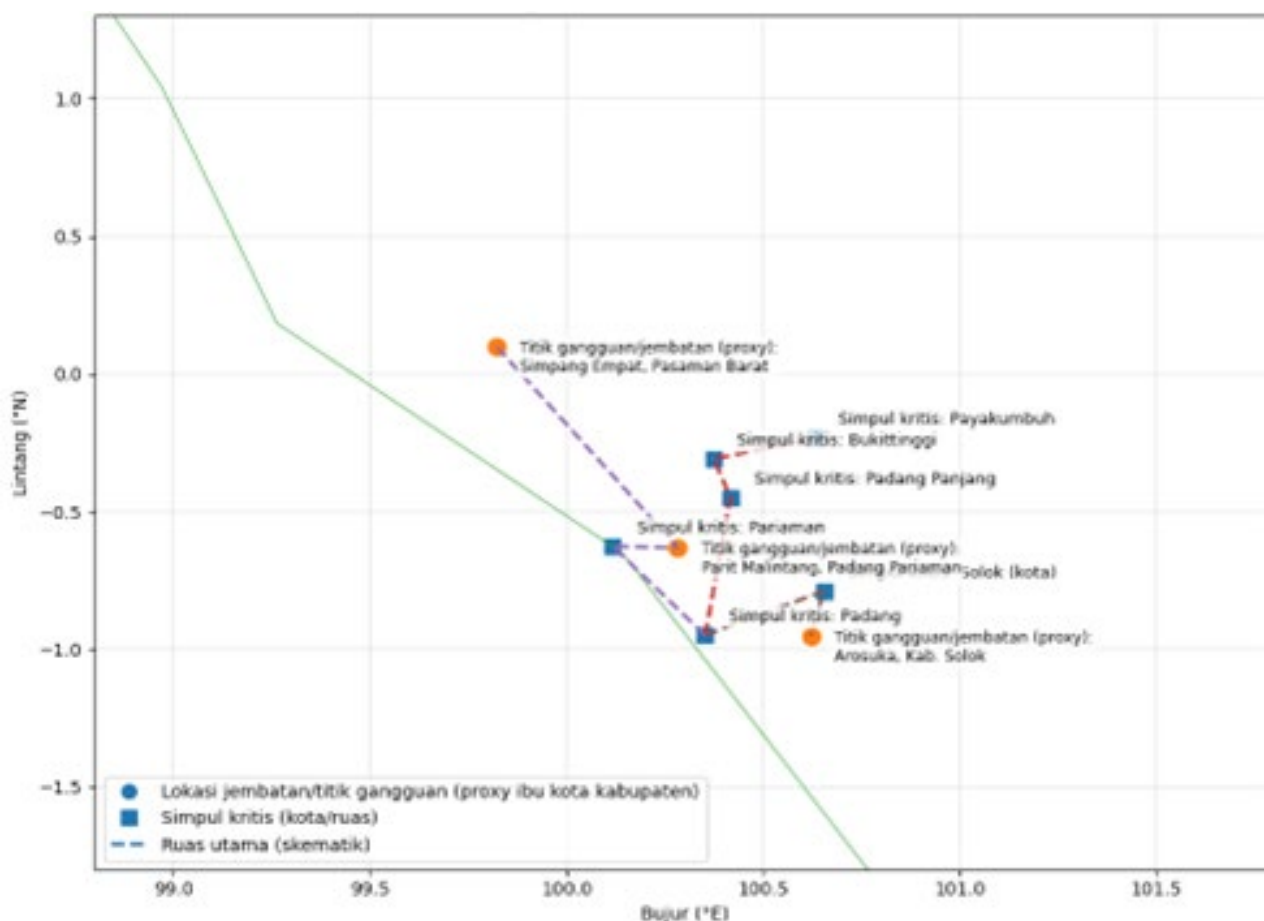
Foto 2.2,dan 2.3. Jembatan Timang Gajah, Sumatera Utara, proses pemasangan jembatan Bailey.



Foto 2.4, Jembatan Timang Gajah, Sumatera Utara, setelah pemasangan jembatan Bailey.

Sumatera Barat: percepatan melalui paket program jembatan multi-lokasi. Di Sumatera Barat, Korem 032/Wirabraja merencanakan pembangunan tujuh jembatan Bailey dan lima jembatan Armco untuk mempercepat pemulihan akses, dengan rincian lokasi lintas kabupaten serta informasi bahwa tahap pertama telah menghasilkan empat jembatan Bailey beroperasi penuh.

Pada Kabupaten Agam, pembangunan jembatan melibatkan personel Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ, Denzipur 2/Prasada Sakti, serta unsur Batalyon TP 896/Serumpun Pseko dan Batalyon TP 897/Singgalang. Pola “paket program multi-lokasi” berpotensi menurunkan friksi koordinasi karena prioritas titik dan model intervensi lebih jelas sejak awal.



Gambar 4. Peta Titik Kerja dan Simpul Kritis Sumatera Barat.



Foto 3.1,dan 3.2. Kondisi awal Jembatan Aia Taganang, Nagari Matua Hilia, Agam – Sumatera Barat, setelah bencana.



Foto 3.3. Proses pengerjaan Jembatan Aia Taganang, Nagari Matua Hilia, Agam – Sumatera Barat.



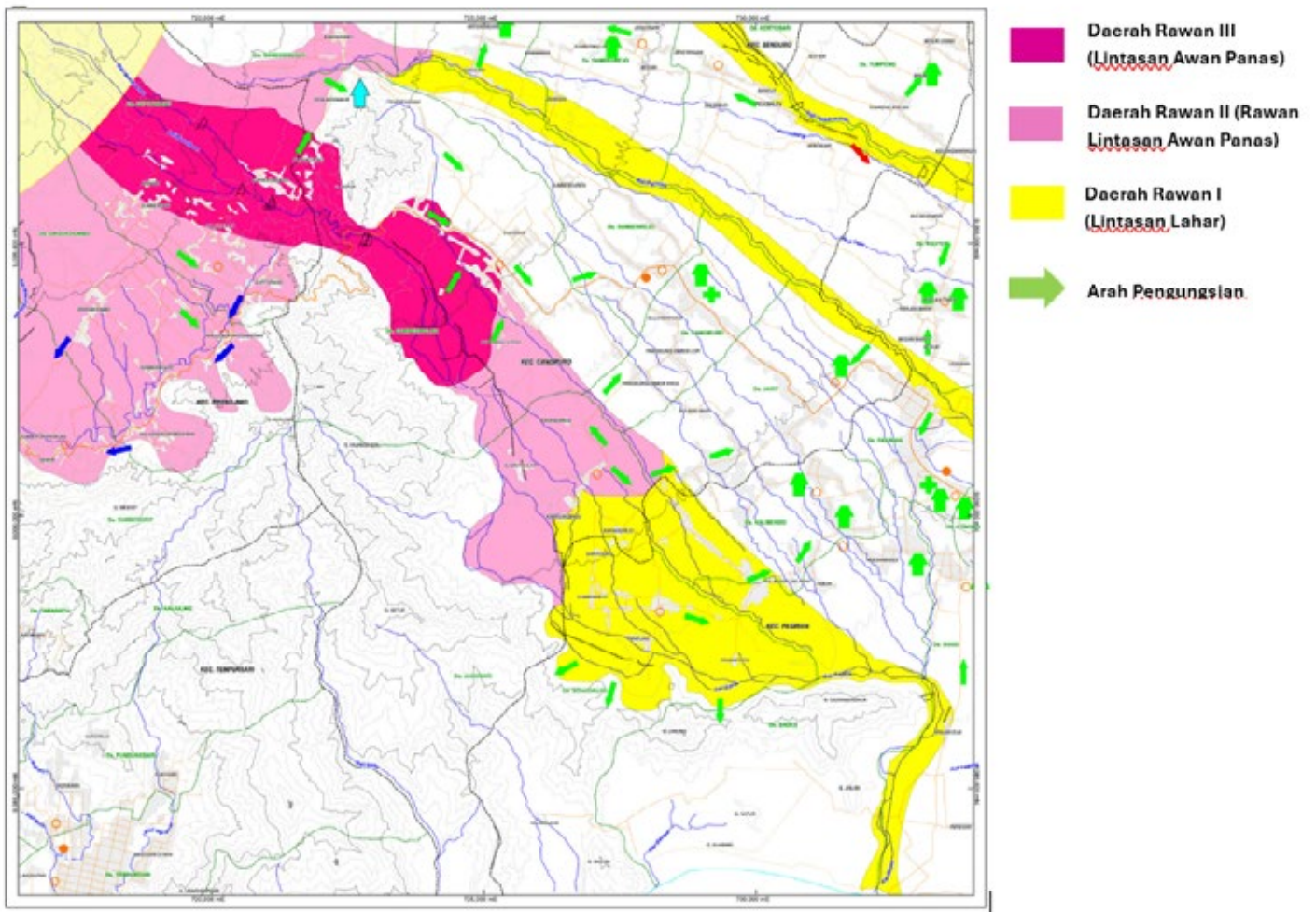
Foto 3.4. dan 3.5.. Jembatan Aia Taganang, Nagari Matua Hilia, Agam – Sumatera Barat setelah tersambung

TNI AD melaksanakan penanggulangan bencana Semeru melalui *evakuasi, distribusi logistik, pembangunan fasilitas darurat, dan pembersihan jalur* dari abu/material lahar menggunakan alat berat, termasuk perbaikan sarana vital seperti jembatan darurat dan akses jalan. Penanganan dilakukan secara terpadu bersama BNPB, Basarnas, Polri, dan pemerintah daerah.



Foto 4.1. Penanggulangan erupsi Gunung Semeru

Pada kasus ini, karakter ancaman yang dinamis membuat pekerjaan pemulihan akses dapat bersifat berulang, sehingga kesiapan alat berat, manajemen logistik, dan komunikasi risiko menjadi determinan penting.

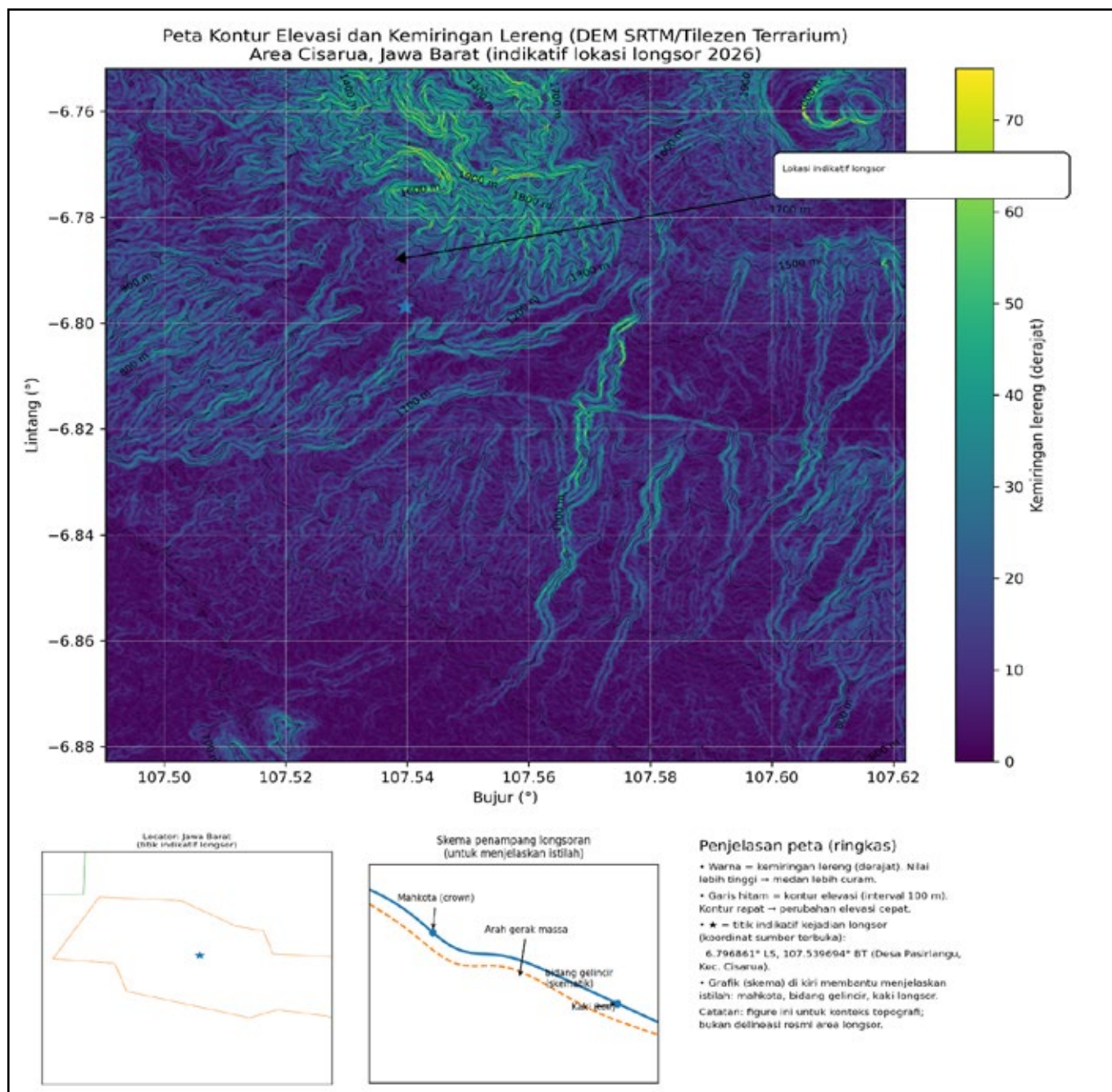


Gambar 5. Peta Zona Rawan dan Jalur Penyelamatan resmi Gunung Semeru.

Kasus 3, Longsor Cisarua di Bandung Barat pada Januari 2026.



Foto 5.1. Proses evakuasi korban longsor di Cisarua, Bandung Barat



Gambar 6. Peta Kontur dan kemiringan lereng Cisarua beserta lokasi longsor indikatif

Pada longsor Cisarua, operasi pencarian dan evakuasi melibatkan unsur TNI yang mencakup Zipur-3/YW dan Yonzipur 9/K, bersama unsur lain, serta bersinergi dengan Basarnas, BPBD, Tagana, relawan, dan dukungan alat berat. Kasus ini menekankan bahwa pada bencana tertentu, prioritas utama adalah SAR dan keselamatan operasi, sehingga “kecepatan pemulihan” perlu dimaknai sebagai pemulihan bertahap setelah fase penyelamatan.

Sumber	Unsur TNI yang disebut (spesifik)	Personel (jika disebut)	Peralatan/materiel (yang disebut)	Catatan akurasi
PPID TNI AD (Pendam III/Siliwangi)	Yonif 312/KH; Zipur-3/YW; Yonkav-4/KC; Arhanud 3/YBY; Yonzipur 9/K; Marinir; Kopasgat; Penerbad; Babinsa Kodim 0609/Cimah; dukungan Kesdam III/Slw, Hubdam III/Slw, Dapur Lapangan Bekandam III/Slw	-	19 alat berat; 32 ambulans; 2 dump truck	Angka peralatan disebut sebagai dukungan tim gabungan pada rilis tersebut. (ppid.tniad.mil.id)
PPID TNI AD (rekap operasi gabungan)	(menekankan operasi gabungan; tidak merinci semua satuan di artikel ini)	3.349 personel gabungan	5 helikopter; 19 excavator; drone thermal/UAV; Starlink; pompa air; kendaraan taktis/ambulans/rescue	Baik untuk "kapabilitas" (air mobility, UAV thermal, satcom). (ppid.tniad.mil.id)
Korpasgat TNI AU	Unsur Korpasgat di sektor A2-A3 (tidak merinci satuan AD)	125 personel Korpasgat	Helikopter (TNI AU & TNI AL), UAV thermal, excavator, kendaraan rescue, komunikasi, K-9	Spesifik pada elemen SAR (UAV thermal, K-9). (korpasgat.tni-au.mil.id)
MetroTVNews (media)	Tim SAR gabungan	-	Menyebut pengerahan 19 ekskavator	Dipakai sebagai triangulasi angka yang juga muncul di rilis TNI. (metrotvnews.com)
DetikNews (kutip BNPB)	Tim gabungan; konteks koordinasi	-	Menyebut pengerahan alat berat dan menekankan kendala tanah labil	Dipakai untuk konteks "medan menghambat operasi", bukan sumber angka utama. (news.detik.com)

Tabel 4. Komposisi unsur dan peralatan TNI.

Unsur/Instansi (disebut dalam rilis)	Personel (yang disebut)	Peralatan/Output (yang disebut)	Lokasi tugas (yang disebut)	Tanggal rilis	Sumber resmi
BBPJJN DKI Jakarta-Jawa Barat (Kementerian PU)	-	9 unit alat berat dibagi Lokasi A1: 3 unit, Lokasi A2: 6 unit; dukungan kebutuhan dasar: 3 unit hidran utama 2.000 L, 7 unit hidran portable, 2 unit tangki air 4.000 L, 1 unit tenda hunian darurat	Kecamatan Cisarua, Kab. Bandung Barat; titik kerja A1 & A2	28 Jan 2026	Rilis BBPJJN DKI Jabar (binamarga.pu.go.id)
BBWS Citarum + UPT Kementerian PU (kolaborasi lintas UPT)	- (menyebut operasi manual sebelumnya oleh BPBD & Basarnas)	9 unit alat berat: 6 excavator PC75, 1 excavator PC200, 2 excavator PC55; sarana pengungsi: 3 unit hidran umum, 7 unit portable toilet, 1 unit tenda hunian darurat	Cisarua, Kab. Bandung Barat	27 Jan 2026	Rilis BBWS Citarum (sda.pu.go.id)
PPID/Portal Sahabat PU (Kementerian PU); kolaborasi lintas balai: BBPJJN DKI Jabar, BBWS Citarum, BBWS Cimanuk Cisanggarung, serta dukungan BPBPK Jabar (air bersih & sanitasi)	-	Status operasional: 8 unit alat berat aktif (per 26/1 14.00 WIB); rincian yang disebut: BBPJJN: 6 excavator PC75; BBWS Citarum: 1 excavator PC55 mini (PC200 "terpaksa kembali" karena akses); BBWS Cimanuk Cisanggarung: 1 excavator PC55 mini; tambahan 2 unit pompa alcon; pengganti: excavator PC55 mini dari Indramayu	Kecamatan Cisarua, Kab. Bandung Barat	29 Jan 2026	Rilis PPID Sahabat PU (sahabat.pu.go.id)
Pemkab Bandung Barat (info operasi SAR); menyebut Basarnas	- (menyebut personel "tetap sama" tanpa angka)	Tambahan 2 unit excavator PC200 untuk percepatan pembukaan/pergeseran material, difokuskan area perbatasan sektor A2-A3	Desa Pasirlangu, Kec. Cisarua, KBB (sektor A2-A3)	30 Jan 2026	Rilis Pemkab Bandung Barat (bandungbaratkab.go.id)

Tabel 5. Komposisi unsur dan peralatan Pemda dan unsur lain terkait (non-TNI/Polri).



DISKUSI: MEKANISME PERBEDAAN KECEPATAN PEMULIHAN

Sebaran titik gangguan: masalah terfokus vs multipoint. Wilayah dengan kerusakan terfokus pada titik kritis sering menunjukkan pemulihan yang tampak lebih cepat, karena sumber daya dapat diarahkan dengan prioritas tunggal. Sebaliknya, ketika kebutuhan menyebar pada banyak titik (akses, layanan dasar, jembatan, pembersihan), sumber daya harus dibagi, dan hasilnya lebih sulit terlihat sebagai satu capaian tunggal.

Urutan kerja rekayasa yang tidak dapat ditukar. Contoh kasus pembukaan akses 51 km di Tapanuli Tengah menunjukkan urutan kerja yang bersifat wajib: pembersihan material dan perapihan badan jalan menjadi prasyarat sebelum kendaraan logistik dapat melintas. Mekanisme ini menjelaskan mengapa wilayah pegunungan dengan longsor beruntun sering memerlukan durasi lebih panjang.

Rantai pasok material dan interoperabilitas lintas instansi. Pemulihan konektivitas melalui Bailey/Armco sangat dipengaruhi oleh kesiapan material dan sinkronisasi lintas instansi. Pada Sumbar, rencana multi-jembatan dengan rincian lokasi

dan fase tahap pertama menciptakan struktur program yang memudahkan perencanaan dan pelaksanaan. Pada Agam, pelibatan Yonzikon 12/KJ, Denzipur 2, serta Batalyon TP menegaskan desain kerja gabungan yang menggabungkan tim teknis dan unsur pendukung.

Orkestrasi pentahelix sebagai penentu percepatan pemulihan. Pentahelix membantu membaca mengapa proses pemulihan bisa berbeda meski bencana berdekatan waktu: pemerintah menentukan prioritas dan komando, dunia usaha menjaga rantai pasok, komunitas menyediakan informasi lokal, akademisi memperkuat analisis risiko dan desain mitigasi, media menjaga komunikasi risiko dan akuntabilitas. Literatur pentahelix dalam penanganan bencana menekankan pentingnya sinergi lintas unsur tersebut.



Mekanisme	Aceh	Sumut	Sumbar	Dampak ke kecepatan pemulihan
Sebaran titik gangguan (terfokus vs multipoint)	Umumnya multipoint dalam satu koridor , sering ada bottleneck yang "mengunci" arus.	Multipoint luas lintas kabupaten , kebutuhan triase dan penugasan multi-site lebih berat.	Multipoint dua jaringan (pesisir dan pedalaman), jalur alternatif tidak selalu setara.	Makin multipoint dan makin luas , makin besar biaya koordinasi dan alokasi alat → cenderung lebih lambat.
Urutan kerja rekayasa yang tidak dapat ditukar	Urutan kunci: akses minimum → stabilisasi approach → pasang jembatan darurat → peningkatan kapasitas .	Sering perlu pembersihan/normalisasi awal sebelum alat bisa masuk; urutan berjalan paralel namun berebut sumber daya.	Dibatasi topografi & staging area ; akses alat dan ruang kerja jadi prasyarat.	Urutan yang rigid membuat percepatan hanya mungkin jika prasyarat (akses, stabilisasi, staging) dipenuhi cepat.
Rantai pasok material & interoperabilitas lintas instansi	Kritis pada ketersediaan modul/komponen dan sinkronisasi peran (struktur, approach, lalu lintas, keamanan).	Kritis pada pembagian alat/material ke banyak titik dan mekanisme berbagi sumber daya lintas instansi.	Kritis pada distribusi (pesisir-pedalaman), pengaturan detour, pembatasan tonase, sinkron jalan-jembatan.	Supply chain + interoperabilitas adalah pengali: kuat → cepat; lemah → alat ada tapi tidak efektif.
Orkestrasi pentahelix	Percepatan terjadi bila pemerintah, bisnis, komunitas, media, akademisi bergerak serempak pada titik bottleneck.	Paling menantang karena skala wilayah; perlu prioritas lintas kabupaten dan satu pesan publik.	Menentukan karena risiko susulan dan pilihan rute; komunikasi publik dan dukungan bisnis jadi kunci.	Pentahelix menentukan kecepatan keputusan, kepatuhan publik, dan efektivitas alokasi sumber daya.

Tabel 6. komparasi Aceh-Sumut-Sumbar pada 4 mekanisme.

IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI

Bagian ini sengaja ditulis sebagai bahan evaluasi yang solutif untuk memperkuat standar BBB dan mengurangi variasi pemulihan.

Penguatan readiness material dan pra-penempatan. Rekomendasi: membangun skema pra-penempatan material jembatan darurat dan komponen kritis pada hub regional untuk musim risiko tinggi, dengan SOP mobilisasi lintas instansi yang jelas. Ini selaras dengan BBB yang menekankan pemulihan sebagai kesempatan membangun ketangguhan, bukan sekadar pemulihan sementara.

Standar interoperabilitas lintas aktor di level daerah. Rekomendasi: menyusun protokol interoperabilitas minimum sehingga format asesmen cepat, prioritas titik kritis, dan pembagian peran agar pengambilan keputusan tidak tertahan oleh friksi koordinasi, terutama pada jam-jam awal.

Integrasi komunikasi risiko dan transparansi progres. Rekomendasi: membangun dashboard progres (publik) berbasis indikator sederhana: akses terbuka, jembatan fungsional, layanan dasar pulih. Pendekatan ini memperkuat peran media dan komunitas dalam pentahelix sekaligus mengurangi gap persepsi publik terhadap progres pemulihan.

Bottleneck	Dampak	Rekomendasi	Aktor pentahelix utama
Satu–dua titik kunci mengunci koridor (akses masih “tersumbat” walau titik lain membaik)	Arus logistik dan mobilitas tetap terhambat	Jadikan titik kunci sebagai target utama 24–72 jam, siapkan rute sementara dan manajemen lalu lintas	Government memimpin; Business dukung alat/material; Media informasikan rute
Pendekat/tebing dan alur sungai belum stabil (bukan sekadar struktur jembatan)	Jembatan darurat bisa terpasang tetapi belum aman/berkapasitas	Standarkan urutan kerja: akses minimum → stabilisasi → struktur darurat → peningkatan kapasitas	Government memimpin; Academia memberi rekomendasi stabilitas; Business suplai material
Pengiriman material/modul dan alat ke lokasi	Pekerjaan terhenti menunggu material/alat	Buat rencana pasok cepat: stok awal, jadwal angkut, dan titik kumpul logistik	Business memimpin logistik; Government izin/pengawasan
Data status titik gangguan tidak seragam	Prioritas berubah-ubah, keputusan lambat	Terapkan format data tunggal harian: lokasi, status, target waktu, kebutuhan	Academia validasi; Government otorisasi; Community verifikasi lapangan
Komunikasi rute aman belum konsisten	Warga menumpuk di titik rawan, distribusi bantuan tidak lancar	Komunikasi risiko singkat: peta rute aman, jam buka-tutup, batas beban	Media memimpin; Government sumber resmi; Community sebar info

Tabel 7.1.1. Tabel Bottleneck, Dampak, Rekomendasi, dan Aktor pentahelix untuk Aceh.

Bottleneck	Dampak	Rekomendasi	Aktor pentahelix utama
Sebaran gangguan luas lintas kabupaten (multipoint luas)	Alat/personel terpecah, sulit fokus	Terapkan triase: 3 prioritas awal (akses layanan vital, logistik, ekonomi), lalu bertahap	Government memimpin; Academia bantu metode prioritas; Community suplai info
Akses alat berat sulit (jalan sempit, tanah labil, medan)	Mobilisasi lambat, produktivitas rendah	Buka jalur masuk alat dulu: perkuat badan jalan, staging area, SOP keselamatan	Government memimpin; Business alat/operator; Academia analisis lereng
Koordinasi lintas instansi pada banyak titik	Ada lokasi tumpang tindih atau kosong	Posko terpadu + satu peta kerja + satu jadwal harian + satu kanal komunikasi	Government memimpin; Media satu narasi; Business berbagi sumber daya
Risiko susulan (hujan, longsor/banjir susulan)	Pekerjaan berhenti berulang, bahaya personel	Monitoring risiko: ambang hujan, pembatasan jam kerja, rencana evakuasi	Academia memimpin; Government komando; Media peringatan
Distribusi bantuan/rute aman berubah cepat	Publik bingung, bantuan terlambat	Update rute aman harian dan diseminasi lintas kanal	Media memimpin; Government validasi; Community sebar lokal

Tabel 7.1.2. Tabel Bottleneck, Dampak, Rekomendasi, dan Aktor pentahelix untuk Sumatera Utara.

Bottleneck	Dampak	Rekomendasi	Aktor pentahelix utama
Gangguan di dua jaringan (pesisir dan pedalaman)	Jalur alternatif tidak selalu setara; beban berpindah ke ruas lain	Tetapkan skenario rute: jalur utama, jalur alternatif, batas tonase, dan pengaturan lalu lintas	Government memimpin; Media informasikan; Community bantu pengaturan lokal
Topografi dan ruang kerja membatasi urutan pekerjaan	Alat berat tidak bisa langsung bekerja optimal	Siapkan staging area dan akses alat lebih dulu; urutan kerja dipatuhi	Government memimpin; Business alat/material; Academia saran teknis
Pengiriman material terhambat oleh kondisi jalur	Material terlambat, pekerjaan tersendat	Rencana distribusi adaptif: titik drop, jadwal angkut, pengawalan	Business memimpin; Government izin/pengaturan jalan
Koordinasi jalan-jembatan belum sinkron	Pekerjaan selesai parsial, akses tetap terganggu	Integrasi pekerjaan: target harian bersama untuk jalan dan jembatan	Government memimpin; Academia evaluasi; Business dukung peralatan
Komunikasi publik rute aman dan status jalan	Salah rute, penumpukan kendaraan	Rilis status jalan sederhana: buka-tutup, batas beban, estimasi waktu	Media memimpin; Government sumber resmi

Tabel 7.1.3. Tabel Bottleneck, Dampak, Rekomendasi, dan Aktor pentahelix untuk Sumatera Barat.

Bottleneck	Dampak	Rekomendasi	Aktor pentahelix (utama → pendukung)
Zona bahaya dinamis (awan panas, lahar, alur sungai)	Jalur evakuasi dapat berubah, risiko tinggi bagi warga dan tim	Pakai peta KRB dan rute evakuasi resmi; pembaruan harian; disiplin pembatasan zona	Government (PVMBG/ BPBD) → Media (peringatan), Community (kepatuhan), Academia (analisis), Business (logistik)
Gangguan konektivitas pada titik tertentu (jembatan/koridor)	Evakuasi dan logistik terhambat	Siapkan rute cadangan; penyeberangan sementara; prioritas pemulihan akses vital	Government → Business (alat/logistik), Community (dukungan lokal)
Komunikasi risiko tidak sederhana	Kepanikan atau ketidakpatuhan, arus evakuasi tidak tertib	Pesan tunggal: zona dilarang, rute aman, titik kumpul, waktu pembaruan	Media → Government (sumber resmi), Community (diseminasi)

Tabel 7.2. Tabel Bottleneck, Dampak, Rekomendasi, dan Aktor pentahelix untuk Erupsi Semeru.

Bottleneck	Dampak	Rekomendasi	Aktor pentahelix (utama → pendukung)
Medan curam dan tanah labil	Evakuasi lambat, risiko keselamatan tinggi	Kendali keselamatan: pembatasan jam kerja, monitoring cuaca, stabilisasi awal	Government → Academia (analisis lereng), Media (peringatan), Community (kepatuhan)
Akses alat berat terbatas (jalan sempit, ruang kerja sempit)	Produktivitas rendah, mobilisasi terlambat	Buka jalur alat dulu; staging area; urutan kerja dipatuhi	Government → Business (alat/operator), Community (dukungan akses lahan)
Koordinasi alat dan sektor lintas instansi	Ada jeda “alat ada tapi tidak efektif”	Posko terpadu; satu peta kerja; jadwal harian; satu kanal komando	Government → Business, Media (satu narasi), Community (umpan balik)

Tabel 7.2. Tabel Bottleneck, Dampak, Rekomendasi, dan Aktor pentahelix untuk Longsor Cisarua.

KESIMPULAN

Hal ini menegaskan bahwa peran Zeni TNI Angkatan Darat dalam penanggulangan bencana bukan semata hadir cepat, melainkan mengembalikan fungsi kehidupan melalui rekayasa lapangan. Upaya tersebut mencakup pembukaan akses yang terputus, pemulihan konektivitas, percepatan aliran logistik, serta dukungan pada layanan dasar agar masyarakat terdampak segera bergerak dari fase bertahan menuju fase pulih. Melalui tiga studi kasus yang dianalisis, yaitu Klaster Sumatera, Lumajang Semeru, dan Longsor Cisarua, kontribusi Zeni paling menentukan pada jendela transisi antara tanggap darurat dan pemulihan awal. Pada fase inilah satu keputusan teknis dan satu simpul akses dapat mengubah laju seluruh rantai bantuan.

Temuan utama dari Klaster Sumatera menunjukkan bahwa perbedaan kecepatan pemulihan antarwilayah yang terdampak pada rentang waktu berdekatan lebih tepat dibaca sebagai konsekuensi dari pipeline pemulihan yang sering tidak tampak di ruang publik. Kecepatan pemulihan ditentukan oleh

penetapan simpul prioritas, kesiapan lokasi rekayasa, kelancaran rantai pasok material, serta orkestrasi lintas aktor. Ketika gangguan tersebar pada banyak titik dan kebutuhan berjalan paralel, maka sumber daya harus dibagi, urutan kerja tidak dapat dipertukarkan, dan capaian menjadi bertahap. Karena itu, ukuran cepat tidak identik dengan alat sudah tiba, melainkan terkait kapan akses benar benar fungsional dan aman digunakan.

Kasus Lumajang Semeru memperlihatkan bahwa pada ancaman geologi yang dinamis, pemulihan berlangsung di bawah risiko susulan. Oleh sebab itu, ukuran keberhasilan tidak semata terselesaikannya pekerjaan fisik, tetapi juga pemulihan yang aman. Pelajaran kuncinya adalah bahwa rekayasa lapangan harus berjalan bersama disiplin keselamatan dan komunikasi risiko, sehingga kecepatan, keamanan, dan ketahanan dapat dijaga secara bersamaan.

Kasus Longsor Cisarua menegaskan bahwa pada kejadian dengan korban jiwa, prioritas awal adalah operasi penyelamatan

dan pengamanan lokasi. Dalam konteks tersebut, pemulihan akses berperan sebagai prasyarat agar evakuasi, distribusi bantuan, serta operasi pencarian dapat berjalan efektif. Dengan demikian, pemulihan dalam pengertian kebijakan publik tidak selalu dimulai dengan pembangunan, melainkan sering dimulai dengan penciptaan kondisi aman untuk mencegah korban tambahan dan memastikan akses operasional tim gabungan.

Ketiga kasus ini bertemu pada satu kesimpulan konseptual yang kuat. *Build Back Better* bukan hanya agenda rekonstruksi jangka panjang, melainkan harus dimulai sejak keputusan pertama pada fase darurat, khususnya pada pemulihan akses dan konektivitas yang menjadi urat nadi bantuan. Dalam praktik, hal ini berarti penerapan standar minimum keselamatan pada pekerjaan darurat, penguatan titik rawan berulang, serta rancangan transisi yang jelas dari solusi sementara menuju solusi yang lebih tahan risiko.

Implikasi kebijakan dari temuan ini bersifat evaluatif dan solutif. Untuk mengurangi variasi tempo pemulihan dan sekaligus meningkatkan kualitas pemulihan yang tangguh, diperlukan penguatan kesiapan melalui pra penempatan material kritis, penyusunan protokol interoperabilitas lintas instansi, prioritas simpul berbasis dampak layanan publik, serta tata kelola pentahelix yang membuat keputusan lebih cepat, pasokan lebih lancar, dan komunikasi publik lebih presisi. Apabila langkah langkah tersebut dijalankan secara konsisten, maka kontribusi Zeni TNI AD tidak hanya terlihat sebagai respons darurat, tetapi menjadi mesin pemulihan yang menyambung kembali mobilitas masyarakat, mempercepat

pulihnya kehidupan, serta meninggalkan pesan yang tegas bahwa negara hadir untuk menolong sekaligus memperbaiki sistem agar bencana berikutnya tidak menghasilkan luka yang sama.



PERAN BEKANG TNI AD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI SUMATERA

Oleh: Kolonel Cba. Roni Kurniawan, S.H., M.I.Pol.
(Dirbindokjuktrakorps)

Indonesia sebagai negara beriklim tropis tidak pernah lepas dari potensi bencana hidrometeorologi. Suhu yang hangat sepanjang tahun, kelembapan tinggi, serta dua musim utama—hujan dan kemarau—membentuk karakter cuaca yang dinamis. Namun pada tahun 2025, dinamika tersebut mengalami eskalasi. Fenomena perubahan iklim global memperlihatkan dampaknya secara nyata: pola hujan yang semakin ekstrem, durasi curah hujan yang lebih panjang, serta anomali pembentukan siklon di wilayah yang sebelumnya jarang terjadi.

Data BNPB sepanjang tahun 2025 mencatat 3.176 kejadian bencana. Mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Puncak krisis terjadi pada akhir November 2025 ketika wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda bencana besar yang dipicu oleh terbentuknya Siklon Senyar di Selat Malaka pada 26 November 2025. Siklon tropis langka tersebut berkembang di area yang tidak biasa, menghasilkan curah hujan sangat tinggi yang memicu banjir luas dan longsor di berbagai daerah.



Anomali ini menjadi peringatan bahwa perubahan iklim semakin memengaruhi dinamika cuaca di Indonesia. Dampaknya diperparah oleh kerusakan lingkungan dan kerusakan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan jaringan listrik yang mengakibatkan ribuan rumah terendam, akses logistik terputus, dan masyarakat



Di tengah situasi darurat tersebut, TNI hadir menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang salah satu tugas TNI dalam operasi militer selain perang adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, serta pemberian bantuan kemanusiaan. TNI AD sebagai bagian integral TNI bergerak cepat melaksanakan operasi kemanusiaan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Dalam setiap operasi penanggulangan bencana, logistik menjadi faktor penentu. Tanpa makanan, air bersih, tenda, dan dukungan distribusi yang memadai, bantuan tidak akan pernah benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak. Di sinilah peran Pusat Pembekalan dan Angkutan Angkatan Darat (Pusbekangad) menjadi sangat strategis sebagai satuan yang melaksanakan dukungan intendans, angkutan militer, dan ketertinalan. Pada

masa awal tanggap darurat, dukungan intendans diwujudkan melalui pendirian mess lapangan menggunakan tenda-tenda darurat serta pembukaan dapur lapangan dengan kecukupan kalori dan gizi yang memadai.

Pusbekangad didukung oleh sinergi satuan operasional yaitu Yonbekang 3/PRY (Darat), Yonbekang 5/ARY (Perbekud), serta Satangair/KRY (Perairan) dalam pelaksanaan distribusi bantuan secara terpadu. Pada fase awal tanggap darurat, banyak wilayah di Aceh dan sekitarnya terisolasi akibat putusnya jalan dan jembatan. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapusbekangad menyiapkan 200 bundle parasut ex PULO beserta perangkat rigging untuk mendukung penerjunan logistik melalui udara menggunakan metode LCLA (*Low Cost Low Altitude*) dan *hellybox*. Metode LCLA memungkinkan pengedropan logistik seberat 150–165 kilogram per *bundle* dari



Keterangan gambar : Distribusi Logistik di wilayah Bekangdam IM via darat

ketinggian rendah agar aman. Sementara hellybox digunakan untuk paket ringan sekitar 5 kilogram per kotak untuk kebutuhan cepat seperti mie instan.

Sejak 1 Desember 2025, personel Yonbekang 5/ARY (Perbekud), bersama unsur TNI AU melaksanakan serangkaian airdrop di berbagai drop zone seperti Bima Patra, Blangkejeran, dan Serbajadi. Bantuan tersebut menjadi harapan hidup bagi ribuan warga yang terjebak tanpa akses logistik. Terputusnya jaringan komunikasi di wilayah drop zone diatasi menggunakan perangkat komunikasi satelit dan genset agar *dropping* berjalan efektif. Bagi personel di lapangan, setiap paket yang berhasil dijatuhkan berarti menyelamatkan kehidupan.

Di wilayah Kodam Iskandar Muda, Bekangdam IM bergerak sejak 29 November 2025 melayani ribuan pengungsi dengan sejumlah dapur lapangan digelar di berbagai

titik di Aceh seperti Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, dan Lhoksumawe. Bekangdam IM juga membuka posko logistik untuk menginventarisasi dan mengemas bantuan sesuai kebutuhan wilayah terdampak. Distribusi dilakukan ke berbagai daerah seperti Nagan Raya, Aceh Singkil, Subulussalam, dan lainnya, baik melalui jalur darat maupun udara. Bencana juga merusak jalur transmisi listrik SUTT 150 KV Arun–Bireuen. Bekangdam IM turut membantu mobilisasi material *emergency tower* milik PLN menggunakan kendaraan guna mempercepat pemulihan infrastruktur kelistrikan.

Di Sumatera Utara, dampak bencana mencakup puluhan ribu rumah rusak dan ratusan jembatan terdampak. Kodam I/Bukit Barisan melalui Bekangdam I/BB menggelar 18 dapur lapangan serta mengerahkan perahu LCR, truk angkut, dan perlengkapan keselamatan untuk mendukung evakuasi serta distribusi logistik. Sementara itu, di



Keterangan Gambar : Persiapan pengedropan barang bantuan dengan LCLA (Low Cost Low Altitude) dan hellybox.



Keterangan Gambar: Dapur lapangan dan logistik dari Bekandam TIB

Sumatera Barat, bencana berdampak pada 13 wilayah. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol menggelar dapur lapangan di 13 titik dengan ribuan porsi makanan hangat disiapkan setiap hari. Tim LCR juga membantu evakuasi lebih dari seribu warga dan mendorong distribusi logistik bagi ratusan kepala keluarga.

Dalam operasi kemanusiaan penanggulangan bencana di Sumatera, TNI AD mengerahkan delapan Kapal ADRI secara bertahap yang tidak hanya mengangkut sembako, tetapi juga alat berat, material jembatan, kendaraan taktis, serta

personel zeni untuk mendukung pemulihan infrastruktur. Keunggulan jalur laut terletak pada kapasitas angkutnya karena kapal dapat mengangkut ratusan ton dalam satu pelayaran. Pada 2 Desember 2025, Kapal ADRI XCII diberangkatkan dengan rute Jakarta – Dumai – Belawan – Malahayati – Dumai – Jakarta. Kapal ini membawa 7.836 koli bantuan dengan total berat 47.609 kilogram. Muatannya terdiri dari beras, mie instan, sarden, air mineral, pakaian layak pakai, selimut, kasur, pampers anak, ember, peralatan mandi, hingga sepatu boots.

Tiga hari kemudian, 5 Desember 2025, Kapal ADRI LII diberangkatkan dengan muatan jauh lebih besar. Total 13.871 koli dengan berat 415.217 kilogram diangkut. Tidak hanya sembako, kapal ini membawa *crane cargo* jembatan, *trado* jembatan, bulldozer, excavator, dump truck 8 ton, serta truk tangki BBM. Muatan tersebut menunjukkan bahwa operasi tidak lagi sekadar tanggap darurat, tetapi mulai memasuki fase pemulihan akses dan rehabilitasi infrastruktur.

Pada 9 Desember 2025, Kapal ADRI LIII diberangkatkan membawa 81 personel zeni beserta material jembatan Aramco dan jembatan Bailey, excavator, serta dump truck 8 ton. Total muatan mencapai 7.472 koli dengan berat 497.004 kilogram. Sehari setelahnya, Kapal ADRI XLVIII kembali diberangkatkan membawa 4.269 koli dengan berat 367.076 kilogram. Kapal ADRI tidak hanya membawa logistik konsumsi, tetapi juga sarana vital untuk membuka kembali akses yang terputus. Jembatan Bailey yang diangkut memungkinkan pembangunan jembatan darurat dalam waktu relatif singkat. Excavator dan dump truck membantu membersihkan material longsor dan memperbaiki jalur distribusi.

Rute pelayaran Kapal ADRI dirancang secara strategis untuk menjangkau beberapa pelabuhan utama di Sumatera seperti Dumai, Belawan, Malahayati, Lhoksumawe, hingga Palembang. Setiap pelabuhan menjadi simpul distribusi. Dari titik tersebut, bantuan diteruskan melalui jalur darat, sungai, atau udara menuju kabupaten/kota terdampak.

Dukungan yang dilaksanakan Pusbekangad dan Bekangdam dalam operasi kemanusiaan di Sumatera menunjukkan

bahwa kecepatan dan ketepatan logistik adalah kunci keberhasilan penanggulangan bencana. Airdrop memastikan bantuan tetap menjangkau daerah terisolasi, dapur lapangan menjaga ketahanan fisik pengungsi, dan distribusi laut mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

Bencana hidrometeorologi memang membawa duka dan kerugian besar. Namun di tengah situasi tersebut, hadir pula solidaritas, kerja keras, dan dedikasi tanpa henti. Peran Bekang TNI AD dalam penanggulangan bencana di Sumatera menjadi bukti nyata bahwa TNI dan negara selalu hadir di tengah kesulitan rakyat. Melalui dukungan logistik yang terintegrasi darat, laut, dan udara, TNI AD tidak hanya menjalankan tugas operasi militer selain perang, tetapi juga memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat sebuah fondasi penting dalam menghadapi setiap tantangan bangsa.



Keterangan Gambar: Pengerahan Kapal ADRI oleh TNI AD dalam rangka mendistribusikan bantuan kemanusiaan dan material jembatan, kendaraan taktis, serta personel zeni untuk mendukung pemulihan infrastruktur

TRANSFORMASI TNI DALAM **OPERASI MILITER SELAIN PERANG (OMSP)** DAN PERAN TNI DALAM MISI PERDAMAIAN DUNIA



“Keadilan yang tidak tunduk pada kekuatan. Dunia yang memanusiakan sesama. Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton sejarah,”. Terkait konflik di Gaza, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia, “Maka, jika dewan keamanan PBB memutuskan, Indonesia siap mengirimkan 20 ribu lebih pasukan perdamaian ke Gaza atau ke daerah konflik lain di dunia.”

Kolonel Arm Ezra Nathanael, S.Kom, M.M, M.Han
(Danrem 073/Makutarama)



Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) merupakan salah satu tugas pokok TNI di luar operasi militer perang. OMSP meliputi berbagai kegiatan seperti membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana, menjaga keamanan nasional, mendukung tugas kemanusiaan, serta berperan dalam misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB. Melalui OMSP, TNI menunjukkan peran aktif dalam menjaga stabilitas dan kedamaian, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. **Transformasi TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam konteks**

OMSP adalah perubahan dan penyesuaian peran TNI agar tidak hanya fokus pada operasi militer perang, tetapi juga aktif dalam berbagai tugas non-perang. OMSP mencakup kegiatan seperti membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana, menjaga keamanan nasional, mendukung tugas kemanusiaan, serta berperan dalam misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB. Melalui OMSP, TNI menunjukkan peran aktif dalam menjaga stabilitas dan kedamaian, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

Latar Belakang Transformasi TNI dalam OMSP.

Transformasi TNI, khususnya dalam penguatan postur OMSP, bukan sekadar respons reaktif, melainkan adaptasi strategis terhadap pergeseran spektrum ancaman yang tidak lagi linier. Berikut adalah analisis mendalam berdasarkan empat dimensi utama: 1) **Kondisi Dinamika Bangsa.** Perubahan internal Indonesia menuntut TNI untuk lebih fleksibel dalam peran non-tempur (OMSP) guna menjamin stabilitas nasional yang menjadi prasyarat pembangunan ekonomi.

Transformasi Demografi & Digital:

Dengan tingginya penetrasi internet dan bonus demografi, ancaman bergeser ke ranah kognitif dan siber. Dinamika sosial kini sangat rentan terhadap hoax, radikalisme digital, dan perang informasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa tanpa letusan peluru. **Kebutuhan Stabilitas Pasca-Pemilu:** Transisi kepemimpinan nasional dan dinamika politik domestik menuntut peran TNI yang kuat namun terukur dalam menjaga stabilitas sosial, membantu Polri dalam Kamtibmas, serta mendukung pemerintah daerah, tanpa mengorbankan profesionalisme militer (kembali ke barak namun tetap waspada).

Ancaman Bencana & Kemanusiaan:

Letak geografis di Ring of Fire menjadikan bencana alam sebagai ancaman permanen. OMSP dalam penanggulangan bencana menjadi wajah humanis TNI yang paling

dominan di mata publik, menuntut kesiapan gelar pasukan yang cepat (rapid deployment) untuk misi kemanusiaan; **2) Tantangan Bangsa dan Negara ke Depan.** Tantangan masa depan bersifat multidimensi (Hibrida), di mana batas antara perang dan damai menjadi kabur (Grey Zone Operation).

Ancaman Hibrida & Asimetris: Musuh negara di masa depan mungkin bukan angkatan bersenjata negara lain secara terbuka, melainkan aktor non-negara (teroris, separatis) yang didukung kekuatan asing, atau serangan siber terhadap infrastruktur kritis (listrik, perbankan, data strategis).

Keamanan Pangan, Energi, dan Air:

Krisis global akibat perubahan iklim dan konflik logistik menempatkan ketahanan pangan (Hanpangan) sebagai prioritas pertahanan. TNI dituntut bertransformasi untuk mendukung program strategis nasional dalam mencetak lahan pertanian dan mengamankan sumber daya alam (SDA).

Kejahatan Lintas Negara (Transnational Crime) : Penyelundupan, human trafficking, dan perompakan menuntut TNI AL dan AU untuk meningkatkan kapabilitas surveillance dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi nasional; **3) Kondisi Geopolitik dan Geostrategi.** Posisi silang Indonesia di Indo-Pasifik menempatkan negara ini di tengah persaingan kekuatan besar (Great Power Competition).



Rivalitas di Indo-Pasifik: Eskalasi ketegangan antara kekuatan hegemonik (seperti AS dan Tiongkok) di Laut China Selatan berpotensi memicu dampak spill-over ke wilayah Natuna. Transformasi OMSP diperlukan untuk misi pengamanan perbatasan dan diplomasi pertahanan guna menjaga netralitas aktif (bebas aktif) Indonesia.

Jalur Sutra Maritim & ALKI: Sebagai negara kepulauan yang menjadi jalur lintasan perdagangan dunia (ALKI I, II, III), Indonesia harus mampu menjamin keamanan navigasi. Transformasi TNI difokuskan pada kemampuan interkoneksi antar-matra (Tri Matra Terpadu) untuk mengawasi dan mengendalikan jalur strategis ini;

Lingkungan Strategis Regional: Potensi instabilitas di negara tetangga (seperti krisis Myanmar atau sengketa wilayah) menuntut

TNI siap dalam misi perdamaian dunia (PKO) maupun operasi evakuasi WNI; 4) **Revisi UU TNI Tahun 2025 (UU No. 3 Tahun 2025).** Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang disahkan pada Maret 2025 menjadi landasan yuridis utama transformasi ini.

Perluasan Definisi & Jenis OMSP : Revisi ini mempertegas dan memperluas cakupan tugas OMSP (dari 14 poin menjadi lebih komprehensif), termasuk secara eksplisit menyebutkan peran dalam mengatasi ancaman siber, pengamanan proyek strategis nasional, serta dukungan terhadap ketahanan pangan dan energi.

Jabatan Sipil untuk TNI Aktif. : UU ini mengakomodasi penempatan prajurit aktif di lebih banyak kementerian/lembaga (K/L) sesuai kebutuhan kompetensi, tidak lagi terbatas pada 10 kementerian awal. Hal ini didasari kebutuhan akan disiplin dan keahlian spesifik militer dalam manajemen krisis nasional. **Modernisasi Manajemen Personel:** Penyesuaian batas usia pensiun (Bintara/Tamtama 58 tahun, Perwira 60 tahun, dan Perwira Tinggi Bintang 4 dapat diperpanjang hingga 65 tahun) bertujuan memaksimalkan kematangan pengalaman prajurit dalam menghadapi tantangan strategis yang makin kompleks.

Transformasi TNI dalam OMSP didorong oleh kebutuhan untuk menghadapi ancaman yang tidak lagi bersifat militer murni (military heavy), melainkan ancaman spektrum hibrida yang menasar sendi-sendi kehidupan berbangsa. Revisi UU TNI 2025 memberikan “payung hukum” agar TNI dapat bergerak lebih lincah (agile) dan legal dalam membantu pemerintah (sipil) mengatasi krisis nasional, mulai dari bencana alam, krisis pangan, hingga ancaman siber, tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai tentara pejuang.

Transformasi TNI dalam OMSP tercermin dari perubahan peran dan tugas TNI yang tidak hanya berfokus pada operasi militer perang, tetapi juga aktif dalam berbagai tugas non-perang. Transformasi ini menunjukkan bahwa TNI semakin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan bangsa dan dunia, tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dan kemanusiaan. Contoh konkret dari transformasi ini adalah : **1) Penanggulangan Bencana Alam.** TNI secara aktif terlibat dalam

penanggulangan bencana alam di Indonesia, seperti evakuasi korban, distribusi bantuan logistik, dan pemulihan infrastruktur pasca-bencana. Salah satu contoh nyata adalah keterlibatan TNI dalam penanganan bencana tanah longsor di Pulau Serasan, di mana TNI melakukan evakuasi warga terdampak dan membantu proses rehabilitasi. Selain itu, TNI juga menjadi garda terdepan dalam berbagai bencana besar seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi, dengan ribuan nyawa yang berhasil diselamatkan berkat kesiapan prajurit TNI;

2). **Operasi Kemanusiaan Selama Pandemi COVID-19.** Pada masa pandemi COVID-19, TNI menjalankan berbagai operasi kemanusiaan, seperti:

- Menertibkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
- Menyediakan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit darurat
- Melakukan evakuasi dan pemulangan WNI dari luar negeri, seperti pemulangan 238 WNI dari Wuhan dan ribuan ABK kapal pesiar
- Mendukung distribusi alat kesehatan dan logistik ke berbagai daerah
- Membantu pengamanan perbatasan dan fasilitas publik untuk memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik.



3) Misi Perdamaian Dunia di Bawah PBB.

TNI secara rutin mengirimkan pasukan dalam misi perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Contoh spesifik: Kontingen Garuda TNI telah bertugas di berbagai negara konflik seperti Lebanon (UNIFIL), Kongo (MONUSCO), Sudan (UNAMID), dan Republik Afrika Tengah (MINUSCA), Pada tahun 2025, lebih dari 2.700 personel TNI dan Polri bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik global, termasuk operasi kemanusiaan dan perlindungan warga sipil; **4) Penertiban Wilayah dan Bantuan Pemerintah Daerah.** Implementasi OMSP juga terlihat dalam operasi penertiban wilayah, seperti kasus penertiban kawasan Kalijodo di Jakarta Utara. Dalam kasus ini, TNI membantu pemerintah daerah dalam proses penggusuran sebagai bagian dari tugas OMSP, meskipun pelibatan TNI dalam ranah sipil ini sempat menimbulkan polemik dan perdebatan mengenai legitimasi dan payung hukum yang digunakan; **5) Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Laut.** TNI AU terlibat dalam operasi

gabungan menjaga keamanan Selat Malaka melalui program Malacca Strait Patrol (MSP) dan Eye in the Sky (EiS) untuk menangani pembajakan dan perompakan bersenjata di wilayah tersebut. Operasi ini merupakan bentuk interoperabilitas TNI dalam OMSP untuk menjaga keamanan maritim nasional dan regional.



Beberapa tantangan yang dihadapi terkait Transformasi TNI dalam OMSP diantaranya adalah : **1). Keterbatasan Jumlah Personel dan Sumber Daya.** Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jumlah personel TNI untuk melaksanakan seluruh tugas OMSP yang semakin luas. Hal ini diakui oleh anggota Komisi I DPR RI, yang merekomendasikan optimalisasi kolaborasi dengan satuan perlindungan masyarakat (linmas) di tingkat desa agar pelaksanaan OMSP lebih maksimal dan efektif; **2) Perluasan Tugas dan Kompleksitas Ancaman.** Revisi UU TNI menambah cakupan tugas OMSP dari 14 menjadi 16

tugas, termasuk penanggulangan ancaman siber dan penyelamatan warga negara di luar negeri. Penambahan tugas ini menuntut TNI untuk adaptif terhadap ancaman non-tradisional seperti serangan siber dan krisis internasional, yang membutuhkan keahlian dan sumber daya baru; **3) Profesionalisme dan Regulasi.** Tantangan lain adalah menjaga profesionalisme TNI di tengah perluasan peran di ranah sipil. Diperlukan penyempurnaan regulasi dan pengawasan agar pelaksanaan OMSP tetap sesuai dengan prinsip negara hukum, supremasi sipil, dan tidak mengancam hak-hak demokratis masyarakat; **4) Potensi Ancaman terhadap Kebebasan Sipil.** Pelaksanaan OMSP yang melibatkan TNI di ranah sipil berpotensi mengancam kebebasan sipil jika tidak diimbangi dengan kontrol dan pengawasan yang memadai. Lemahnya mekanisme pengawasan demokratis dapat membuka ruang bagi militerisme dan intervensi di luar fungsi utama pertahanan negara; **5) Kesalahpahaman Publik dan Kerangka Hukum.** Masih terdapat kesalahpahaman di masyarakat terkait peran TNI dalam OMSP, terutama soal keterlibatan TNI di ruang sipil. OMSP seharusnya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) negara dalam menghadapi krisis, bukan instrumen respons pertama. Penegasan kerangka hukum yang jelas sangat penting agar pelaksanaan OMSP tidak menyimpang dari prinsip negara hukum dan demokrasi; **6) Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi dan Ancaman Modern.** TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terutama dalam menghadapi ancaman siber dan perang modern. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas, pelatihan, dan modernisasi alat utama sistem persenjataan

(alutsista). Solusi yang diusulkan antara lain optimalisasi kolaborasi dengan masyarakat, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan kapasitas serta pengawasan yang ketat.

Transformasi TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) khususnya di bidang organisasi, doktrin, dan anggaran, berdasarkan dokumen ***Transformasi Tni Dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Dan Peran Tni Dalam Misi Perdamaian Dunia:***

1. Transformasi di Bidang Organisasi.

Transformasi organisasi TNI dalam OMSP didorong oleh kebutuhan untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks dan multidimensi. Perubahan ini mencakup:

- **Penyesuaian Struktur dan Postur TNI:** TNI tidak hanya berfokus pada operasi militer perang, tetapi juga memperkuat peran dalam tugas-tugas non-perang seperti penanggulangan bencana, operasi kemanusiaan, pengamanan perbatasan, dan misi perdamaian dunia.
- **Modernisasi Manajemen Personel:** Revisi UU TNI Tahun 2025 memperpanjang batas usia pensiun (Bintara/Tamtama 58 tahun, Perwira 60 tahun, dan Perwira Tinggi Bintang 4 hingga 65 tahun) untuk memaksimalkan pengalaman dan kematangan prajurit dalam menghadapi tantangan strategis yang makin kompleks.
- **Penempatan Prajurit Aktif di Kementerian/Lembaga:** UU TNI yang baru mengakomodasi penempatan prajurit aktif di lebih banyak kementerian/lembaga sesuai

kebutuhan kompetensi, tidak lagi terbatas pada 10 kementerian awal. Hal ini bertujuan untuk mendukung manajemen krisis nasional dengan keahlian militer yang spesifik.

2. Transformasi di Bidang Doktrin

- **Perluasan Definisi dan Jenis OMSP:** Revisi UU TNI Tahun 2025 mempertegas dan memperluas cakupan tugas OMSP, termasuk secara eksplisit menyebutkan peran dalam mengatasi ancaman siber, pengamanan proyek strategis nasional, serta dukungan terhadap ketahanan pangan dan energi.
- **Adaptasi terhadap Ancaman Hibrida dan Asimetris:** Doktrin TNI kini menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman non-tradisional seperti serangan siber, kejahatan lintas negara, dan krisis kemanusiaan. Hal ini menuntut perubahan pola pikir dan pendekatan operasi yang lebih fleksibel dan kolaboratif, termasuk interoperabilitas antar-matra (Tri Matra Terpadu).
- **Penegasan Peran OMSP sebagai Ultimatum Remedium:** OMSP ditekankan sebagai upaya terakhir negara dalam menghadapi krisis, bukan sebagai instrumen respons pertama, sehingga pelaksanaannya harus tetap dalam kerangka negara hukum dan demokrasi.

3. Transformasi di Bidang Anggaran

- **Penambahan dan Penyesuaian Anggaran:** Dengan perluasan tugas OMSP, kebutuhan anggaran TNI

juga meningkat, terutama untuk mendukung kesiapan gelar pasukan yang cepat (rapid deployment), modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta peningkatan kapasitas dan pelatihan dalam menghadapi ancaman siber dan tugas kemanusiaan.

- **Optimalisasi Kolaborasi dan Efisiensi:** Mengingat keterbatasan jumlah personel dan sumber daya, optimalisasi kolaborasi dengan satuan perlindungan masyarakat (linmas) dan instansi lain menjadi solusi agar pelaksanaan OMSP lebih efektif dan efisien. Hal ini juga berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran negara.





PERAN TNI DALAM MISI PERDAMAIAN DUNIA

Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia memang merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang menjadi salah satu tugas pokok TNI. Dalam konteks OMSP, TNI tidak hanya berfokus pada operasi militer perang, tetapi juga aktif dalam berbagai tugas non-perang, termasuk misi perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Transformasi TNI dalam OMSP menegaskan peran aktif TNI dalam menjaga stabilitas dan kedamaian, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Salah satu contoh konkret adalah pengiriman Kontingen Garuda TNI ke berbagai negara konflik seperti Lebanon (UNIFIL), Kongo (MONUSCO), Sudan (UNAMID), dan Republik Afrika Tengah (MINUSCA). Pada tahun 2025, lebih dari 2.700 personel TNI dan Polri bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik global, termasuk operasi kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. Peran ini menunjukkan bahwa

TNI semakin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan bangsa dan dunia, tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dan kemanusiaan.

Beberapa Dampak Misi Perdamaian TNI terhadap Stabilitas Global diantaranya:

1) Kontribusi pada Perdamaian Dunia TNI secara rutin mengirimkan pasukan dalam misi perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti Kontingen Garuda yang bertugas di Lebanon (UNIFIL), Kongo (MONUSCO), Sudan (UNAMID), dan Republik Afrika Tengah (MINUSCA). Kehadiran TNI di wilayah konflik membantu menurunkan eskalasi kekerasan, melindungi warga sipil, dan mendukung proses rekonsiliasi serta pemulihan pasca-konflik; **2) Meningkatkan Citra Indonesia di Dunia Internasional** Partisipasi aktif TNI dalam misi perdamaian dunia memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen

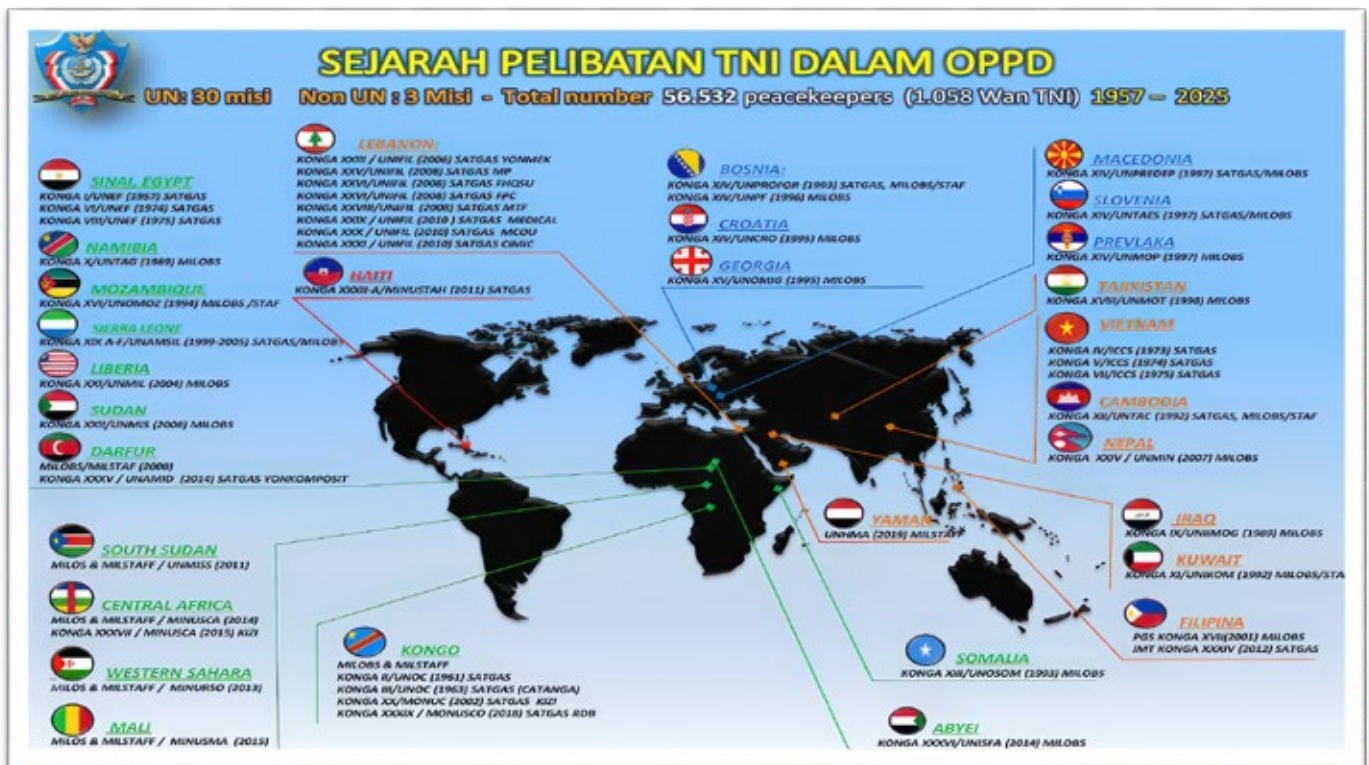
terhadap perdamaian dan stabilitas global. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap profesionalisme dan kemampuan TNI dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dan diplomasi pertahanan; 3) **Penguatan Kerjasama Internasional** Melalui misi perdamaian, TNI membangun kerjasama dengan berbagai negara dan organisasi internasional. Kolaborasi ini memperkuat jaringan diplomasi dan pertahanan Indonesia, serta membuka peluang transfer pengetahuan dan teknologi militer; 4) **Perlindungan Warga Sipil dan Bantuan Kemanusiaan** TNI berperan aktif dalam operasi kemanusiaan, seperti evakuasi warga sipil, distribusi bantuan logistik, dan pemulihan infrastruktur di daerah konflik. Dampak langsungnya adalah terciptanya lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat lokal. Secara keseluruhan, misi perdamaian TNI berkontribusi

signifikan terhadap stabilitas global dengan menurunkan konflik, memperkuat kerjasama internasional, dan meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang aktif dalam menjaga perdamaian dunia.

Pengiriman Pasukan Perdamaian Dunia oleh Indonesia

Indonesia telah lama berkomitmen dalam misi perdamaian dunia, terutama melalui pengiriman Kontingen Garuda (KONGA) sebagai pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1957.

Hingga saat ini, Indonesia menjadi negara pengirim pasukan perdamaian terbesar ke-5 di dunia, dengan lebih dari 2.700 personel yang tersebar di delapan misi PBB, antara lain di Republik Afrika Tengah (MINUSCA),



Sejarah Pelibatan TNI Dalam OPPD (Sumber : PMPP TNI)

Kongo (MONUSCO), Lebanon (UNIFIL), Sudan, dan beberapa negara lain. Pengiriman pasukan ini merupakan implementasi dari amanat Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain TNI, Polri

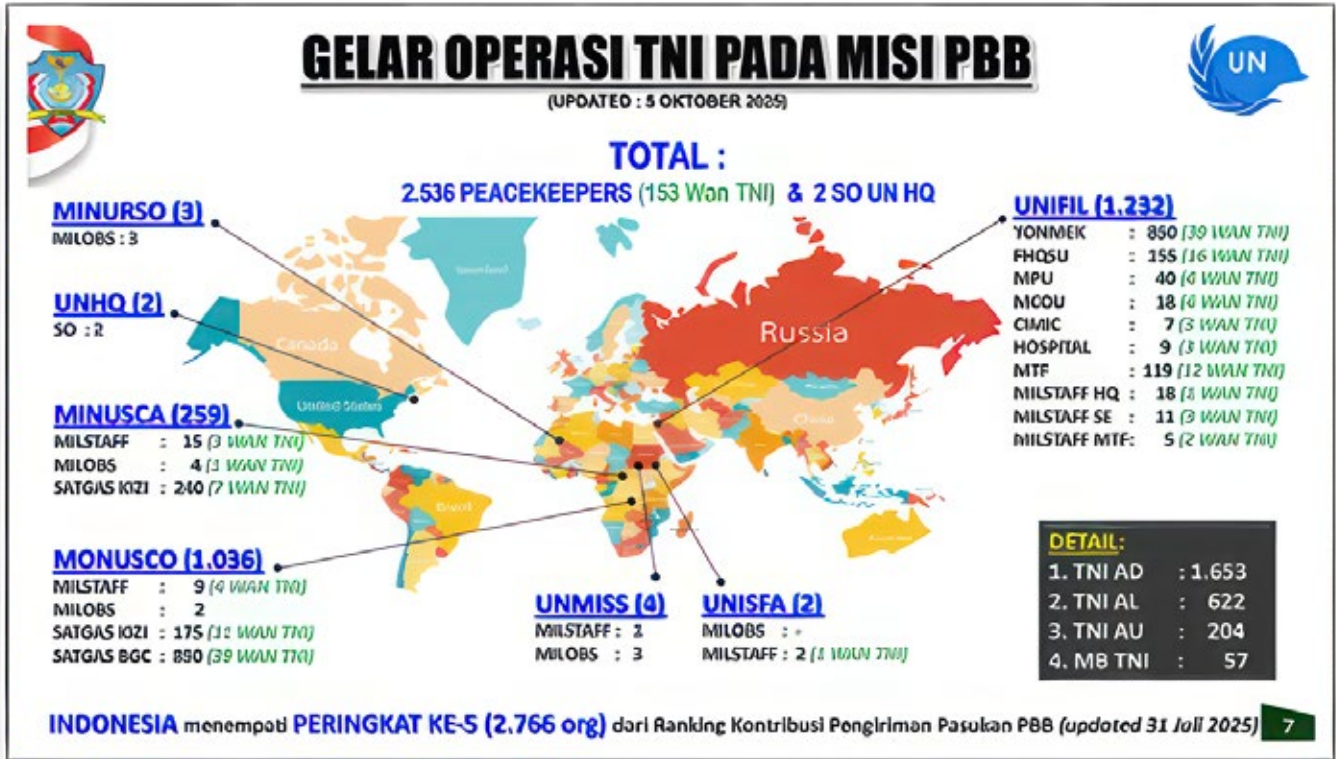
juga secara reguler mengirimkan personel untuk misi Individual Police Officers (IPOs) di bawah PBB. Pemerintah Indonesia, melalui Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme personel yang dikirim untuk misi perdamaian dunia.



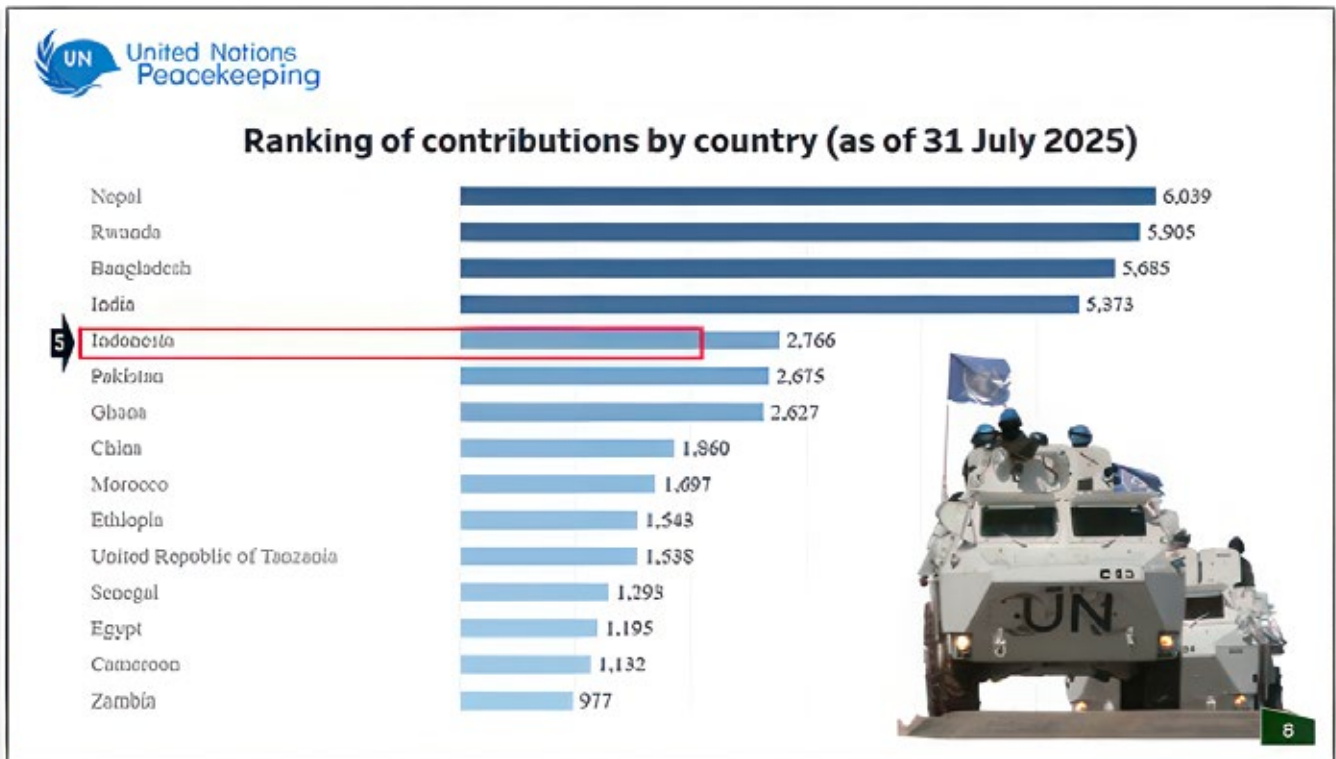
Indonesia juga berperan serta dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi Gaza melalui Dewan Perdamaian. Kebijakan terkini Presiden Prabowo Subianto terkait “Dewan Perdamaian” **Kebijakan Presiden Prabowo tentang Dewan Perdamaian di Gaza** dan pengiriman pasukan ke Gaza, berdasarkan data terbaru per Januari 2026:

1) **Bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace).** Pada Januari 2026, di sela-sela World Economic Forum (WEF) di

Davos, Swiss, Presiden Prabowo secara resmi menandatangani piagam untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace). *Board of Peace* merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik. Pembentukan badan ini merupakan bagian dari **Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap)** dan telah memperoleh dukungan



Gelar Operasi TNI Pada Misi PBB (Sumber : PMPP TNI)



Rangking Troops Contributing Countries (TCC) (Sumber : PMPP TNI)



Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025). Resolusi tersebut juga merujuk pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). Sikap Prabowo: Presiden Prabowo menyebut pembentukan dewan ini sebagai **“kesempatan bersejarah”** untuk menciptakan perdamaian yang nyata. Ia menekankan bahwa prioritas utama Indonesia bergabung adalah untuk memastikan penderitaan rakyat Gaza berkurang dan bantuan kemanusiaan dapat masuk tanpa hambatan; Dewan Perdamaian Gaza ini merupakan badan internasional yang bertujuan mengawasi administrasi transisi, stabilisasi keamanan, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik. Dewan ini juga didukung oleh sejumlah negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Pakistan, dan Uni Emirat Arab.

Tujuan utama Indonesia bergabung adalah untuk mempercepat proses perdamaian di Gaza, memastikan suara Palestina tetap terjaga, mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, serta memperluas akses bantuan kemanusiaan. Partisipasi Indonesia juga dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-state solution), bukan menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak rakyat Palestina. Dalam forum ini, Indonesia akan secara aktif menyuarakan posisi prinsipil terkait penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina yang legitimate.

2) **Komitmen Pasukan Perdamaian & International Stabilization Force (ISF).** Kebijakan pertahanan Indonesia di bawah Presiden Prabowo telah menyiapkan langkah

konkret untuk keterlibatan militer dalam skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di Gaza. Kesiapan Personel: Indonesia telah menyiagakan sekitar 20.000 personel pasukan perdamaian. Angka ini ditegaskan kembali oleh Presiden dalam Sidang Majelis Umum PBB dan pertemuan dengan mediator internasional (AS, Turki, Qatar, Mesir). Fokus Misi (OMSP): Berbeda dengan misi tempur, mandat utama pasukan yang disiapkan difokuskan pada dua sektor krusial: Kesehatan: Pengiriman tenaga medis dan pendirian rumah sakit lapangan. Konstruksi (Zeni): Pembangunan kembali infrastruktur yang hancur (sekolah, rumah sakit, fasilitas umum). Terminologi Baru: Dalam konteks pasca-konflik 2026, pengerahan ini diproyeksikan menjadi bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). Prasyarat Pengiriman: Presiden Prabowo menegaskan bahwa **“boots on the ground”** hanya akan dilakukan jika ada mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB (DK PBB) atau kesepakatan gencatan senjata permanen yang membutuhkan pihak ketiga sebagai pengawas/penjamin keamanan; 3) **Diplomatik Pertahanan.** Presiden Prabowo aktif menggunakan forum internasional (KTT Gaza di Mesir, forum Shangri-La, dan WEF Davos) untuk memposisikan Indonesia bukan hanya sebagai donor bantuan, tetapi sebagai pemain kunci dalam arsitektur keamanan regional Timur Tengah, menjembatani komunikasi antara blok Barat dan negara-negara OKI.

Kendala yang dihadapi diantaranya adalah : **1) Persyaratan Mandat Internasional.** Pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza hanya dapat dilakukan jika ada mandat resmi dari Dewan Keamanan

PBB atau kesepakatan gencatan senjata permanen yang membutuhkan pihak ketiga sebagai pengawas/penjamin keamanan. Tanpa mandat ini, pengerahan pasukan tidak dapat dilaksanakan secara legal dan aman; **2) Kompleksitas Misi dan Fokus Non-Tempur.** Berbeda dengan misi tempur, mandat utama pasukan yang disiapkan difokuskan pada sektor kesehatan (pengiriman tenaga medis, pendirian rumah sakit lapangan) dan konstruksi (pembangunan infrastruktur yang hancur). Hal ini menuntut kesiapan logistik, sumber daya manusia, dan perlengkapan khusus yang berbeda dari operasi militer biasa; **3) Tantangan Keamanan dan Stabilitas Wilayah.** Situasi keamanan di Gaza sangat dinamis dan berisiko tinggi. Pasukan perdamaian harus siap menghadapi potensi ancaman dari berbagai pihak, baik aktor negara maupun non-negara, serta kemungkinan eskalasi konflik yang dapat membahayakan keselamatan personel; **4) Koordinasi Internasional dan Diplomasi.** Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) menuntut koordinasi erat dengan negara-negara lain dan organisasi internasional. Proses diplomasi untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan, perlindungan warga sipil, dan pemulihan tata kelola sipil Palestina menjadi tantangan tersendiri; **5) Kesiapan Personel dan Sumber Daya.** Walaupun Indonesia telah menyiagakan sekitar 20.000 personel, pelaksanaan misi skala besar seperti ini membutuhkan kesiapan penuh dari segi pelatihan, logistik, dan dukungan anggaran. Penyesuaian dengan standar operasi internasional juga menjadi tantangan; **6) Isu Hukum dan Legitimasi.** Pelibatan TNI dalam misi perdamaian harus tetap berada dalam kerangka hukum nasional dan internasional.

Setiap langkah harus sesuai dengan prinsip negara hukum dan tidak menimbulkan polemik terkait legitimasi atau pelanggaran hak asasi manusia.

Analisis komprehensif penyiapan Pasukan International Stabilization Force (ISF) Indonesia untuk misi perdamaian dan pemulihan Gaza, ditinjau dari jumlah pasukan, jenis satuan tugas, kemampuan, materiil-logistik, latihan pra-tugas, serta implikasi anggaran negara.

1) **Jumlah Pasukan yang Disiapkan.** Indonesia menyiagakan sekitar 5.000 - 8.000 personel untuk kemungkinan keterlibatan dalam misi perdamaian dan stabilisasi Gaza dalam kerangka OMSP dan ISF. Namun, dokumen menegaskan bahwa pengerahan nyata (*boots on the ground*) hanya akan dilakukan jika terdapat mandat resmi Dewan Keamanan PBB atau gencatan senjata permanen yang memerlukan pihak ketiga sebagai pengawas dan penjamin keamanan. Dengan demikian, angka 20.000 personel merupakan kekuatan siaga strategis, bukan angka pasti pasukan yang langsung dikerahkan.

2) **Jenis Satuan Tugas (Satgas) yang Diproyeksikan.** Dokumen secara eksplisit menyebut bahwa ISF Indonesia tidak dirancang sebagai pasukan tempur, melainkan difokuskan pada OMSP dengan komposisi satuan sebagai berikut :

- **Satgas Batalyon Mekanis (Yonmek)** yang terdiri dari Kompi Mekanis yang dilengkapi dengan kendaraan tempur lapis baja seperti *Armoured Personnel Carrier (APC)* atau *Infantry Fighting Vehicle (IFV)* yang dirancang untuk angkut personel dalam pertempuran kota;
- **Satgas Kesehatan** yang terdiri dari

Tenaga medis militer, Pendirian dan pengoperasian rumah sakit lapangan, Dukungan kesehatan masyarakat dan kemanusiaan;

- **Satgas Zeni/Konstruksi** yang memiliki kemampuan : Rekonstruksi infrastruktur vital pascakonflik (Rumah sakit, Sekolah, Fasilitas umum dan layanan dasar) dan Pemulihan infrastruktur sipil untuk stabilisasi awal wilayah. Fokus non-tempur ini ditegaskan sebagai pembeda utama antara ISF dan operasi militer konvensional,
- **Satgas Force Protection Unit (FPU)** yang memiliki kemampuan Pasukan Khusus Tri Matra untuk pengamanan Markas Komando dan Force Commander dan kemampuan Quick Response Team (QRT);

3) **Kemampuan Pasukan (Capability Profile).** Kemampuan pasukan ISF Indonesia dibangun dari transformasi OMSP TNI yang mencakup : a) Kemampuan Operasi Kemanusiaan (Pengalaman panjang TNI dalam OMSP bencana alam dan pandemi, Perlindungan warga sipil dan distribusi bantuan); b) Kemampuan Multinasional (Interoperabilitas dengan pasukan negara lain dalam misi PBB, Standar operasi internasional (UN Peacekeeping)), c) Kemampuan Stabilization & Civil Support (Pengamanan terbatas, Dukungan tata kelola sipil transisi, Pendekatan human security, bukan enemy-centric. Kemampuan ini merupakan hasil langsung dari adaptasi TNI terhadap ancaman hibrida dan grey zone, sebagaimana diuraikan dalam transformasi doktrin OMSP.

4) **Materiil dan Logistik yang Dibawa.** Beberapa materiil dan logistik yang akan dibawa dalam misi Perdamaian di Gaza meliputi : Peralatan medis untuk rumah



sakit lapangan, Sarana konstruksi zeni untuk rekonstruksi, Logistik kemanusiaan untuk mendukung operasi jangka menengah, Dukungan mobilitas dan akomodasi pasukan non-tempur

5) **Latihan Pra-Tugas (Pre-Deployment Training).** Latihan pra-tugas ISF secara konseptual mengacu pada standar Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, sebagaimana selamainidijalankanolehTNI melaluiPMPPTNI. Beberapa yang menjadi fokus latihan meliputi : Operasi OMSP non-tempur, Koordinasi multinasional, Perlindungan warga sipil, Disiplin HAM dan hukum humaniter internasional. Hal ini konsisten dengan pengalaman TNI dalam mengirim lebih dari 2.700 personel pada misi PBB tahun 2025, serta posisi Indonesia sebagai Troop Contributing Country peringkat ke-5 dunia.

6) **Anggaran Negara yang Digunakan.** Yang menjadi Sumber Anggaran diantaranya adalah APBN sektor pertahanan, Anggaran OMSP TNI, Dukungan lintas kementerian/ lembaga untuk misi kemanusiaan

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Transformasi TNI dalam OMSP tercermin dari perubahan peran dan tugas TNI yang tidak hanya berfokus pada operasi militer perang, tetapi juga aktif dalam berbagai tugas non-perang. Transformasi ini menunjukkan bahwa TNI semakin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan bangsa dan dunia, tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dan kemanusiaan. Transformasi TNI dalam OMSP dilaksanakan melalui Transformasi Doktrin, Organisasi dan Anggaran.

Indonesia telah lama berkomitmen dalam misi perdamaian dunia, terutama melalui pengiriman Kontingen Garuda (KONGA) sebagai pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1957 hingga tahun 2026 Indonesia akan berperan serta dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi Gaza melalui Dewan Perdamaian sesuai Kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

PENGUNGKAPAN DIRI DI ERA DIGITAL: MEMANFAATKAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI STRATEGI PREVENTIF UNTUK PENGAMANAN TUBUH

Oleh: Kolonel Inf Budianto H. Damanik
(Danbrigif TP 84/Uggor Abiresso)



Di era digital saat ini, interaksi manusia di dunia maya telah menjadi aspek dominan dalam kehidupan sehari-hari. Data menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia mencapai 78,19% pada tahun 2023, dengan jumlah pengguna internet mencapai 221 juta orang . Selain itu, pada Januari 2025, tercatat 143 juta identitas pengguna media sosial aktif di Indonesia, yang mencakup 50,2% dari total populasi . Hal ini menandakan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia terhubung melalui media sosial, menjadikannya platform utama untuk berkomunikasi dan berbagi.

“Moril Prajurit adalah kunci dari segala pertempuran. Mereka yang bertahan dengan tekad dan semangat juang yang tinggi akan mengalahkan musuh yang lebih kuat secara fisik.”

George S. Patton

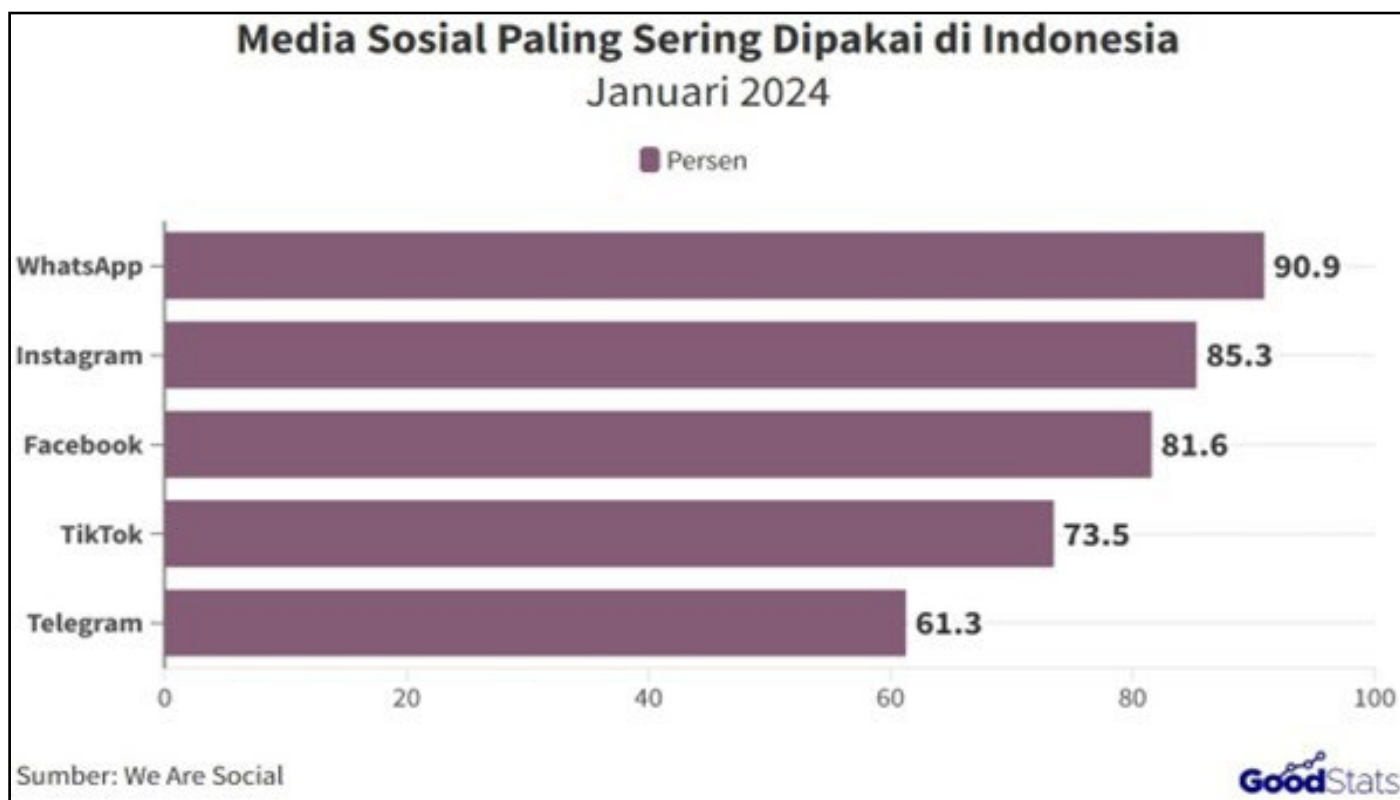


Gambar 1: Kondisi Digital Indonesia 2025

Penggunaan media sosial tidak hanya tinggi, tetapi juga menjadi sarana utama bagi individu untuk mengungkapkan diri. Sebanyak 75% pengguna internet Indonesia menggunakan media sosial, dengan mayoritas untuk terhubung dengan keluarga dan teman. Namun, data juga menunjukkan bahwa 68% pengguna internet Indonesia adalah anak-anak dan remaja, menjadikan mereka kelompok usia yang rentan terhadap dampak negatif media sosial. Paparan

terhadap konten di media sosial dapat mempengaruhi kesehatan

mental, dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan ide bunuh diri pada remaja. Kasus bunuh diri yang terkait dengan media sosial juga menjadi perhatian serius. Pada tahun 2020, ditemukan bahwa media sosial dapat mempengaruhi tindakan bunuh diri, terutama bagi individu yang dalam kondisi rentan atau depresi, yang mendapatkan



Gambar 2: Media Sosial Yang Sering Digunakan

perundungan siber. Selain itu, pemberitaan yang menampilkan detail metode bunuh diri dapat memicu efek copycat suicide, di mana individu dengan kondisi serupa terdorong untuk meniru tindakan tersebut.

Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental manusia. Menurut Seabrook (2016), interaksi negatif dan perbandingan sosial di situs media sosial memiliki keterkaitan dengan tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi. Semakin sering remaja menggunakan media sosial, maka kecenderungan untuk mengalami masalah kesehatan mental seperti masalah citra tubuh (Boyd & Marwick, 2011). Hasil penelitian Marchant (2017), menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara media sosial dengan ide bunuh diri pada remaja, penggunaan media sosial dapat

mengungkapkan pikiran, perilaku dan niat bunuh diri yang menunjukkan sejumlah besar keputusan.

Selain itu, bagi sebagian orang, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana hiburan. Banyak remaja yang menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, mengikuti aktivitas live show para influencer, yang sering kali menunjukkan gaya hidup glamor dan penuh kebahagiaan. Meskipun terlihat menyenangkan, hal ini justru membawa dampak negatif bagi kehidupan pribadi mereka. Pengaruh negatif ini terjadi karena mereka mulai membandingkan diri mereka dengan influencer yang sering kali menampilkan citra yang tidak realistis tentang kebahagiaan atau kesuksesan. Akibatnya, remaja yang menghabiskan banyak waktu melihat kehidupan orang lain merasa semakin

terisolasi, cemas, dan tidak puas dengan kehidupan mereka sendiri. Fenomena ini memperburuk masalah kesehatan mental, yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih serius.

Seiring berjalannya waktu, banyak dari remaja ini yang kemudian menjadi bagian dari Prajurit dan mendominasi sumber daya manusia di dalam tubuh TNI AD. Kehidupan mereka yang dipengaruhi oleh media sosial sejak masa remaja turut membawa dampak pada karakter dan kondisi mental ketika bergabung dengan militer. Hal ini sangat penting karena mentalitas yang terbentuk pada masa muda seringkali berlanjut hingga usia dewasa, menciptakan pola perilaku dan cara berpikir yang bisa mempengaruhi kinerja serta stabilitas pribadi mereka di lingkungan militer.

Kondisi kesehatan jiwa prajurit, terutama yang berasal dari generasi yang tumbuh di tengah derasnya arus informasi digital, merupakan manifestasi dari kondisi mental mereka sebelumnya. Prajurit yang bergabung dalam institusi militer membawa serta bekal pengalaman dan kondisi psikologis yang terbentuk selama masa remaja mereka, yang tidak jarang dipengaruhi oleh paparan media sosial. Kesehatan mental mereka dapat mencerminkan seberapa baik mereka mampu mengelola stres, tekanan sosial, dan masalah pribadi yang mungkin mereka alami sebelumnya.

Fenomena ini tercermin dalam beberapa indikator yang semakin menunjukkan adanya dampak negatif terhadap kesehatan mental prajurit. Salah satunya adalah meningkatnya kasus THTI atau Disersi,

yang seringkali berkaitan dengan masalah pribadi atau kesehatan mental prajurit yang tidak tertangani dengan baik. Ketika prajurit merasa tertekan atau tidak mampu mengelola stres, mereka cenderung mencari jalan pintas untuk melarikan diri dari situasi yang mereka anggap tidak dapat mereka atasi. Dalam beberapa kasus, hal ini berujung pada ketidakhadiran atau bahkan disersi dari tugas. Selain itu, fenomena yang semakin mengkhawatirkan adalah meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan prajurit, yang sering kali berakar dari masalah psikologis yang terabaikan. Pengaruh media sosial yang memberikan tekanan sosial, serta eksposur terhadap standar hidup dan kesuksesan yang



tidak realistis, dapat memperburuk kondisi mental prajurit yang sudah rentan. Ketika perasaan terisolasi atau tertekan semakin mendalam, beberapa prajurit mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki jalan keluar lain selain mengakhiri hidup mereka. Ini menunjukkan bahwa kondisi mental yang buruk, yang mungkin sudah ada sebelum bergabung dengan militer, bisa semakin memburuk jika tidak ditangani dengan baik.

Tidak kalah penting, judi online juga menjadi masalah yang semakin meningkat, terutama di kalangan prajurit yang berusia muda. Ketergantungan pada permainan daring dan taruhan online sebagai pelarian dari stres atau masalah pribadi menjadi indikasi bahwa prajurit memiliki kecenderungan untuk mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan masalah. Pengaruh media sosial, yang seringkali mempromosikan gaya hidup konsumtif dan cepat kaya, turut memperburuk perilaku ini. Ketika prajurit merasa tertekan atau tidak dapat mengatasi

masalah mereka, mereka mungkin mencari pelarian dalam perjudian online, yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan stabilitas keuangan mereka. Indikasi-indikasi ini menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin besar di kalangan prajurit untuk menghindari konfrontasi langsung dengan masalah pribadi mereka, lebih memilih jalan pintas sebagai solusi, yang pada akhirnya dapat merusak kesehatan mental mereka.

Di dalam tubuh TNI AD, yang merupakan salah satu institusi dengan struktur hirarkis yang ketat, kondisi mental prajurit menjadi faktor yang sangat utama. Stabilitas mental yang baik akan mendukung kedisiplinan, kinerja, dan kesiapan prajurit dalam melaksanakan tugas negara. Namun, apabila seorang prajurit tidak mampu mengatasi dampak dari permasalahan mental yang dibawa dari pengalaman pribadi atau dari pengaruh media sosial, ini dapat merugikan tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga sesama Prajurit dan Satuan secara keseluruhan.



Sebagai platform yang sangat terhubung dan mudah diakses, media sosial telah menjadi tempat yang nyaman bagi banyak individu termasuk Prajurit untuk berbagi berbagai aspek kehidupan mereka, baik itu perasaan, pemikiran, maupun pengalaman.

Faktanya, penggunaan media sosial sering kali lebih mendalam dibandingkan dengan interaksi konvensional/tradisional seperti percakapan langsung dengan teman, keluarga ataupun Pimpinan/Komandan. Sebuah studi oleh Pew Research Center (2021) menemukan bahwa 69% orang dewasa lebih suka berbagi informasi pribadi mereka di platform media sosial daripada berbicara langsung dengan teman atau anggota keluarga.

Ini mengindikasikan bahwa individu merasa lebih mudah membuka diri melalui media sosial karena adanya jarak dan kontrol atas apa yang dibagikan. Proses pengungkapan diri di media sosial memberikan kebebasan bagi pengguna untuk memilih informasi yang ingin dibagikan kepada publik atau hanya kepada lingkaran tertentu. Keberadaan berbagai fitur, seperti status, gambar, video, dan bahkan pesan pribadi, memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri mereka lebih bebas tanpa adanya intervensi langsung dari orang lain. Sebagai contoh, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* menemukan bahwa individu yang lebih aktif di media sosial cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi pribadi secara terbuka dibandingkan dengan yang hanya berinteraksi secara langsung dengan orang di sekitar mereka.

Namun, meskipun pengungkapan diri melalui media sosial menawarkan kemudahan dan kebebasan, ada sisi lain yang perlu diperhatikan. Semakin besar volume informasi yang dibagikan, semakin besar pula risiko terjadinya penyalahgunaan atau dampak negatif terhadap individu. Misalnya, seseorang yang mengungkapkan masalah pribadi mereka di media sosial berpotensi mendapatkan perhatian negatif, baik berupa perundungan siber (cyberbullying) maupun eksposur berlebihan terhadap masalah pribadi yang pada akhirnya dapat merugikan kesejahteraan mental dan emosional mereka.

Penting untuk dicatat bahwa pengelolaan kesehatan jiwa prajurit tidak hanya berkaitan dengan perawatan dan pemulihan, tetapi juga pencegahan sejak awal. Ketika seorang prajurit bergabung di satuan, mereka perlu diberikan pelatihan dan dukungan yang memadai untuk mengelola kesehatan mental mereka.

Penanggulangan permasalahan yang berasal dari gangguan mental yang timbul akibat pengaruh media sosial, seperti: kecemasan, depresi, atau gangguan citra tubuh merupakan langkah preventif yang penting untuk dilakukan. Penting juga untuk mengedepankan kesadaran mengenai bahaya yang dapat timbul dari perundungan siber dan tekanan sosial yang terjadi di media sosial. Pendidikan mengenai penggunaan media sosial yang bijak, serta pembinaan karakter yang lebih kokoh, sangat dibutuhkan untuk membentuk prajurit yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga mental.

Oleh karena itu, upaya preventif dalam pengelolaan kesehatan mental di kalangan prajurit harus mencakup pendekatan yang



lebih menyeluruh, meliputi pemahaman tentang dampak media sosial dan strategi untuk menjaga kesehatan mental yang positif. Meskipun media sosial memiliki dampak negatif yang terhadap kesehatan mental, namun media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai strategi preventif untuk pengamanan tubuh.

Dalam hal ini, media sosial berfungsi sebagai saluran untuk mendeteksi potensi ancaman terhadap diri individu, khususnya prajurit di lingkungan satuan. Fungsi Intelijen (siber) di Satuan, melalui pemantauan yang cermat terhadap aktivitas media sosial prajurit, dapat dengan cepat mengidentifikasi tanda-tanda permasalahan mental atau risiko lainnya yang mungkin muncul akibat pengungkapan diri di platform tersebut. Sebagai contoh, jika seorang prajurit mengungkapkan perasaan depresi, kecemasan, atau niat untuk melukai diri di media sosial, hal ini dapat menjadi sinyal awal yang perlu direspons dengan langkah-

langkah preventif. Dengan mendeteksi gejala-gejala ini sejak dini, pihak Satuan dapat memberikan dukungan yang diperlukan, baik melalui konseling psikologis, pembinaan mental, maupun intervensi lainnya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang lebih merugikan.

Melalui pendekatan yang tepat, maka Satuan dapat mencegah kerugian lebih lanjut, baik bagi individu prajurit itu sendiri maupun bagi keutuhan satuannya yang diemban. Dengan memprioritaskan kesehatan mental prajurit melalui pendekatan yang berbasis pada pemahaman pengaruh media sosial dan cara mengelolanya, Komandan Satuan dapat menciptakan satuan yang lebih kuat, disiplin, dan siap menghadapi tantangan yang ada. Sebagai bagian dari upaya tersebut, penting untuk memperkenalkan kebijakan yang lebih tegas mengenai penggunaan media sosial di kalangan prajurit, serta memberikan dukungan psikologis yang tepat untuk

membantu mereka mengatasi masalah mental yang mungkin timbul dari pengaruh digital ini.

Di sinilah peran pentingnya penetapan aturan atau regulasi yang jelas tentang pengawasan yang dilakukan satuan terhadap aktivitas di media sosial juga telah dilakukan. Pengawasan ini bertujuan untuk mendeteksi potensi ancaman terhadap prajurit, baik yang bersumber dari permasalahan kesehatan mental yang terungkap melalui pengungkapan diri di media sosial, maupun ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas satuan. Dengan adanya pengaturan yang terstruktur dan pengawasan yang tepat, Satuan dapat memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap potensi ancaman yang terdeteksi, sekaligus memberikan dukungan yang diperlukan untuk memulihkan kondisi mental prajurit sebelum masalah menjadi lebih besar. Namun, bagian yang paling penting dalam upaya ini adalah kepedulian Komandan Satuan di lingkungan satuannya masing-masing. Kepedulian ini akan memastikan bahwa seluruh prajurit merasa didukung dan memiliki saluran untuk mengungkapkan masalah mereka secara terbuka, tanpa rasa takut atau khawatir akan stigma.

Komandan satuan harus aktif dalam memonitor kesejahteraan mental anggotanya, sekaligus memotivasi mereka untuk menggunakan media sosial secara sehat dan positif. Selain itu, komandan satuan juga harus mengoptimalkan fungsi intelijen dan siber dalam mendeteksi potensi masalah sejak dini.

Apabila ada gejala-gejala yang terdeteksi, langkah-langkah preventif harus segera

dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak kesehatan untuk memberikan dukungan psikologis kepada prajurit yang membutuhkannya. Misalnya, melalui konseling atau terapi psikologis, yang bertujuan untuk mengatasi stres, kecemasan, atau gangguan mental lainnya yang muncul akibat pengaruh media sosial. Dengan adanya kerjasama yang erat, prajurit dapat diberikan perawatan yang mereka butuhkan sebelum masalah berkembang lebih jauh.

Melalui kepedulian yang lebih besar, pengawasan yang cermat, dan kolaborasi antara berbagai pihak, Komandan Satuan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi prajurit, baik secara mental maupun fisik. Pengelolaan yang baik terhadap pengungkapan diri di media sosial bukan hanya melindungi individu prajurit, tetapi juga menjaga kekuatan dan stabilitas satuan secara keseluruhan.

Dengan demikian, meskipun media sosial sering kali menjadi sumber masalah, dalam konteks yang lebih terkontrol dan bijaksana, media sosial dapat berfungsi sebagai alat untuk melindungi prajurit dari ancaman terhadap kesehatan mental dan fisik mereka. Penggunaan media sosial yang lebih bertanggung jawab, dengan pengawasan yang tepat, dapat menjadi langkah preventif yang efektif dalam menjaga pengamanan tubuh, serta menciptakan lingkungan satuan yang lebih sehat dan siap menghadapi tantangan yang ada atau gangguan mental lainnya yang muncul akibat pengaruh media sosial. Dengan adanya kerjasama yang erat, prajurit dapat diberikan perawatan yang mereka butuhkan sebelum masalah berkembang lebih jauh.

DESA CANGGU, POTRET KAMPUNG PANCASILA ERA KEKINIAN

Oleh: Kapten Arm Bangun Budi Adi
(Danramil 0809/11 Pare Rem 082/CPYJ Kodam V/BRW)



Desa Cangu, di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur menjadi potret lahirnya Kampung Pancasila pada era kekinian.

Kondisi ini terlihat sejak dulu, seiring besarnya tingkat toleransi antarsesama warga di kawasan tersebut. Mulai dari usia muda hingga lanjut usia, masyarakat di Desa Cangu memiliki semangat besar untuk mengamalkan berbagai nilai luhur Pancasila. Salah satunya tampak dari sikap gotong-roiyong yang diterapkan setiap warga, demi membangun desanya agar lebih maju dan berkembang.



Kondisi inipun disambut baik Kodim 0809/Kediri yang berkomitmen memperluas konsep Kampung Pancasila, sebagai upaya memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat tercipta hubungan yang lebih harmonis dan damai sehingga penghargaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut juga selaras dengan digelarnya Lomba Tingkat Nasional Kampung Pancasila Tahun 2025. Pada Selasa, 3 Februari 2026, Komandan Koramil 11 Pare, Kodim

0709 Kediri, Kapten Arm Bangun Budi Adi, menceritakan, perjalanan Desa Cunggu dalam meraih penghargaan tingkat Nasional sebagai Juara Umum Kampung Pancasila dan Juara 1 Kategori Bidang Ketahanan Pangan bukan semudah membalikkan telapak tangan. Sebab ada banyak perjuangan keras yang harus dilalui. Lika-liku tersebut diawali dengan persiapan di tingkat kecamatan, yang dinilai oleh Koramil masing-masing. Adapun potensi yang dimiliki Desa Cunggu, diantaranya di sektor pertanian Budidaya tanaman Padi dan Jagung serta budidaya Buah Melon dan Selada yang dikemas di dalam Green House yang di kelola oleh Karang Taruna.





Penaburan benih ikan Nila oleh 3 Pilar dan OPD terkait.

Selain bidang pertanian dalam rangka pembinaan ketahanan pangan masyarakat Desa Canggung juga memperluas budidaya ikan lele dan ikan air tawar dalam hal budidaya ikan nila yang mendukung program Swasembada pangan Presiden RI. Selain Bidang Pertanian, Desa Canggung dalam bidang Peternakan juga melaksanakan budidaya ternak kambing dan bebek yang dikelola oleh Pokmas Dusun Surowono Desa Canggung. Keberagaman yang ada di desa tersebut juga termasuk ketahanan pangan yang terintegrasi sehingga memenuhi syarat untuk mendukung program Kampung Pancasila.

Menurut Kapten Arm Bangun, ada 4 item yang harus dinilai dan bisa mencakup seluruh desa tersebut antara lain Pembinaan Ketahanan Pangan, Pembinaan UMKM, Pembinaan Wanra dan Pembinaan Karang Taruna. Ia merinci, pada penilaian pembinaan ketahanan pangan maka tim penilai melakukan penilaian pada tersedianya lahan ketahanan pangan desa yang dikelola bersama untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut.



Rapat Koordinasi Kampung Pancasila dipimpin oleh Pasi Wanwil Rem 082/CPYJ.

Selain itu juga meninjau bagaimana adanya aktivitas masyarakat dalam rangka penyiapan ketahanan pangan desa, serta adanya keterlibatan dari seluruh unsur pemerintahan desa dalam mewujudkan ketahanan pangan desa. Tak hanya itu, Tim Penilai juga meninjau pula adanya kegiatan dalam rangka membantu masyarakat desa tersebut dengan memanfaatkan hasil program ketahanan pangan, dan apakah desa ini memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Bahkan, termasuk halnya juga penilaian terhadap menurunnya angka stunting di desa tersebut dengan adanya program ketahanan pangan. Di sisi lain, penilaian juga diwujudkan dalam hal Pembinaan UMKM. Hal ini mencakup penilaian adanya kemandirian ekonomi masyarakat yang dikelola bersama untuk kesejahteraan masyarakat, apakah desa ini juga memiliki produk lokal yang dikelola oleh masyarakat sebagai ciri khas dari desa tersebut, dan penilaian peran serta dari unsur Pemerintah Desa dalam rangka mengembangkan potensi UMKM setempat. Lalu, tim juga menilai adanya fasilitas

kegiatan perekonomian masyarakat desa tersebut termasuk pasar rakyat yang menjual produk lokal, dan melihat apakah ada badan permodalan bagi UMKM yang dikelola bersama dan kesejahteraan masyarakat alias koperasi desa.

Sementara di Bidang Pembinaan Wanra, Tim Penilai melihat apakah tersedia fasilitas dan aktivitas sistem keamanan lingkungan mulai dari pos kamling atau pos ronda, dan adanya SOP ataupun protap sistem keamanan lingkungan yang disusun oleh masyarakat di wilayah tersebut, serta adanya kegiatan sosialisasi dan simulasi SOP ataupun protap sistem keamanan lingkungan. Kemudian, tim peneliti juga meninjau Bagaimana Tersedianya SOP dalam rangka penanganan bencana di daerah, dan adanya kegiatan sosialisasi maupun simulasi kegiatan penanggulangan bencana berdasarkan SOP atau produk yang telah dibuat serta terbentuknya tim keadaan tanggap darurat di wilayah tersebut yang terdiri dari masyarakat dan unsur terkait, serta apakah desa atau kelurahan ini berpartisipasi dalam program sudah melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim selama 2 tahun dan memiliki kelembagaan atau sudah memiliki



Dandim 0809/Kediri, Letkol Inf Ragil Jaka Utama, optimis Desa Canggung sabet Juara Umum Kampung Pancasila.

registrasi. Bahkan, Tim Penilai juga meninjau pada Pembinaan Karang Taruna.

Aspek ini meliputi adanya organisasi karang taruna yang berada di wilayah tersebut dan adakah program maupun aktivitas kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh karang taruna di antaranya sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat, sanitasi, pengelolaan sampah terpadu, penghijauan dan pembudidayaan tanaman. Lalu apakah ada kegiatan pembinaan karang taruna yang dilaksanakan oleh unsur Pemerintah Desa dan instansi lain secara berkala, serta adakah bantuan dari Pemerintah Desa dan masyarakat berupa beasiswa bagi pemuda pemudi yang berprestasi, serta adanya sarana dan prasarana seperti PAUD Sekolah Taman Baca, gedung pertemuan dan lapangan olahraga yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pembinaan generasi muda.

Dari modal itulah, Desa Canggung berhasil menjadi Juara I tingkat Kodim 0809/Kediri dan langsung mengikuti tingkat Korem 082 Citra Panca Yudha Jaya. Pada tahap perlombaan di Tingkat Korem 082, ajang di sana diikuti oleh jajaran Kodim jajaran Korem 082 ada sebanyak enam Kodim, yang masing-masing Kodim mengikutsertakan dua perwakilan. "Alhamdulillah Desa Canggung ini berhasil kembali meraih Juara I Tingkat Korem 082 dan kemudian diikutkan untuk penilaian tingkat Kodam. Untuk di level Kodam ini, juga diikuti dua perwakilan terbaik Tingkat Korem guna mengikuti perlombaan di tingkat Kodam V/Brawijaya yang terdiri dari empat Korem, yakni Korem 081, Korem 082, Korem 083 dan Korem 084, dan kembali lagi saat itu akhirnya Desa Canggung meraih mendapatkan juara I tingkat Kodam V Brawijaya," kata Kapten Arm Bangun. Diketahui, capaian

ini juga memperoleh dukungan besar dari Pemerintah Kabupaten Kediri, seperti dari pihak OPD terkait maupun tokoh masyarakat yang bersama-sama mengharapkan bisa membantu Desa Canggung menjadi Juara Umum dan Juara I Bin Ketahanan Pangan Kampung Pancasila tingkat nasional.

Sementara itu, menuju kancah nasional, maka maka penilaian Kampung Pancasila tingkat nasional diresiasi oleh TNI Angkatan Darat bekerja sama dengan Astra Group. Adapun, penilaian dari berbagai aspek ini misalnya pembinaan ketahanan pangan, pembinaan Wanra, pembinaan karang taruna dan juga pembinaan UMKM. Menanggapi hal itu, Dandim 0809 Kediri, Letkol Inf Ragil Jaka Utama, menyebutkan, rangkaian kegiatan tim penilai Kampung Pancasila tingkat nasional diawali dari gedung Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri. Pada kesempatan ini, ditampilkan peran anggota linmas kemandirian terhadap tanggap bencana dan UMKM yang dimiliki oleh Desa Canggung.

Salah satu Tim Penilai Kampung Pancasila, Brigjen TNI Edy Rochmatullah, saat meninjau lokasi Simulasi Kampung Pancasila Desa Canggung, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, mengemukakan, secara Nasional pada tahun ini ada 45 Kampung Pancasila yang terpilih. Saat berkeliling di sejumlah stand sebagai perwujudan Pembentukan Kampung Pancasila di Desa Canggung, Kecamatan Badas, di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri, pada Kamis (6/11/2025), Brigjen Edy menjelaskan, penilaian Kampung Pancasila ini, dilakukan sebanyak dua tahap. Masing-masing tahapan online dan offline, yang di tiap kategori akan ada pemilihan nama pemenang. "Masuknya Desa Canggung sebagai salah satu tempat peninjauan, hal ini dikarenakan wilayah tersebut berhasil masuk seleksi dalam Penilaian Kampung Pancasila tingkat Nasional. Apalagi didukung, keberadaan potensi Desa Canggung yang sangat lengkap di antaranya sektor ketahanan pangan, UMKM, hingga ketersediaan Unit Damkar maupun Linmas, dan ditunjang kekompakan Forkopimda yang hadir di sini,



bukti bahwa jalinan komunikasi sangat baik,” kata Brigjen TNI Edy.

Dengan berbagai semangat kerakyatan inilah, pada akhir tahun 2025, Kodim 0809/Kediri berhasil membawa Desa Cunggu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri meraih Juara Umum pada ajang Lomba Tingkat Nasional Kampung Pancasila Tahun 2025. Selain itu, desa tersebut juga menyabet predikat Juara I Kategori Pembinaan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan TNI Angkatan Darat sebagai perwakilan dari Kodam V/Brawijaya.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc dan diterima langsung oleh Dandim 0809/Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, S.Hub. Int., M. H., didampingi Agus Cahyono (Kadis DPMPD Kabupaten Kediri) dan Sertu Kanthi (Babinsa Desa Cunggu) pada acara Pemberian Penghargaan Lomba Kampung Pancasila tahun 2025 di Aula Jendral Besar A.H. Nasution Markas Besar TNI AD Jakarta. Masih dikatakan Dandim 0809/Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, ia mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian ini. “Penghargaan ini adalah bukti nyata hasil kerja keras dan sinergi dan soliditas antara Kodam V/Brawijaya, Korem 082/Cpyj, Kodim 0809/Kediri, Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, Kepolisian serta masyarakat Desa Cunggu Kecamatan Badas,” kata Dandim 0809/Kediri, Letkol Inf Ragil Jaka Utama.

Secara umum, lanjut Lektol Inf Ragil, keberhasilan luar biasa tersebut adalah milik seluruh masyarakat Kabupaten Kediri, khususnya warga Desa Cunggu. Kampung

Pancasila Desa Cunggu menjadi contoh bagaimana nilai-nilai Pancasila, mulai sikap gotong-royong, toleransi, dan kebersamaan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kedepan, pencapaian predikat Kampung Pancasila Tingkat Nasional yang disematkan kepada Desa Cunggu, Kabupaten Kediri merupakan apresiasi sangat berharga. Harapannya, hal ini dapat memotivasi berbagai lapisan masyarakat untuk terus menjaga harmoni sosial, memperkuat ketahanan wilayah, dan menjadikan Pancasila sebagai landasan pembangunan bangsa.



Merebut Hati Dan Kepercayaan Warga di Tanah Papua, **Kiprah Satgas Yonif 142/Ksatria Jaya** dalam Membangun Kedamaian Di Tanah Papua

Oleh: Letkol Inf Dicky Sakti Maulana
(Dansatgas Yonif 142/Ksatria)





A. Pendahuluan

Sinak, sebuah distrik di ketinggian pegunungan Papua yang indah dan asri, Sebelum kehadiran Satgas Yonif 142/Ksatria Jaya, kondisi keamanan di wilayah tersebut berada dalam situasi yang tidak stabil dan penuh ketidakpastian. Sejumlah insiden terjadi, di antaranya pembakaran gedung sekolah SMA serta penyanderaan tenaga kesehatan puskesmas oleh kelompok OPM.

Rangkaian peristiwa tersebut menimbulkan ketakutan yang mendalam di tengah masyarakat. Banyak warga terpaksa meninggalkan honai mereka dan mengungsi ke kampung lain demi menyelamatkan diri serta mencari tempat yang lebih aman.

Satgas Yonif 142/Ksatria Jaya memahami bahwa membangun keamanan di Papua tidak cukup hanya dengan patroli dan pengamanan

wilayah. Yang lebih penting adalah membangun hubungan, menumbuhkan kepercayaan, dan menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi sekaligus melayani.

B. Memenangkan Hati dan Kepercayaan Melalui Aksi Bintahwil “Teritorial”

Pada awal kehadiran Satgas Yonif 142/Ksatria Jaya disambut dengan rasa khawatir oleh masyarakat setempat, dengan niat tulus dan semangat pengabdian, Satgas Yonif 142/Ksatria Jaya mulai melaksanakan berbagai program kegiatan teritorial secara konsisten dan penuh empati. Pendekatan yang digunakan bukan pendekatan koersif (Paksa), melainkan pendekatan persuasif dan humanis.

1. Program Honai Terang: Mengusir Kegelapan

Di ketinggian pegunungan Papua, kegelapan malam sering kali membawa rasa cemas yang mencekam. Namun, melalui program **Honai Terang**, prajurit Yonif 142/Ksatria Jaya hadir membawa secercah harapan dengan mendistribusikan sarana penerangan ke rumah-rumah warga. Cahaya lampu yang kini berpijar di balik dinding honai bukan sekadar pengusir gelap; ia adalah simbol kehidupan yang telah kembali pulih dan penanda nyata bahwa TNI senantiasa hadir menjaga hangatnya kedamaian di tengah mereka.



Satgas Yonif 142/Ksatria Jaya Gotong Royong dengan warga untuk Memperbaiki Honai

2. Restorasi Ekonomi melalui “Borong Hasil Tani”

Salah satu kendala utama saat situasi tidak kondusif adalah macetnya roda ekonomi. Petani takut ke pasar, dan pasokan makanan menipis. Satgas Yonif 142/KJ mengambil langkah progresif dengan memborong hasil bumi masyarakat lokal secara langsung.

- **Tujuan:** Menjamin peningkatan persekonomian di masyarakat.
- **Dampak:** Petani kembali bersemangat mengolah lahan karena kepastian pasar yang dijamin oleh Satgas.

3. Program Pendidikan dan Kesehatan: Investasi Masa Depan

Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Tenaga Pendidikan (Gadik), anak-



Satgas Yonif 142/Ksatria Jaya membeli hasil tani masyarakat di distrik Sinak dan Agandugume, Papua Tengah

anak di Sinak yang sempat terhenti pendidikannya kembali mendapatkan bimbingan belajar. Mereka juga dibekali perlengkapan sekolah, seperti seragam dan alat tulis, guna mendukung kelancaran proses belajar-mengajar. Di sisi lain, pelayanan kesehatan gratis menjadi salah satu langkah penting dalam membangun kedekatan emosional. Prajurit yang dengan tulus dan ikhlas menangani penyakit serta luka masyarakat berhasil menarik simpati dan menumbuhkan kepercayaan warga terhadap TNI.

4. Berbagi Kasih di Hari Raya: Sembako Natal untuk Sinak

Dalam nuansa Damai Natal yang penuh sukacita, Satgas Yonif 142/Ksatria Jaya melaksanakan kegiatan pembagian sembako ke kampung-kampung di Distrik Sinak. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian dan kasih, sekaligus



Perayaan Natal Penuh Kasih : Satgas Yonif 142/ Ksatria Jaya berbagi Bingkisan dan Sembako untuk Masyarakat

mempererat kebersamaan antara prajurit dan masyarakat di momen yang bermakna tersebut. Pembagian sembako dilakukan secara langsung, menghadirkan kehangatan dan kebahagiaan bagi warga sebagai simbol bahwa negara peduli terhadap kesejahteraan masyarakat di hari raya yang penuh kedamaian.



Satgas Yonif 142/Ksatria Jaya melaksanakan Baksos distribusi MBG dan Pelayanan Kesehatan Geratis kepada masyarakat di Distrik Sinak, Papua Tengah

C. Operasi Pembersihan Humanis: Menjamin Keamanan Tanpa Teror

Keamanan adalah prasyarat utama pembangunan. Namun, metode yang digunakan Satgas Yonif 142/KJ memiliki karakteristik unik. Mereka melaksanakan Operasi Pembersihan Humanis di kampung-kampung yang diduga menjadi titik aktivitas kelompok OPM.

Strategi ini terbukti efektif. Alih-alih menimbulkan trauma baru, kehadiran Satgas justru memberikan jaminan bahwa kelompok-kelompok pengganggu tidak akan lagi mengintervensi kehidupan sehari-hari warga. Upaya terpadu ini secara bertahap menumbuhkan keberanian bagi para pengungsi untuk melirik kembali ke arah kampung halaman mereka.

D. Kunjungan Pangkocabwilhan III

Kehadiran Pangkocabwilhan III **Letnan Jenderal (Letjen) TNI Bambang Trisnohadi** di wilayah Sinak menjadi tonggak penting yang menandai bahwa kondisi wilayah telah benar-benar kondusif. Kunjungan ini semakin bermakna dengan penyelenggaraan tradisi lokal **Bakar Batu**, yang dalam budaya Papua menjadi simbol persaudaraan, kebersamaan, dan rasa syukur.

Duduk melingkar bersama personel TNI sambil menikmati hidangan tradisional, masyarakat dan prajurit berbagi momen hangat yang mampu menghapus sisa-sisa



“Keamanan bukan tentang menunjukkan kekuatan, tetapi tentang memberikan rasa terlindungi. Kami membersihkan ancaman dengan cara yang tetap menghormati martabat penduduk setempat.”

kecurigaan dan ketakutan yang pernah ada. Selain itu, pemberian paket sembako dan pelayanan kesehatan gratis menjadi wujud nyata kepedulian, sekaligus menegaskan bahwa kehadiran TNI bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir untuk melindungi, mendampingi, dan membahagiakan masyarakat.

E. Warga Kembali, Kampung Angengen Kembali Hidup

Kampung yang sebelumnya sempat kosong kini kembali dihuni warga. Rasa aman yang semakin dirasakan membuat masyarakat mulai menetap dan beraktivitas kembali seperti biasa.

Satgas Yonif 142/ Ksatria jaya melaksanakan kegiatan teritorial berupa program air bersih, pembagian sembako, dan kegiatan sosial lainnya sebagai bentuk kepedulian serta untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap situasi keamanan.

Dengan kehadiran Satgas dan dukungan masyarakat, Kampung Agengen kini kembali hidup dan aman untuk ditinggali.

F. Kemenangan Diplomasi: Kembalinya 10 Mantan Anggota OPM

Keberhasilan Satgas Yonif 142/KJ dalam melakukan pendekatan persuasif berbuah manis yang ditandai dengan dilaksanakannya prosesi Ikrar Setia, kembalinya 10 mantan anggota OPM ke pangkuan NKRI, yang terdiri dari 7 (tujuh) orang di wilayah distrik Sinak dan 3 (tiga) orang di wilayah distrik Agandugume, Kabupaten Puncak. Ikrar setia ini murni lahir dari hati, hasil dari pengamatan panjang mereka atas ketulusan para prajurit di lapangan. Terbukti, TNI datang untuk membawa harapan dan membangun Papua yang lebih sejahtera

- a. **Bentuk Perhatian:** Satgas memberikan bantuan sembako dan sarana alat komunikasi masing-masing 1 buah hand phone sebagai modal awal bagi



Kembalinya 7 mantan anggota OPM di Distrik Sinak dan 3 orang di Distrik Agandugume ke pangkuan NKRI.

mereka untuk memulai hidup baru sebagai warga sipil yang produktif.

- b. **Transformasi Peran:** Kini, mereka sering berkunjung ke pos untuk bersilaturahmi. Lebih jauh lagi, mereka berperan aktif memberikan informasi terkait pergerakan kelompok-kelompok pengganggu guna memastikan kedamaian yang telah mereka rasakan tidak dirusak kembali.

G. Kesimpulan

Keberhasilan di Sinak menjadi bukti nyata bahwa kemanusiaan adalah senjata paling ampuh dalam menyelesaikan konflik. Satgas Yonif 142/Ksatria Jaya telah membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, musuh bisa menjadi kawan, dan ketakutan bisa berubah menjadi harapan.

Kini, warga Sinak dapat tidur dengan nyenyak, terbangun dengan semangat, dan menatap masa depan dengan rasa tenang. Sinak bukan lagi wilayah yang terisolasi oleh konflik, melainkan permata di pegunungan Papua yang bersinar dalam dekapan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kontribusi Yonif TP 840 / Golok Sakti dalam Mewujudkan Swasembada Pangan di Lebak, Banten

Oleh: Letkol Inf Brama Fathayasa
(DANYONIF TP 840 / GOLOK SAKTI)



PENDAHULUAN

Swasembada pangan merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan nasional. Ketersediaan pangan yang cukup, berkelanjutan, dan mandiri tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, krisis pangan dunia, serta dinamika geopolitik, Indonesia dituntut untuk memperkuat kemandirian pangan di setiap wilayah.

TNI Angkatan Darat sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta memiliki peran strategis dalam mendukung agenda tersebut. Tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan wilayah, TNI AD juga berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan, khususnya di wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam besar namun belum dikelola secara optimal. Yonif TP 840/ Golok Sakti, yang bemarkas di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, hadir sebagai wujud nyata peran tersebut melalui kontribusi konkret dalam mewujudkan swasembada pangan.



Kabupaten Lebak memiliki karakteristik wilayah yang luas, sumber daya alam yang melimpah, serta potensi pertanian, perikanan, dan peternakan yang besar. Namun demikian, potensi tersebut memerlukan sentuhan manajemen, disiplin, dan keteladanan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan

berlandaskan semangat kemanunggalan TNI dan rakyat, Yonif TP 840/ Golok Sakti menginisiasi program swasembada pangan terpadu yang mencakup sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan secara berkelanjutan.

PEMBUKAAN LAHAN TIDUR SEBAGAI FONDASI SWASEMBADA PANGAN



Kegiatan pembukaan lahan tidur secara gotong-royong oleh seluruh prajurit Yonif TP 840/GS

Langkah awal yang dilakukan Yonif TP 840/ Golok Sakti dalam mewujudkan swasembada pangan adalah pembukaan lahan tidur yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Tahap ini menjadi fondasi utama karena ketersediaan lahan produktif merupakan prasyarat mutlak bagi pengembangan sektor pangan.

Sebanyak 500 personel prajurit Yonif TP 840/ Golok Sakti dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pembukaan lahan. Dengan semangat gotong royong, disiplin, dan jiwa korsa yang tinggi, para prajurit bekerja secara terorganisir menggunakan peralatan sederhana, salah satunya golok. Penggunaan

golok tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki makna simbolis sebagai representasi ketangguhan, kesederhanaan, dan semangat pantang menyerah prajurit dalam menghadapi tantangan.

Proses pembukaan lahan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Penataan lahan dirancang agar dapat dimanfaatkan secara jangka panjang tanpa merusak keseimbangan alam. Melalui kerja keras dan dedikasi prajurit, lahan hutan yang sebelumnya tidak produktif berhasil diubah menjadi lahan pertanian terpadu yang siap mendukung program swasembada pangan.

JAGUNG PIPIL 10 HEKTARE SEBAGAI PILOT PROJECT KETAHANAN PANGAN

Setelah lahan siap diolah, Yonif TP 840/Golok Sakti menetapkan penanaman jagung pipil sebagai pilot project atau proyek percontohan swasembada pangan. Penanaman dilakukan pada lahan seluas 10 hektare dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang disiplin. Jagung pipil dipilih berdasarkan pertimbangan strategis, antara lain tingginya kebutuhan nasional, kemampuan adaptasi terhadap kondisi tanah dan iklim di Lebak, serta nilai ekonomis yang menjanjikan.

Prajurit Yonif TP 840/ Golok Sakti terlibat langsung dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, perawatan, hingga pengendalian hama. Keterlibatan langsung prajurit memastikan seluruh proses berjalan efektif, terkontrol, dan tepat waktu. Selain menghasilkan produk pangan, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan motivasi bagi masyarakat sekitar agar mampu mengelola pertanian secara produktif dan berorientasi hasil.



Kegiatan Panen Raya Jagung Pipil yang dihadiri Bapak Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa beserta para Muspida di wilayah Kab. Lebak, Banten

Keberhasilan pilot project jagung pipil ini mencapai puncaknya pada saat panen raya yang dilaksanakan bersama Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad). Kehadiran Wakasad pada kegiatan panen tersebut memiliki makna strategis sebagai bentuk dukungan pimpinan TNI AD sekaligus pengakuan atas kontribusi Yonif TP 840/ Golok Sakti dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Panen raya ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara

kebijakan pimpinan dan pelaksanaan di lapangan mampu menghasilkan capaian yang konkret dan terukur.

DIVERSIFIKASI TANAMAN: SAYURAN, TANAMAN INDUSTRI, DAN BUAH-BUAHAN

Untuk menciptakan sistem pangan yang kuat dan berkelanjutan, Yonif TP 840/ Golok Sakti menerapkan strategi diversifikasi tanaman. Diversifikasi ini bertujuan mengurangi risiko kegagalan panen, menjaga kesinambungan produksi, serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara lebih luas.



Kegiatan Panen Sayuran hasil kebun Yonif 840/GS

Pada sektor hortikultura, Yonif TP 840/ Golok Sakti mengembangkan tanaman sayuran berupa terong dan cabai keriting. Kedua komoditas ini memiliki masa tanam relatif singkat, nilai ekonomi tinggi, serta menjadi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Penanaman sayuran ini berkontribusi dalam menjaga stabilitas pasokan pangan lokal sekaligus membantu menekan fluktuasi harga di pasaran.

Selain itu, Yonif TP 840/ Golok Sakti juga mengembangkan tanaman industri berupa kayu Albasia atau sengon, mahoni, dan jati. Tanaman-tanaman ini dipilih karena memiliki nilai ekonomis tinggi dan berfungsi

sebagai investasi jangka panjang. Di samping manfaat ekonomi, tanaman kayu tersebut juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung keberlanjutan ekosistem.

Pada sektor buah-buahan, Yonif TP 840/ Golok Sakti menanam pisang cavendish, mangga, rambutan, dan alpukat. Tanaman buah ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan bergizi, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN TERPADU

Sebagai pelengkap sistem swasembada pangan, Yonif TP 840/ Golok Sakti mengembangkan sektor peternakan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Di bidang peternakan, satuan ini memelihara ayam petelur, domba, kambing, serta sapi potong jenis Simental dan Limousin. Ayam petelur dikembangkan untuk menjamin ketersediaan telur sebagai sumber protein yang terjangkau. Domba dan kambing berfungsi sebagai sumber daging sekaligus cadangan pangan strategis, sedangkan sapi Simental dan Limousin dipilih karena kualitas daging dan nilai ekonominya yang tinggi.

Selain peternakan darat, Yonif TP 840/ Golok Sakti juga mengembangkan sektor perikanan air tawar dengan membudidayakan ikan lele, ikan nila, dan ikan patin. Budidaya ikan ini menjadi sumber protein alternatif yang cepat panen, mudah dikelola, dan memiliki nilai gizi tinggi. Integrasi antara pertanian, peternakan, dan perikanan menciptakan sistem pangan yang lengkap dan saling mendukung.

PEMANFAATAN LIMBAH SEBAGAI SISTEM BERKELANJUTAN

Keunggulan utama dari program swasembada pangan Yonif TP 840/ Golok Sakti adalah penerapan konsep pertanian terpadu yang ramah lingkungan. Limbah sayuran hasil pertanian dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Sebaliknya, limbah ternak berupa kotoran hewan diolah dan dimanfaatkan sebagai pupuk organik bagi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Pola ini menciptakan siklus produksi yang saling terintegrasi antara pertanian, peternakan, dan perikanan. Selain menekan biaya produksi, sistem ini juga meningkatkan kesuburan tanah, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung keberlanjutan program swasembada pangan dalam jangka panjang.

PENUTUP

Kontribusi Yonif TP 840/ Golok Sakti dalam mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Lebak, Banten merupakan wujud nyata peran strategis TNI Angkatan Darat dalam mendukung ketahanan nasional. Dimulai dari pembukaan lahan hutan oleh 500 personel prajurit menggunakan golok, penanaman jagung pipil seluas 10 hektare sebagai pilot project, panen raya bersama Wakasad, pengembangan tanaman sayur, tanaman industri, dan buah-buahan, hingga pengelolaan peternakan dan perikanan terpadu yang memanfaatkan limbah secara berkelanjutan, seluruh rangkaian kegiatan tersebut mencerminkan komitmen, dedikasi, dan kepemimpinan Yonif TP 840/ Golok Sakti.

Melalui sinergi antara prajurit, pimpinan, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang serta menjadi model swasembada pangan yang dapat direplikasi di wilayah lain. Yonif TP 840/ Golok Sakti tidak hanya hadir sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan dan penjaga ketahanan pangan demi terwujudnya ketahanan nasional yang kokoh dan berkelanjutan.



ARTICLES INTERNATIONAL OF INNOVATION

PERJUANGAN DAN DEDIKASI PRAJURIT TNI DALAM MERAH PRESTASI INTERNASIONAL MELALUI INOVASI DIGITAL PENDIDIKAN

Sertu Hari Kurniawan S.Hub.Int
(Sandidam V/Brawijaya)



International Youth Innovation Summit #4

SPECIAL CHAPTER 2 NEGARA INSPIRING YOUTH INNOVATION

MALAYSIA-SINGAPORE | 7-10 OKTOBER 2024



FULLY FUNDED*

Program of Activities

Tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi di berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Di era digital saat ini, pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas konvensional, melainkan telah berkembang menjadi sistem berbasis teknologi yang interaktif dan adaptif. Namun demikian, kemajuan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata, khususnya oleh penyandang disabilitas yang masih menghadapi keterbatasan akses pembelajaran.

Sebagai bagian dari alat pertahanan negara, prajurit TNI Angkatan Darat tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk hadir di tengah masyarakat melalui implementasi nilai kemanunggalan TNI dengan rakyat. Pengabdian tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui inovasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Semangat inilah yang melatarbelakangi lahirnya inovasi digital pendidikan "Ability IQ", sebuah aplikasi pembelajaran yang

dirancang untuk membantu penyandang disabilitas, khususnya tunarungu dan tunawicara, agar dapat memperoleh pendidikan yang lebih inklusif dan efektif.

Berangkat dari kepedulian terhadap keterbatasan akses pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas, Sertu Hari Kurniawan tergerak untuk menghadirkan solusi berbasis teknologi yang sederhana namun aplikatif. Di berbagai wilayah, masih ditemukan kendala dalam proses pembelajaran bagi siswa tunarungu dan tunawicara, baik dari sisi metode penyampaian materi maupun ketersediaan media pendukung.

Melalui pendekatan teritorial dan interaksi langsung dengan masyarakat, ditemukan bahwa kebutuhan utama siswa disabilitas adalah media pembelajaran visual yang komunikatif, mudah dipahami, serta dapat digunakan secara mandiri di rumah maupun di sekolah.

Berdasarkan kondisi tersebut, dikembangkanlah aplikasi *Ability IQ* sebagai sarana pembelajaran berbasis audiovisual interaktif yang menekankan pada kemudahan, aksesibilitas, dan kebermanfaatannya.

Proses Pengembangan *Ability IQ*

Proses pengembangan aplikasi *Ability IQ* tidak dilakukan secara instan. Dengan kegigihan dan ketekunan Sertu Hari Kurniawan menginisiasi kolaborasi dengan mahasiswa serta masyarakat. Kolaborasi ini menggabungkan pengetahuan teknologi, pengalaman lapangan, serta kebutuhan nyata dunia pendidikan. Melalui kerja sama tersebut, tercipta sebuah inovasi yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada nilai kemanusiaan dan kebermanfaatannya sosial. Kepemimpinan yang kuat serta semangat pengabdian menjadi fondasi utama dalam proses pengembangan aplikasi ini.

Cara Kerja Aplikasi

Ability IQ adalah aplikasi belajar berbasis audio visual yang dirancang untuk membantu penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara. Aplikasi ini mendukung pembelajaran seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta membantu terapi dalam

mengenal huruf, angka, dan keterampilan dasar lainnya.

Cara kerja aplikasi *Ability IQ* dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan memilih materi pembelajaran yang ingin dipelajari, seperti huruf, angka, kata, atau latihan berhitung. Setelah itu, aplikasi akan menampilkan materi dalam bentuk visual berupa teks, gambar, animasi, dan video agar lebih mudah dipahami. Setiap materi dilengkapi dengan panduan audio visual seperti gerakan mulut, bahasa isyarat, atau video penjelasan sehingga pengguna dapat memahami cara membaca dan mengucapkan kata dengan benar meskipun memiliki keterbatasan pendengaran dan bicara.

Selain itu, aplikasi menyediakan latihan interaktif seperti memilih jawaban, mencocokkan gambar dengan kata, menulis huruf atau angka, serta kuis sederhana untuk mengukur pemahaman pengguna. Hasil



Sertu Hari Kurniawan mempresentasikan aplikasi *Ability IQ* sebagai inovasi teknologi yang dirancang untuk mendukung sistem pembelajaran bagi para penyandang disabilitas

latihan dapat dipantau untuk melihat perkembangan belajar. Aplikasi ini juga mendukung komunikasi antara siswa dan guru, sehingga guru dapat memberikan arahan atau materi tambahan sesuai kebutuhan. Dengan adanya fitur tersebut, *Ability IQ* dapat digunakan tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah untuk membantu orang tua dalam membimbing proses belajar anak secara mandiri.



Tabel Cara Kerja Aplikasi Ability IQ

No	Tahapan Cara Kerja	Penjelasan
1	Membuka Aplikasi	Pengguna membuka aplikasi Ability IQ melalui HP atau perangkat belajar.
2	Memilih Materi Belajar	Pengguna memilih menu materi seperti huruf, angka, kata, membaca, menulis, atau berhitung.
3	Menampilkan Materi Visual	Aplikasi menampilkan materi berupa teks, gambar, animasi, atau video agar mudah dipahami.
4	Panduan Audio Visual	Materi dilengkapi panduan seperti video gerakan mulut, bahasa isyarat, atau visual interaktif untuk membantu memahami pembelajaran .
5	Latihan Interaktif	Pengguna melakukan latihan seperti mencocokkan gambar, memilih jawaban, menulis huruf/angka, dan latihan berhitung.
6	Evaluasi / Kuis	Aplikasi menyediakan kuis atau soal sederhana untuk mengukur kemampuan pengguna setelah belajar.
7	Hasil dan Perkembangan Belajar	Sistem menampilkan hasil latihan sehingga pengguna dapat melihat perkembangan kemampuan secara bertahap.
8	Komunikasi Siswa dan Guru	Aplikasi dapat digunakan untuk komunikasi pembelajaran antara siswa dan guru dalam memberi arahan atau langkah belajar.
9	Pendampingan Orang Tua di Rumah	Orang tua dapat membantu anak belajar menggunakan materi dan latihan yang tersedia dalam aplikasi.

Implementasi di Sekolah

Inovasi *Ability IQ* tidak berhenti pada tahap perancangan. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara langsung di Sekolah Al Sakinah Bandung dan digunakan dalam proses pembelajaran bagi siswa penyandang disabilitas. Kehadiran *Ability IQ* memberikan dampak positif, terutama dalam membantu pemahaman materi dan meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Implementasi ini membuktikan bahwa inovasi digital yang tepat sasaran mampu mendukung terciptanya pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Prestasi Internasional di Singapura dan Malaysia

Prestasi internasional merupakan hasil dari proses panjang yang menuntut ketekunan,



Sertu Hari Kurniawan meraih Juara 1 Best Project Innovation melalui aplikasi *Ability IQ*, serta mendapatkan penghargaan Best Leadership, 2nd Best Presentation, dan 3rd Best Video Project.



Sertu Hari Kurniawan melaksanakan penerapan aplikasi *Ability IQ* di Sekolah Al Sakinah yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat, dengan melibatkan sejumlah siswa penyandang disabilitas.

kerja keras, dan dedikasi tinggi. Tidak hanya berasal dari kalangan akademisi atau profesional teknologi, prestasi tersebut juga dapat diraih oleh aparat negara yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan masyarakat. Hal ini tercermin dari perjalanan Sertu Hari Kurniawan, seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berhasil mengharumkan nama Indonesia melalui inovasi digital di bidang pendidikan hingga meraih prestasi internasional di Singapura dan Malaysia. Prestasi yang diraih meliputi:

- **Juara Umum Proyek Inovasi Terbaik**
- **Juara 2 Presentasi Terbaik**
- **Juara 3 Video Proyek Terbaik**
- **Penghargaan Kategori Best Leadership**

Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa inovasi karya anak bangsa mampu bersaing di tingkat global serta memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan internasional.

Pengabdian kepada Negara dan Masyarakat

Seluruh proses inovasi dan pencapaian ini merupakan bentuk pengabdian kepada negara dan kepedulian terhadap masyarakat. *Ability IQ* hadir bukan hanya sebagai produk teknologi, tetapi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas. Aplikasi ini diharapkan dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan secara lebih luas demi mendukung transformasi pendidikan digital di Indonesia.

Penutup

Dengan kegigihan, kolaborasi, dan dedikasi, seorang prajurit TNI mampu menghadirkan inovasi yang relevan dengan tantangan zaman. Prestasi internasional yang diraih menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berkarya, berinovasi, dan berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara, khususnya dalam membangun pendidikan yang inklusif dan berdaya saing global.



PENPAS
PENERANGAN PASUKAN
TNI ANGKATAN DARAT



TNI ANGKATAN DARAT

GERAKAN INDONESIA ASRI

Aman • Sehat • Resik • Indah

Instruksi Presiden Prabowo kepada Kepala Daerah dalam Taklimat Presiden pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Bersihkan Lingkungan dari:

- Sampah
- Baliho, iklan dan poster yang tidak pada tempatnya
- Kabel semrawut

Laksanakan kerja bakti rutin setiap minggu!



Gerakan Indonesia Asri bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, tertata, dan aman di seluruh Indonesia, sekaligus meningkatkan daya tarik ruang publik dan pariwisata

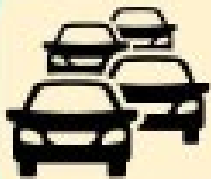


TIPS AMAN MUDIK 2026 LEBARAN



Siapkan surat-surat kendaraan (SIM, STNK) dan Suran Izin Jalan dari satuan masing-masing

Yakinkan kendaraan dalam keadaan siap



Utamakan keselamatan dan keamanan dalam berkendara

Sebelum meninggalkan rumah, kunci semua pintu jendela, cabut semua peralatan listrik



Cabut selang regulator kompor gas

Titipkan rumah ke tetangga/pengurus RT/RW setempat sebelum mudik



Memasang alarm/kamera (CCTV) di rumah guna memantau hal-hal yang tidak diinginkan

